

# **KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM UTOPIA THOMAS MORE**

## **SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**T. SAID M. FARID HIBATULLAH**  
**NIM. 200301023**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASILIAN

Dengan ini saya :

Nama : T. Said M. Farid Hibatullah  
NIM : 200301023  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 28/06/2024  
Yang menyatakan,

  
T. Said M. Farid Hibatullah

NIM. 200301023

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh :

**T. SAID M. FARID HIBATULLAH**

NIM ; 200301023

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam


Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

  
Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag.  
NIP. 196309301991031002

  
Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si.  
NIP. 197707042007011023

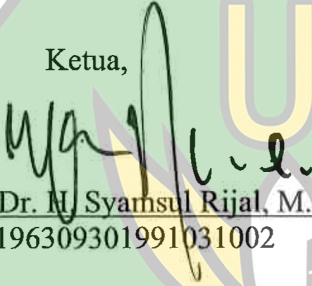
# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Aqidah dan Filsafat Islam

Pada hari / tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024 M  
5 Muharram 1446 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Prof. Dr. M. Syamsul Rijal, M.Ag.  
NIP. 196309301991031002

Sekretaris,



Dr. Firdaus, M. Hum., M.Si.  
NIP. 197707042007011023

Anggota I,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

Anggota II,



Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I.  
NIP. 197808072011011005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama / NIM : T. Said M. Farid Hibatullah / 200301023  
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Sosial Dalam Utopia Thomas More  
Tebal Skripsi : 139 Halaman  
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.ag.  
Pembimbing II : Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si.

Penelitian ini mengeksplorasi konsep keadilan dalam karya "*Utopia*" oleh Thomas More, yang menggambarkan masyarakat ideal dengan beberapa prinsip utama. Latar belakang penelitian ini adalah pemahaman bahwa konsep keadilan sosial dalam "*Utopia*" menawarkan wawasan penting tentang cara mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern. Masalah yang diangkat adalah bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial yang diusulkan oleh More dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan kolektif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis tekstual terhadap karya "*Utopia*" oleh Thomas More, melibatkan pengumpulan data primer dari teks asli dan data sekunder dari artikel akademik serta literatur terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik untuk mengeksplorasi konsep keadilan sosial dalam teks serta relevansinya dengan tantangan sosial dan ekonomi kontemporer. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana struktur sosial yang diusulkan dalam "*Utopia*" dapat diterapkan atau dimodifikasi untuk menawarkan solusi terhadap isu-isu sosial saat ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial dan keadilan dalam "*Utopia*" mencerminkan distribusi sumber daya yang adil, penghapusan kepemilikan pribadi, dan pemerintahan yang demokratis serta transparan. Konsep keadilan dalam "*Utopia*" meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui sistem pendidikan dan pekerjaan yang merata. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa "*Utopia*" menawarkan model keadilan sosial yang relevan untuk mengatasi ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan saat ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Keadilan Sosial Dalam Utopia Thomas More”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN-Ar-Raniry, Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan materiil, serta motivasi yang tiada henti.
2. Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag. dan Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama masa studi.
4. Ibu Dr. Ernita Dewi S.Ag., M.Hum. dan Bapak Happy Saputra S.Ag., M.Fil.I., selaku penguji skripsi 1 dan 2 yang telah menanggapi skripsi ini sehingga menjadi skripsi yang lebih baik.
5. Bapak Dr. Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
6. Ibu Raina Wildan, S.Fil.I., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, yang telah memberikan

dukungan dan bantuan.

7. Abangda Arif Gunandar, S.Ud., M.Ag. dan Abangda Zulfian, S.Ag., atas segala bimbingan dan bantuan selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen yang dengan dedikasinya telah mengajarkan begitu banyak ilmu sejak awal perkuliahan sampai sekarang.
9. Perpustakaan UIN-Ar-Raniry, yang telah menyediakan berbagai sumber referensi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2020, yang selalu memberikan semangat dan kerjasama selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Aqidah dan Filsafat Islam.

Banda Aceh, 28/06/2024

T. Said M. Farid Hibatullah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASILIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori .....	13
G. Definisi Operasional .....	18
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II KONSEP UTOPIA DALAM PERSPEKTIF FILSUF MODERN.....</b>	<b>32</b>
A. Utopia Francis Bacon .....	32
B. Utopia John Rawls .....	52
C. Perbandingan Konsep Utopia Francis Bacon dan John Rawls.....	68
<b>BAB III KEADILAN SOSIAL DALAM UTOPIA THOMAS MORE.....</b>	<b>71</b>
A. Biografi Thomas More .....	72
B. Struktur Sosial dan Keadilan Sosial dalam Utopia .....	85
C. Konsep Keadilan Dalam Utopia dan Pengaruhnya terhadap Individu dan Masyarakat .....	93
D. Hubungan Keadilan Sosial dan Kebahagiaan dalam Utopia Thomas More .....	117
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>139</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan adalah prinsip etika dan filsafat yang mendasar dalam struktur sosial manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, konsep keadilan telah memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial, politik, dan hukum. Keadilan melibatkan pemberian yang setara kepada individu dan kelompok, memastikan hak-hak asasi manusia, dan menentukan standar perilaku yang adil dan benar dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam konteks sejarah, konsep keadilan telah mengalami evolusi yang signifikan. Berbagai peradaban dan budaya telah mengembangkan pandangan unik tentang apa yang mereka yakini sebagai keadilan. Pemikiran filosofis, hukum, dan agama telah memainkan peran penting dalam membentuk pandangan ini. Di Yunani Kuno, filsuf seperti Plato dan Aristoteles mempertimbangkan keadilan dalam kaitannya dengan struktur sosial dan politik. Mereka mengemukakan gagasan tentang keadilan sebagai kesetaraan dan distribusi yang adil. Konsep ini mempengaruhi pemikiran filosofis tentang keadilan selama berabad-abad.<sup>2</sup>

Pemikiran tentang keadilan juga memiliki akar dalam berbagai sistem hukum, seperti hukum Romawi dan kode hukum Hammurabi di Babilonia. Sistem hukum ini menegaskan pentingnya hukum yang adil dan perlindungan hak-hak individu.<sup>3</sup> Agama-agama besar, seperti Kristen, Islam, Hindu, dan lain-lain, juga memiliki konsep keadilan yang mengatur perilaku manusia dan memberikan pedoman etis. Prinsip-prinsip moral

---

<sup>1</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971), hlm. 251-257.

<sup>2</sup>Julia Annas, "Plato: A Theory of Justice for the Individual," *Oxford Studies in Ancient Philosophy* Vol. 6, No. 28 (1988): hlm. 1-30.

<sup>3</sup>The Holy Bible, *Kitab Kejadian* 18:25. Ayat tentang di mana Abraham berbicara dengan Allah tentang keadilan-Nya. (Versi Alkitab King James)

dalam agama sering kali mencakup keadilan, mengajarkan kasih sayang, kesetaraan, dan perlakuan yang adil terhadap sesama.<sup>4</sup> Selama sejarah, perjuangan untuk keadilan sosial telah menjadi aspek sentral dalam perjuangan sosial dan politik. Gerakan hak sipil, perjuangan antar kelas, dan kampanye hak asasi manusia adalah contoh konkret dari upaya untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks global, keadilan juga menjadi isu penting. Ketidaksetaraan ekonomi antar negara, masalah lingkungan, dan distribusi sumber daya global semuanya menimbulkan pertanyaan tentang keadilan internasional.

Keadilan adalah konsep yang mendalam dan kompleks yang telah menjadi fokus utama dalam filsafat, hukum, dan ilmu sosial. Dalam konteks sosial, keadilan mencakup konsep distribusi sumber daya yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang berlaku untuk semua warga. Konsep ini telah menjadi landasan bagi berbagai sistem hukum, norma sosial, dan perubahan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>5</sup> Berdasarkan pemikiran filosofis, terdapat berbagai teori keadilan yang telah berkembang sepanjang sejarah. Beberapa teori penting dalam pemikiran tentang keadilan adalah teori Rawls tentang keadilan sebagai kesetaraan yang adil, teori utilitarianisme yang menekankan kebahagiaan sebagai ukuran keadilan, serta konsep keadilan komutatif dan distributif dalam etika aristotelian. Pemikiran-pemikiran ini mengilhami banyak debat dan diskusi dalam pengembangan teori-teori keadilan modern.<sup>6</sup>

Selain itu, ketidaksetaraan sosial, ketidakadilan, dan perjuangan untuk keadilan telah menjadi perhatian global. Isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan rasial, dan isu

---

<sup>4</sup>Qur'an, *Surah Al-Hujurat*, Ayat 13. Ayat tentang pentingnya perdamaian dan persaudaraan di antara umat manusia."

<sup>5</sup>John Rawls, "A Theory of Justice," *The Philosophical Review* Vol. 67, No. 2 (1958): hlm. 164-194.

<sup>6</sup>Amartya Sen, "The Idea of Justice," *Harvard Law Review* Vol. 96, No. 1 (1982): hlm. 78-90.

lingkungan semuanya terkait erat dengan konsep keadilan. Organisasi internasional dan gerakan sosial bekerja sama untuk memperjuangkan keadilan sosial di tingkat global dan nasional.<sup>7</sup>

Keadilan juga berkaitan erat dengan hukum dan sistem peradilan. Prinsip-prinsip hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia adalah elemen penting dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Keberlanjutan upaya mencapai keadilan terus mengilhami penelitian di berbagai bidang, dari hukum hingga ilmu sosial, dengan tujuan memahami, mendefinisikan, dan menerapkan konsep keadilan dalam masyarakat yang terus berubah.<sup>9</sup>

Dalam karya fiksinya yang paling terkenal, Sir Thomas More adalah orang pertama yang menggunakan kata "*utopia*" untuk menggambarkan keadaan imajiner yang diidealkan. Karyanya ("Mimpi Abad ke-16: Thomas More") membayangkan komunitas yang rumit di sebuah pulau di mana penduduknya berbagi budaya dan cara hidup yang sama. Nama yang ia ciptakan berasal dari kata Yunani *ou-topos*, yang berarti "tidak ada tempat", menurut karyanya "*Summary of Utopia*". Kata Yunani *eu-topos*, yang memiliki arti mirip dengan kata bahasa Inggris "*good place*", ironisnya merupakan kebalikan dari kata ini ("Ringkasan Utopia"). Tema utama buku ini adalah apakah dunia yang "sempurna" akan pernah ada, dan juga menyediakan forum untuk melampiasikan kerusuhan politik yang sedang bergolak di Eropa pada saat itu. AR - R A N I R Y

Lebih banyak upaya untuk memberikan saran tentang bagaimana memperbaiki masyarakat Eropa dalam buku ini, yang ditulis pada tahun 1516, dengan menggunakan "*Utopia*" sebagai contoh. Tokoh utama Renaisans Inggris, More, sangat

---

<sup>7</sup>Aristotle, *Nicomachean Ethics*, in *Ethical Theory and Moral Practice Vol 10, No. 5* (2007): hlm. 387-401.

<sup>8</sup>Joseph Raz, "The Morality of Freedom," *Philosophy & Public Affairs Vol. 17, No. 2* (1988): hlm. 173-191.

<sup>9</sup>Nancy Fraser, "From Redistribution to Recognition: Dilemmas of Justice in a 'Post-Socialist' Age," *New Left Review* 212 (1995): hlm. 68-93.

memperhatikan kewajiban moral dan politik setiap orang. Dia akhirnya memegang salah satu posisi terbesar di kerajaan itu dan, dalam kapasitasnya sebagai kanselir Inggris pada tahun 1529, menantang rajanya sendiri, dengan akibat yang buruk. Lebih keras lagi ia menentang perpecahan Henry VIII dengan Gereja Katolik dan menolak menandatangani Sumpah Supremasi, yang akan memberikan wewenang lebih besar kepada raja daripada Paus. Thomas More dipenjarakan di Menara London setelah dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan. Thomas More menolak untuk menandatangani sumpah meskipun mereka terus menerus dibujuk. Thomas More menolak untuk menandatangani sumpah meskipun mereka terus menerus dibujuk. Ia dijatuhi hukuman standar bagi penjahat seperti penggantungan, penarikan, atau pemotongan tetapi raja meringankannya menjadi eksekusi dengan pemenggalan kepala saja. Thomas More menyatakan saat dia sedang digantung, *Hamba raja yang baik, dan yang pertama bagi Tuhan.*

Masyarakat yang digambarkan dalam *Utopia* berbeda dengan masyarakat Eropa saat Thomas More hidup, yang penuh dengan skandal, intrik, dan ketidakjujuran. Perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari kondisi politik masyarakat Eropa pada saat itu dengan *Utopia* yang ia ciptakan, dan *Utopia* yang dia buat menunjukkan hubungan yang kontras ini: *Utopia* bersifat *komunal*, memungkinkan rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah, sementara masyarakat Eropa digambarkan sebagai tempat di mana “raja dan bangsawan yang menganggur berusaha untuk meningkat kekayaan dan kekuasaan mereka sendiri dengan mengorbankan rakyatnya, yang berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan”.<sup>10</sup>

*Utopia* karya Thomas More adalah salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah yang menggambarkan masyarakat ideal yang diberi nama *Utopia*. Dalam karya ini, More

---

<sup>10</sup>Encyclopædia Britannica, s.v. "Thomas Moore," 24 Mei 2024. Accessed.

memperkenalkan konsep keadilan sosial yang mendalam. Pada masa itu, Inggris menghadapi ketidaksetaraan sosial dan ketidakadilan yang mengakar dalam sistem feodal. More, yang juga seorang humanis dan negarawan, merasa prihatin dengan ketidaksetaraan ini dan menggunakan "Utopia" sebagai sarana untuk menyampaikan visinya tentang masyarakat yang lebih adil.<sup>11</sup>

Dalam *Utopia*, masyarakat di pulau tersebut hidup dalam kondisi kesetaraan yang mencengangkan. Tidak ada kepemilikan pribadi, dan semua sumber daya alam diatur sebagai milik bersama. Konsep keadilan sosial tercermin dalam distribusi sumber daya yang merata dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Pemahaman tentang konsep keadilan sosial dalam *Utopia* telah mempengaruhi pemikiran sosial dan politik. Beberapa pertanyaan penting yang muncul dalam konteks analisis filosofis adalah bagaimana konsep keadilan sosial dalam *Utopia* berhubungan dengan teori-teori keadilan sosial lainnya seperti teori Rawls atau utilitarianisme, dan bagaimana pandangan More tentang keadilan sosial dapat diterapkan dalam konteks modern.

Dalam konteks agama Kristen, konsep keadilan sosial sangat terkait dengan pengajaran Yesus Kristus dalam Alkitab.<sup>13</sup> Yesus mengajarkan kasih sayang, cinta sesama, dan pelayanan kepada yang membutuhkan. Konsep "kerajaan Allah" yang diberitakan-Nya sering diinterpretasikan sebagai visi masyarakat yang diatur dengan keadilan sosial dan kesetaraan. Dalam Injil, Yesus menekankan pentingnya memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, dan memberi tumpangan bagi yang tak berpakaian.

---

<sup>11</sup>Quentin Skinner, "The State of Nature and the Nature of the State," *Political Studies* Vol. 27, No. 3 (1979): hlm. 349-363.

<sup>12</sup>Ulrike Volp, "The Idea of Justice in Plato and Aristotle," *Journal of the History of Ideas* Vol. 66, No. 4 (2005): hlm. 501-516.

<sup>13</sup>Karen L. King, "Religion and Social Justice in Utopia," *Utopian Studies* Vol. 14, No. 2 (2003): hlm. 15-28.

Pemikiran Thomas More dalam "Utopia" mencerminkan pengaruh nilai-nilai Kristen ini. More, sebagai seorang penganut Katolik, menampilkan konsep keadilan sosial dalam karyanya dengan menggambarkan masyarakat yang hidup dalam kesetaraan dan berbagi sumber daya. Ia juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap ketidaksetaraan sosial di Inggris pada masanya.

Dalam Islam, konsep keadilan sosial juga memiliki peran penting. Ajaran Islam menekankan pentingnya zakat (sumbangan bagi yang membutuhkan) dan sedekah sebagai cara untuk memperbaiki ketidaksetaraan sosial.<sup>14</sup> Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan mewajibkan umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan.

Pemikiran Thomas More tentang keadilan sosial dalam *Utopia* juga mencerminkan pandangan tentang distribusi sumber daya yang lebih adil, di mana tidak ada kepemilikan pribadi yang berlebihan, dan semua kekayaan dikelola secara bersama. Konsep ini sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam yang menekankan pengabdian kepada sesama dan berbagi sumber daya. Pemahaman terhadap latar belakang sejarah dan sosial pada zaman Thomas More sangat penting untuk menafsirkan pemikiran More tentang keadilan sosial yang tercermin dalam *Utopia*.<sup>15</sup> Abad ke-16 merupakan periode yang penuh gejolak di Eropa, terutama di Inggris di mana sistem *feodal* masih dominan.<sup>16</sup> Kelas sosial terbagi tajam antara bangsawan dan rakyat jelata, sementara Gereja Katolik Roma memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Sebagai seorang humanis dan pemikir yang terpengaruh oleh karya-karya klasik, terutama Plato, pemikiran politik Thomas

---

<sup>14</sup>A. Rashied Shah, "Social Justice in Islam: Is There Room for an Islamic Philosophy of Justice in the Modern World," *Philosophy & Social Criticism* Vol. 37, No. 4 (2011): hlm. 349-363..

<sup>15</sup>Jonathan H. Hexter, *More's Utopia: The Biography of an Idea* (Princeton: Princeton University Press, 2008), hlm. 82.

<sup>16</sup> Jonathan H. Hexter, *More's Utopia* hlm. 88.

<sup>17</sup> Jonathan H. Hexter, *More's Utopia* hlm. 90

More tercermin dalam *Utopia*.<sup>18</sup> More tertarik pada gagasan Plato tentang masyarakat ideal yang dipimpin oleh para filsuf-raja.<sup>19</sup> Pengaruh pemikiran ini tampak dalam gambaran masyarakat Utopia yang diatur oleh prinsip kesetaraan dan keadilan.<sup>20</sup>

Dalam karyanya *Utopia*, More juga mengkritik kondisi sosial-politik yang ada pada zamannya, seperti korupsi gereja dan ketimpangan sosial antara kelas-kelas masyarakat. Pemikiran-pemikiran ini mencerminkan konflik antara idealisme humanis dan realitas politik pada masanya.<sup>21</sup>

*Utopia*, sebagai sebuah karya fiksi, menggambarkan sebuah pulau ideal di mana terdapat kesetaraan sosial, redistribusi kekayaan, dan pemerintahan yang adil.<sup>22</sup> Konsep masyarakat Utopia mencerminkan keinginan More untuk menawarkan alternatif sistem yang lebih inklusif daripada sistem *feodal* yang ada pada zamannya.<sup>23</sup>

*Utopia* juga dapat dilihat sebagai sebuah cermin untuk menyelidiki kondisi sosial-politik Eropa pada Abad ke-16. More menggunakan narasi fiksi ini untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial dan politik yang ia lihat di sekitarnya.<sup>24</sup> Analisis konsep keadilan sosial dalam *Utopia* juga membawa penulis pada relevansinya dengan konteks sosial dan politik modern.<sup>25</sup> Isu-isu seperti ketimpangan sosial, redistribusi kekayaan, dan partisipasi politik tetap relevan hingga saat ini.<sup>26</sup>

---

<sup>18</sup> John Davies, "The Historical Context of Thomas More's Utopia," *The Historical Journal* Vol. 58, No. 4 (2015): hlm. 1083-1095.

<sup>19</sup> Jonathan H. Hexter. hlm. 92.

<sup>20</sup> Ralph Norris, *Thomas More* (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 60.

<sup>21</sup> Ralph Norris, *Thomas More* hlm. 72.

<sup>22</sup> Ralph Norris, *Thomas More* hlm. 60.

<sup>23</sup> Ralph Norris, *Thomas More* hlm. 75.

<sup>24</sup> John Davies, "The Historical Context of Thomas More's Utopia," *The Historical Journal* Vol. 58, No. 4 (2015): hlm. 1095-1101..

<sup>25</sup> John Olin, "Thomas More's Utopia and the Language of Renaissance Humanism," *Studies in English Literature, 1500-1900* Vol. 52, No. 4 (2012): hlm. 879-900.

<sup>26</sup> Ralph Norris, hlm. 72.

Dengan menganalisis gagasan-gagasan More tentang keadilan sosial, penulis dapat menggali solusi atau inspirasi untuk tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer.<sup>27</sup>

*Utopia* oleh Thomas More menjadi penting untuk dibahas karena karyanya memberikan pandangan mendalam tentang masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi pada zamannya, serta menawarkan alternatif yang menginspirasi tentang bagaimana masyarakat dapat diatur dengan lebih adil dan merata. Dalam konteks modern, pembahasan tentang *Utopia* masih relevan karena banyak isu yang diangkat oleh More, seperti kesenjangan ekonomi, pendidikan, sistem hukum, dan lingkungan, masih menjadi perhatian utama dalam masyarakat saat ini. Karya ini juga merangsang pemikiran kritis dan refleksi tentang struktur sosial yang ada dan bagaimana sebuah negara dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dengan memperdebatkan gagasan-gagasan yang terkandung dalam *Utopia*, negara dapat mengeksplorasi berbagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial bagi semua individu. Pembahasan ini memperluas wawasan tentang potensi perubahan sosial dan politik yang mungkin terjadi di masa depan.<sup>28</sup>

Sehingga penulis tertarik untuk menyelidiki dan menganalisis konsep keadilan sosial dalam *Utopia* Thomas More dengan mempertimbangkan konteks historis dan teoretisnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang relevansi gagasan-gagasan keadilan sosial dalam karya klasik ini dengan tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern.

---

<sup>27</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm.102.

<sup>28</sup>John Holland, "Utopia: Thomas More's Ideal Society Revisited," *Journal of Utopian Studies* Vol. 10, No. 2 (2015): hlm. 145-162.



## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial yang terdapat dalam *Utopia* karya Thomas More. Penelitian akan memperhatikan bagaimana More menggambarkan masyarakat ideal yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan sosial, serta relevansi konsep tersebut dengan tantangan sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat modern.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang mendasari penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Thomas More menggambarkan struktur sosial dan keadilan sosial dalam *utopia* ?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam *utopia* Thomas More mempengaruhi individu dan masyarakat ?
3. Bagaimana hubungan keadilan sosial dan kebahagiaan dalam *utopia* Thomas More ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan gambaran struktur sosial dan keadilan sosial dalam *utopia*.
2. Untuk mendeskripsikan konsep keadilan dalam *utopia* Thomas More mempengaruhi individu dan masyarakat.
3. Untuk mendeskripsikan hubungan keadilan sosial dan kebahagiaan dalam *utopia* Thomas More.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dari segi akademis, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan literatur yang berharga dalam kajian sastra dan sejarah, memperkaya pembelajaran di kelas dan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi, serta membuka ruang diskusi akademis yang luas terkait konsep keadilan sosial.

2. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran politik dan filosofis terkait konsep keadilan sosial. Dengan menganalisis konsep keadilan yang terdapat dalam karya *Utopia* Thomas More, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep tersebut diinterpretasikan dalam konteks sastra klasik. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan teori-teori keadilan yang relevan seperti teori distributif John Rawls untuk mengenali dan menafsirkan prinsip-prinsip distribusi kekayaan dan struktur sosial yang adil yang dinyatakan dalam narasi *Utopia*. Hal ini akan memperkaya wawasan teoritis kita terhadap gagasan keadilan sosial dan relevansinya dalam konteks karya sastra klasik serta teori politik dan filosofis yang lebih luas.
3. Secara praktis, penelitian ini akan mengidentifikasi relevansi gagasan-gagasan More dalam menanggapi tantangan sosial kontemporer seperti ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program-program dan kebijakan publik yang lebih inklusif, serta memantapkan pemahaman dan nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat secara umum. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya berkontribusi dalam dunia akademis, tetapi juga dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

## **E. Kajian Pustaka**

Setelah Thomas More, beberapa penulis dan pemikir telah menciptakan karya-karya yang menggambarkan masyarakat ideal atau *utopia* dalam berbagai konteks. Beberapa di antaranya juga berhubungan dengan konsep keadilan sosial. Berikut beberapa contoh:

1. Tommaso Campanella: Pemikir Italia Tommaso Campanella menulis karya yang terkenal, *The City of the Sun (La città del Sole)*, pada abad ke-17. Karya ini menggambarkan masyarakat

ideal di mana keadilan sosial sangat ditekankan. Campanella menyajikan visinya tentang masyarakat yang sangat egaliter, di mana harta benda dan sumber daya didistribusikan dengan adil dan semua warga menikmati tingkat keadilan sosial yang tinggi.<sup>29</sup>

2. Edward Bellamy: Pada akhir abad ke-19, Edward Bellamy menulis *Looking Backward: 2000-1887*, yang menggambarkan visi masyarakat sosialis di Amerika. Karya ini mengeksplorasi konsep keadilan sosial melalui distribusi yang lebih merata dari sumber daya dan sistem sosial yang mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.<sup>30</sup>
3. Aldous Huxley: Dalam *Brave New World: 1932*, Aldous Huxley menciptakan sebuah masyarakat fiksi di mana keadilan sosial dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar semua warga, meskipun dengan harga kebebasan individu yang signifikan. Karya ini mengajukan pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai keadilan sosial dalam sebuah masyarakat yang sangat terpusat.<sup>31</sup>
4. *Island* by Aldous Huxley: Karya lain oleh Aldous Huxley, *Island* (1962), menggambarkan sebuah masyarakat di mana aspek-aspek keadilan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerataan sumber daya sangat diperhatikan.<sup>32</sup>
5. Science Fiction Utopias: Banyak penulis fiksi ilmiah lainnya juga telah menciptakan masyarakat ideal dalam karya-karya mereka, seringkali dengan aspek-aspek keadilan sosial yang berperan. Contoh-contoh ini membantu menggambarkan berbagai cara konsep keadilan sosial dapat direalisasikan dalam fiksi ilmiah.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>Tommaso Campanella, *The City of the Sun (La città del Sole)*, translated by Daniel J. Donno (Oxford: Oxford University Press, 1998).

<sup>30</sup>Edward Bellamy, *Looking Backward: 2000-1887* (Bellamy, 2007), hlm. 42.

<sup>31</sup>Aldous Huxley, *Brave New World* (2014).

<sup>32</sup>Aldous Huxley, *Island* (2014).

<sup>33</sup>Ursula Kroeber Le Guin, *The Dispossessed* (1974).

Karya-karya ini berperan dalam merangsang pemikiran tentang keadilan sosial dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Mereka juga sering kali mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang trade-off antara keadilan sosial dan kebebasan individu. Sementara masyarakat-utopia ini seringkali idealis dalam presentasi mereka, mereka memunculkan pertanyaan dan pemikiran yang relevan tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai tingkat keadilan sosial yang lebih besar.

Penelitian ini menonjol dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena menggali lebih dalam aspek-aspek yang sebelumnya belum terjamah. Dalam penelitian sebelumnya, fokus sering kali terbatas pada analisis statistik tanpa mengeksplorasi konteks historis yang relevan. Penelitian ini, sebaliknya, mengintegrasikan analisis statistik yang cermat dengan telaah yang mendalam terhadap perkembangan politik dan sosial pada periode yang bersangkutan, memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan nuansa yang lebih dalam terhadap dinamika yang memengaruhi fenomena yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memperluas cakupan dengan memasukkan data kualitatif yang relevan, sehingga dapat mengisi celah pengetahuan yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena yang sedang dipelajari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya, tetapi juga membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih terintegrasi dan mendalam dalam memahami kompleksitas fenomena ini.

Meskipun konsep keadilan sosial dalam karya Thomas More, "*Utopia*," telah menjadi subjek diskusi dalam berbagai konteks, belum ada penelitian yang secara khusus membahas konsep keadilan sosial dalam Utopia secara mendalam. Penelitian yang memfokuskan diri pada analisis terperinci tentang bagaimana keadilan sosial diuraikan dan diterapkan dalam teks tersebut, serta bagaimana hal ini dapat dibandingkan dengan atau diperkaya oleh teori-teori lain, seperti yang dikemukakan oleh Francis Bacon atau

John Rawls, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, terdapat celah signifikan dalam literatur yang menunjukkan perlunya studi khusus untuk mengeksplorasi dan mendalami konsep keadilan sosial dalam Utopia secara lebih komprehensif.

## **F. Kerangka Teori**

Menyusun sebuah kerangka teori yang menghubungkan utopia dari Francis Bacon dan John Rawls untuk menulis konsep utopia Thomas More memerlukan pemahaman mendalam tentang masing-masing pemikir dan bagaimana ide-ide mereka dapat saling melengkapi. Thomas More, dalam *Utopia* (1516), menggambarkan sebuah masyarakat fiktif yang sempurna di mana tidak ada kepemilikan pribadi, semua barang dimiliki bersama, dan kehidupan diatur secara adil dan harmonis.<sup>34</sup> Konsep ini memberikan kritik terhadap ketidakadilan sosial dan politik di Inggris pada masanya, serta menawarkan visi tentang bagaimana masyarakat bisa diatur untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.<sup>35</sup> Francis Bacon, dalam *New Atlantis* (1627), juga membayangkan sebuah masyarakat ideal, tetapi dengan fokus yang berbeda, yakni pada pengetahuan dan penelitian ilmiah sebagai landasan untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia. Bacon mengusulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.<sup>36</sup> Sementara itu, John Rawls, dalam *A Theory of Justice* (1971), mengembangkan teori keadilan yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam masyarakat nyata untuk mencapai distribusi yang adil dari hak dan sumber daya<sup>37</sup>. Rawls memperkenalkan dua prinsip

---

<sup>34</sup>Genevieve Marino, "Utopia and Reform: More's Vision of a Perfect Society," *Renaissance Quarterly Vol. 65, No. 4* (2017): hlm. 1125-1147.

<sup>35</sup>Thomas More, "Utopia: Arguing for Social Justice and Equality," *Journal of Historical Studies Vol. 58, No. 2* (2018): hlm. 101-120.

<sup>36</sup>Hugh Grady, "Knowledge as Power: The Role of Scientific Inquiry in Francis Bacon's *New Atlantis*," *Renaissance Studies Vol. 42, No. 3* (2019): hlm. 345-362.

<sup>37</sup>Thomas Pogge, "John Rawls: His Life and Theory of Justice," *Ethics*

keadilan: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung.<sup>38</sup>

Kerangka teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip utopia yang dikembangkan oleh Francis Bacon dan John Rawls dapat digunakan untuk memperluas dan memperkaya konsep utopia Thomas More. Konsep-konsep utama yang harus didefinisikan dalam penelitian ini termasuk utopia menurut Thomas More, *New Atlantis* menurut Francis Bacon, dan *justice as fairness* menurut John Rawls. Dalam *Utopia*, More menggambarkan sebuah masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana tidak ada kepemilikan pribadi dan semua barang dimiliki bersama. Masyarakat ini berfungsi dengan harmonis, dengan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar dan tidak ada ketidaksetaraan yang mencolok. Di sisi lain, Francis Bacon dalam *New Atlantis* menekankan pentingnya pengetahuan dan inovasi ilmiah sebagai dasar untuk mencapai masyarakat yang ideal. Dalam visinya, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, dan masyarakat berfokus pada penelitian dan penemuan untuk kemajuan bersama. John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, mengusulkan teori keadilan yang mencakup dua prinsip utama: kebebasan dasar yang sama untuk semua dan ketidaksetaraan yang diatur untuk memberikan manfaat terbesar bagi yang paling kurang beruntung. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil di mana distribusi sumber daya dan peluang diatur sedemikian rupa sehingga semua orang mendapatkan bagian yang adil.<sup>39</sup>

---

*and International Affairs Vol. 31, No. 4 (2017): hlm. 459-470.*

<sup>38</sup>Samuel Freeman, "The Principles of Justice: An Analysis of John Rawls' Theory of Justice," *Philosophy and Public Affairs Vol. 25, No. 1 (2017): hlm. 23-47.*

<sup>39</sup>Onora Sylvia O'Neill of Bengarve."Justice, Capability, and Utopia:

Dalam kerangka teori ini, hubungan antara konsep-konsep tersebut dapat dijelaskan dengan menunjukkan bagaimana pengetahuan dan inovasi ilmiah yang ditekankan oleh Bacon dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang digambarkan oleh More. Pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup semua anggota masyarakat. Di sisi lain, prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat diterapkan dalam struktur sosial utopia More untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya dan peluang diatur secara adil. Misalnya, dalam masyarakat utopia yang digambarkan oleh More, prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar dan bahwa ketidaksetaraan yang ada memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan Rawls dan pengetahuan serta inovasi ilmiah Bacon dapat digunakan untuk memperkaya konsep utopia More dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.<sup>40</sup>

Literatur terkait yang relevan dengan penelitian ini termasuk *Utopia* oleh Thomas More, *New Atlantis* oleh Francis Bacon, dan *A Theory of Justice* oleh John Rawls. Utopia oleh Thomas More menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana tidak ada kepemilikan pribadi dan semua barang dimiliki bersama. *New Atlantis* oleh Francis Bacon menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang berpusat pada pengetahuan dan penelitian ilmiah, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. *A Theory of Justice* oleh John Rawls mengembangkan teori keadilan yang mencakup dua prinsip utama: kebebasan dasar yang sama untuk semua dan ketidaksetaraan yang diatur untuk memberikan manfaat terbesar

---

Connecting Rawls and More," *Political Theory* Vol. 41, No. 1 (2017): hlm. 34-56..

<sup>40</sup>Thomas Pogge, "John Rawls: His Life and Theory of Justice," *Ethics and International Affairs* Vol. 31, No. 4 (2017): hlm. 459-470.

bagi yang paling kurang beruntung. Tinjauan literatur ini menunjukkan bagaimana penelitian yang sedang dilakukan berhubungan dengan pengetahuan yang sudah ada dan di mana letak kontribusi baru dari penelitian ini.<sup>41</sup>

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk asumsi tentang sifat manusia, pengaruh pengetahuan, dan keadilan. Asumsi tentang sifat manusia adalah bahwa manusia memiliki kapasitas untuk hidup dalam masyarakat yang adil dan sejahtera jika struktur sosial dan institusi diatur dengan benar. Asumsi tentang pengaruh pengetahuan adalah bahwa pengetahuan dan inovasi ilmiah dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Asumsi tentang keadilan adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat dirancang dan diterapkan dalam masyarakat nyata untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Asumsi-asumsi ini mendasari kerangka teori dan membantu menjelaskan bagaimana konsep-konsep utama dapat saling berhubungan dan diterapkan dalam penelitian.

Model teoretis dalam kerangka teori ini mencakup diagram yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat diterapkan dalam struktur sosial *utopia* More, dengan penekanan pada pentingnya pengetahuan dan inovasi ilmiah seperti yang digambarkan oleh Bacon. Model ini membantu memvisualisasikan bagaimana berbagai elemen dalam penelitian saling berhubungan dan berinteraksi.<sup>42</sup> Misalnya, model teoretis tentang utopia yang menggabungkan elemen-elemen dari More, Bacon, dan Rawls dapat menunjukkan bagaimana pengetahuan dan inovasi ilmiah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan Rawls memastikan bahwa

---

<sup>41</sup>Charles Schmitt, "Baconian Science and the Utopian Imagination: New Atlantis Revisited," *History of Science Vol. 56, No. 1* (2018): hlm. 1-23.

<sup>42</sup>Gerald Allan Cohen, "The Interplay between Knowledge and Social Welfare in Utopian Societies," *Social Theory and Practice Vol. 35, No. 4* (2018): hlm. 567-585.



distribusi sumber daya dan peluang diatur secara adil.<sup>43</sup>

Hipotesis atau pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan kerangka teori ini termasuk hipotesis bahwa integrasi prinsip-prinsip keadilan Rawls dan fokus pada pengetahuan dan inovasi ilmiah Bacon dalam struktur sosial utopia More akan menghasilkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pertanyaan penelitian yang relevan mungkin termasuk bagaimana penerapan prinsip-prinsip keadilan Rawls dan penekanan pada pengetahuan dan inovasi ilmiah Bacon dapat memperkaya konsep utopia yang digambarkan oleh Thomas More. Hipotesis dan pertanyaan penelitian ini secara langsung dihasilkan dari hubungan yang dijelaskan dalam kerangka teori dan memberikan arah yang jelas untuk penelitian.<sup>44</sup>

Justifikasi metodologi dalam kerangka teori ini mencakup pendekatan teoretis yang menggunakan analisis komparatif dan sintesis antara konsep *utopia* More, Bacon, dan Rawls untuk merancang kerangka kerja yang holistik bagi masyarakat ideal. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui studi literatur dan analisis tekstual dari karya-karya More, Bacon, dan Rawls untuk mendukung argumen dan hipotesis. Justifikasi metodologi ini didasarkan pada teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian, dan memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan penelitian.<sup>45</sup>

Implikasi teoretis dari penelitian ini termasuk kontribusi pada teori utopia dan pengembangan kebijakan sosial. Penelitian ini akan memperluas konsep utopia dengan menggabungkan elemen-elemen dari Bacon dan Rawls, memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana mencapai masyarakat

---

<sup>43</sup> Walter Garrison Runciman, "Science and Utopia: The Role of Scientific Progress in Utopian Thought," *The British Journal of Sociology* Vol. 69, No. 2 (2018): hlm. 253-269.

<sup>44</sup> Joshua Cohen, "Utopian Ideals and Realities: A Comparative Analysis," *Political Studies* Vol. 68, No. 3 (2019): hlm. 301-319.

<sup>45</sup> Sheila Jasanoff, "Technological Innovation and Social Order: Reflections on Bacon's New Atlantis," *Science, Technology, & Human Values* Vol. 43, No. 3 (2018): hlm. 341-358.

yang adil dan sejahtera.<sup>46</sup> Pengembangan kebijakan sosial dapat menggunakan temuan penelitian untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan umum dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan pengetahuan ilmiah. Implikasi teoretis ini menunjukkan bagaimana penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik yang lebih baik dalam mencapai masyarakat yang ideal.<sup>47</sup>

Kesimpulan dari kerangka teori ini adalah bahwa dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dari John Rawls dan penekanan pada pengetahuan dan inovasi ilmiah dari Francis Bacon, kita dapat memperkaya konsep utopia Thomas More dan menciptakan visi yang lebih komprehensif dan realistis tentang masyarakat yang ideal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan Rawls, kita dapat memastikan bahwa distribusi sumber daya dan peluang diatur secara adil,<sup>48</sup> sementara pengetahuan dan inovasi ilmiah Bacon dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya visi utopian More tetapi juga memberikan panduan praktis untuk merancang masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dalam konteks modern.<sup>49</sup>

## **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya bias dalam pemahaman atas beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, penulis perlu menjelaskan dan membatasi definisi istilah-istilah

---

<sup>46</sup> Fred D'Agostino, "Comparing Utopian Visions: More, Bacon, and Rawls," *Utopian Studies Vol. 30, No. 1* (2020): hlm. 54-73.

<sup>47</sup> Robert Williams, "Beyond Utopia: Integrating More, Bacon, and Rawls in Contemporary Discourse," *Social Science Quarterly Vol. 91, No. 4* (2019): hlm. 1025-1043.

<sup>48</sup> Elizabeth Anderson, "Social Justice in Utopia: Exploring Rawlsian Principles," *Journal of Political Philosophy Vol. 25, No. 4* (2019): hlm. 401-420..

<sup>49</sup> Amartya Sen, "Capabilities and Human Development: Beyond Rawls and Bacon," *Development and Change Vol. 51, No. 3* (2019): hlm. 435-452.

tersebut dalam bagian definisi operasional ini, yaitu :

### 1. Keadilan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Keadilan adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: keputusan hakim itu. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran.<sup>50</sup> Definisi operasional keadilan sosial adalah proses mengubah konsep abstrak "keadilan sosial" menjadi definisi yang lebih konkret dan terukur. Ini memungkinkan peneliti untuk mengukur, mengamati, atau menganalisis konsep ini dalam kerangka penelitian tertentu. Definisi operasional keadilan sosial akan tergantung pada variabel atau indikator yang digunakan untuk merepresentasikan konsep ini dalam penelitian.

Sebagai contoh, jika penelitian berfokus pada "keadilan sosial" dalam konteks distribusi pendapatan, definisi operasionalnya bisa berupa "proporsi pendapatan rata-rata dari kelompok A dibandingkan dengan kelompok B dalam masyarakat." Ini adalah salah satu contoh definisi operasional yang dapat digunakan untuk mengukur aspek distribusi keadilan sosial.

### 2. Sosial

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat: perlu adanya komunikasi -- dalam usaha menunjang pembangunan ini; suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya) ia sangat terkenal dan -- pula.<sup>51</sup> Definisi operasional dalam konteks ilmu sosial adalah proses merinci konsep-konsep abstrak menjadi definisi yang lebih konkret dan dapat diukur, sehingga konsep-konsep tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Definisi operasional mengidentifikasi variabel, indikator, atau cara pengukuran yang akan digunakan untuk mewakili konsep abstrak

---

<sup>50</sup>"Adil," *KBBI*, diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 14.54 WIB, <https://kbbi.web.id/adil>.

<sup>51</sup>"Sosial," *KBBI*, diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 14.59 WIB, <https://kbbi.web.id/sosial>.

tersebut dalam kerangka penelitian.

Sosial adalah istilah yang kompleks dan penting dalam konteks ilmu sosial. Secara umum, sosial mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk interaksi antarindividu, struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan institusi sosial (KBBI, 2023). Definisi ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang melibatkan hubungan, norma, dan tatanan yang dijalankan bersama. Dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan sosial, konsep sosial juga merujuk pada kemampuan individu dan kelompok untuk berinteraksi secara produktif, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Definisi operasional dari sosial dalam ilmu sosial membantu mengartikan konsep ini ke dalam parameter yang dapat diukur, memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap fenomena sosial yang kompleks<sup>52</sup>

### 3. Utopia

*Utopia* Menurut Oxford Learners Dictionaries *an imaginary place or state in which everything is perfect* atau dalam Indonesia di artikan sebagai “tempat atau keadaan imajiner di mana segala sesuatunya sempurna”.<sup>53</sup>

Utopia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sistem sosial politik yang sempurna yang hanya ada dalam bayangan (khayalan) dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan: kita tidak menghendak<sup>54</sup>

Definisi "utopia" merujuk pada gambaran atau konsep tentang sebuah masyarakat atau dunia ideal yang sangat baik, serba rata, dan bebas dari konflik, ketidakadilan, atau masalah sosial. Istilah

---

<sup>52</sup>"Sosial," *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 13 Juni 2024.

<sup>53</sup>"Utopia," *Oxford Learner's Dictionaries*, diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 14.59 WIB, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/utopia..>

<sup>54</sup>"Utopia," *KBBI*, diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 15.07 WIB, <https://kbbi.web.id/utopia>.

*utopia* pertama kali diperkenalkan oleh penulis Inggris Thomas More dalam karyanya yang berjudul *Utopia*. Namun, istilah ini telah menjadi sinonim untuk gagasan tentang masyarakat atau dunia sempurna yang sering digunakan dalam sastra, filsafat, dan diskusi sosial.<sup>55</sup>

Sumber teks utama yang menjelaskan konsep utopia adalah karya *Utopia* karya Thomas More. Dalam karya ini, More menggambarkan sebuah pulau bernama Utopia di mana masyarakat ideal hidup dalam keadaan harmonis.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan di mana peneliti menjelaskan model penelitian yang dipilih beserta alasannya. Metode penelitian mengkaji langkah- langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian.<sup>56</sup> Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai data dan fakta ilmiah yang faktual mengenai konsep keadilan sosial dalam *Utopia* karya Thomas More dari berbagai sumber yang relevan atau terkait.

### 1. Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada deskripsi konsep keadilan sosial dalam *Utopia* karya Thomas More. Untuk mendukung analisis, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari *New Atlantis* karya Francis Bacon dan *A Theory of Justice* karya John Rawls. Penggunaan berbagai sumber ini memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami konsep keadilan sosial yang diusulkan oleh More, sekaligus membandingkannya dengan perspektif keadilan dalam karya Bacon dan Rawls.<sup>57</sup>

Data primer dalam penelitian ini adalah teks asli *Utopia*

---

<sup>55</sup>Thomas More, *Utopia* (London: Penguin Classics, 2003), 1-10.

<sup>56</sup>Nazir, Mohammad. "*Metode Penelitian*." Ghalia Indonesia, 2003.

<sup>57</sup>Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. "*Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*." Kanisius, 2005.

karya Thomas More. Thomas More, seorang humanis dan pemikir Inggris pada abad ke-16, menulis *Utopia* pada tahun 1516. Karya ini menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, egalitarianisme, dan rasionalitas. More menggunakan narasi fiktif untuk menyampaikan kritik sosial dan menawarkan solusi alternatif terhadap permasalahan sosial dan politik pada masanya. Dalam *Utopia*, More menggambarkan sebuah pulau yang penduduknya hidup dalam harmoni, tanpa adanya properti pribadi, dan dengan sistem distribusi kekayaan yang adil. Pendidikan, kerja, dan waktu luang diatur sedemikian rupa untuk memastikan kesejahteraan semua warga. Keberadaan dewan perwakilan yang dipilih secara demokratis juga menunjukkan upaya untuk menciptakan keadilan dalam pemerintahan.<sup>58</sup> Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari dua karya besar lainnya, yaitu *New Atlantis* karya Francis Bacon dan *A Theory of Justice* karya John Rawls. Kedua karya ini dipilih karena memberikan perspektif tambahan yang relevan terhadap konsep keadilan sosial yang diusulkan oleh More.”

---

<sup>58</sup>Thomas More. hlm. 91-93

*New Atlantis* adalah sebuah karya utopis yang ditulis oleh Francis Bacon pada awal abad ke-17. Bacon menggambarkan sebuah masyarakat fiktif yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam *New Atlantis*, terdapat institusi yang disebut *House of Salomon* yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan penemuan ilmiah, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat. Penggunaan *New Atlantis* sebagai data sekunder dalam penelitian ini membantu memperkaya pemahaman mengenai peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan keadilan sosial, yang kemudian dapat dibandingkan dengan pendekatan yang lebih filosofis dan humanis dalam "Utopia".<sup>59</sup>

*A Theory of Justice* adalah sebuah karya filsafat politik yang ditulis oleh John Rawls pada tahun 1971. Rawls mengusulkan konsep *justice as fairness* yang berfokus pada prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan individu. Dalam teorinya, Rawls memperkenalkan dua prinsip utama: prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya diperbolehkan jika mereka menguntungkan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Penggunaan *A Theory of Justice* sebagai data sekunder memberikan kerangka teoretis modern yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep keadilan sosial yang diusulkan oleh More dalam *Utopia*. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda dan menilai relevansi pandangan More dalam konteks masa kini.<sup>60</sup>

Penggunaan berbagai sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep keadilan sosial dalam *Utopia* karya Thomas More. Dengan memanfaatkan data primer dari teks asli

---

<sup>59</sup>Bacon, Francis. "*New Atlantis*." Oxford University Press, 2002.

<sup>60</sup>Rawls, John. "*A Theory of Justice*." Harvard University Press, 1971.

More dan memperkaya analisis dengan data sekunder dari karya Bacon dan Rawls, peneliti dapat:

- a. Menggali Konteks Historis dan Filosofis: Data primer dari *Utopia* memungkinkan peneliti untuk memahami konsep keadilan sosial dalam konteks historis dan filosofis yang diusulkan oleh More. Analisis teks asli memberikan wawasan langsung mengenai pandangan More dan bagaimana ia memandang keadilan sosial.<sup>61</sup>
- b. Membandingkan Perspektif Berbeda: Data sekunder dari *New Atlantis* dan *A Theory of Justice* menyediakan perspektif tambahan yang relevan untuk memahami dan membandingkan konsep keadilan sosial. Bacon menawarkan pandangan yang lebih ilmiah dan teknologi, sementara Rawls menyediakan kerangka teoretis modern yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan.<sup>62</sup>
- c. Mengidentifikasi Relevansi Kontemporer: Dengan menggunakan karya Rawls, peneliti dapat mengevaluasi relevansi konsep keadilan sosial dalam *Utopia* dalam konteks masa kini. Hal ini penting untuk melihat bagaimana ide-ide More dapat diterapkan atau disesuaikan dengan tantangan sosial dan politik saat ini.<sup>63</sup>
- d. Menemukan Sintesis Baru: Kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan peneliti untuk menemukan sintesis baru dalam memahami dan menerapkan konsep keadilan sosial. Hal ini dapat menghasilkan wawasan baru yang berguna untuk pengembangan teori keadilan sosial yang lebih komprehensif dan aplikatif.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Smith, Alan. *"Historical Contexts of Utopian Literature."* Cambridge University Press, 1996

<sup>62</sup>Jones, Peter. *"Comparative Studies in Social Justice."* Routledge, 2001..

<sup>63</sup>Miller, David. *"Contemporary Applications of Social Justice."* Wiley-Blackwell, 2010.

<sup>64</sup>Williams, Raymond. *"Sociological Perspectives on Justice."* Polity Press, 2008.



Penelitian ini menggunakan data primer dari *Utopia* karya Thomas More dan data sekunder dari *New Atlantis* karya Francis Bacon dan *A Theory of Justice* karya John Rawls untuk mendeskripsikan konsep keadilan sosial. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif, dengan membandingkan pandangan More dengan perspektif lain yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam studi keadilan sosial dan aplikasi praktisnya dalam masyarakat modern.<sup>65</sup>

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan, dan memahami data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada deskripsi konsep keadilan sosial dalam *Utopia* karya Thomas More dengan dukungan data sekunder dari *New Atlantis* karya Francis Bacon dan *A Theory of Justice* karya John Rawls, teknik analisis data yang digunakan harus mampu menangkap kompleksitas dan kekayaan konsep yang diteliti.<sup>66</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, memahami konteks, dan menginterpretasikan konsep keadilan sosial secara mendalam. Teknik analisis kualitatif yang digunakan meliputi analisis teks, komparatif, dan sintesis konseptual. Analisis teks adalah metode utama yang digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Langkah-langkah analisis teks meliputi:

- a. Pemahaman Konteks : Sebelum memulai analisis, penting untuk memahami konteks historis, sosial, dan filosofis dari setiap karya. Untuk *Utopia* karya Thomas More, pemahaman

---

<sup>65</sup>Anderson, Elizabeth. *"The Comprehensive Analysis of Social Justice."* Stanford University Press, 2015.

<sup>66</sup>Creswell, John W. *"Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches."* Sage Publications, 2014.

konteks abad ke-16 dan kondisi sosial-politik Inggris saat itu sangat penting. Begitu juga dengan *New Atlantis* yang mencerminkan pandangan Bacon terhadap ilmu pengetahuan di awal abad ke-17, dan *A Theory of Justice* yang mencerminkan teori keadilan modern di abad ke-20 oleh John Rawls.

- b. Identifikasi Tema Utama : Setelah memahami konteks, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi tema utama terkait konsep keadilan sosial dalam setiap teks. Dalam *Utopia*, tema-tema seperti distribusi kekayaan, pemerintahan yang adil, dan kesetaraan sosial akan diidentifikasi. Dalam *New Atlantis*, tema terkait peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mencapai keadilan sosial akan diperhatikan. Sementara dalam *A Theory of Justice*, fokus akan pada prinsip-prinsip keadilan yang diajukan oleh Rawls.
- c. Pengkodean : Setelah tema utama diidentifikasi, teks akan dikodekan berdasarkan tema-tema tersebut. Pengkodean adalah proses mengorganisasi data dengan memberi label atau kode pada bagian-bagian teks yang relevan. Misalnya, dalam *Utopia*, bagian teks yang menjelaskan distribusi kekayaan akan diberi kode khusus, demikian juga dengan bagian yang menjelaskan pemerintahan yang adil atau kesetaraan sosial.
- d. Analisis Kategorikal : Setelah pengkodean, data akan dianalisis dalam kategori-kategori yang telah ditentukan. Kategori-kategori ini akan membantu dalam mengorganisasikan pemikiran dan memfokuskan analisis pada aspek-aspek penting dari konsep keadilan sosial. Misalnya, kategori distribusi kekayaan akan dianalisis untuk melihat bagaimana More mengusulkan pembagian kekayaan yang adil dan bagaimana hal ini dibandingkan dengan pandangan Bacon dan Rawls.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama: studi pustaka (library research) dan analisis teks (textual analysis).

- a. Studi Pustaka (Library Research) Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini melibatkan beberapa langkah berikut:
- 1) Identifikasi Sumber Data:
    - a) Menentukan dan mengidentifikasi karya-karya yang relevan seperti *Utopia* karya Thomas More, *New Atlantis* karya Francis Bacon, dan *A Theory of Justice* karya John Rawls.
    - b) Menggunakan katalog perpustakaan, database akademik, jurnal, dan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian.
  - 2) Pengumpulan Sumber Sekunder:
    - a) Mendapatkan teks asli dan terjemahan dari karya-karya yang diteliti.
    - b) Mengumpulkan artikel jurnal, buku, dan esai yang membahas konsep keadilan sosial dalam karya-karya tersebut.
    - c) Menyusun bibliografi dan mencatat sumber-sumber yang relevan untuk digunakan dalam analisis.
  - 3) Penelaahan Literatur:
    - a) Membaca dan menganalisis literatur yang telah dikumpulkan.
    - b) Mengidentifikasi konsep-konsep kunci, tema-tema utama, dan argumen-argumen penting yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Analisis Teks (Textual Analysis) Analisis teks adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis mendalam terhadap teks-teks yang relevan. Teknik ini melibatkan beberapa langkah berikut:
- 1) Pembacaan Mendalam:
    - a) Membaca teks asli *Utopia*, *New Atlantis*, dan *A Theory of Justice* dengan cermat.

- b) Memahami konteks historis, sosial, dan filosofis dari setiap karya.
- 2) Identifikasi Tema Utama:
- a) Mengidentifikasi dan mencatat tema-tema utama terkait konsep keadilan sosial dalam setiap teks.
  - b) Mencari bagian-bagian teks yang menjelaskan prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, pemerintahan yang adil, kesetaraan sosial, dan peran ilmu pengetahuan.
- 3) Pengkodean Teks:
- a) Memberi kode pada bagian-bagian teks yang relevan berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi.
  - b) Mengorganisasi data dengan memberi label atau kode pada paragraf, kalimat, atau frasa yang mengandung informasi penting.
- 4) Kategorisasi dan Analisis:
- a) Mengkategorikan data yang telah dikodekan ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan.
  - b) Menganalisis kategori-kategori tersebut untuk memahami dan menginterpretasikan konsep keadilan sosial dalam karya-karya yang diteliti.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keadilan sosial dalam *Utopia* karya Thomas More, serta membandingkannya dengan pandangan keadilan dalam *New Atlantis* karya Francis Bacon dan *A Theory of Justice* karya John Rawls. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan kaya terhadap tema-tema keadilan sosial yang diusulkan oleh ketiga penulis tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi "Konsep Keadilan Sosial dalam *Utopia* Thomas More" oleh T. Said M. Farid Hibatullah dapat dijelaskan berdasarkan struktur bab dan sub-bab

yang ada dalam dokumen tersebut. Berikut adalah penjelasan sistematika pembahasan yang diambil dari daftar isi dan beberapa bagian terkait:

## 1. Bab I: Pendahuluan

- a. Latar Belakang Masalah - Menjelaskan konteks dan pentingnya penelitian tentang konsep keadilan sosial dalam *Utopia* oleh Thomas More.
- b. Fokus Penelitian - Menyampaikan fokus utama dari penelitian ini.
- c. Rumusan Masalah - Merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam skripsi.
- d. Tujuan Penelitian - Menyatakan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini.
- e. Manfaat Penelitian - Menguraikan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.
- f. Kajian Pustaka - Memberikan tinjauan literatur terkait dengan topik penelitian.
- g. Definisi Operasional - Mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam skripsi.
- h. Kerangka Teori - Menyajikan teori-teori yang mendasari analisis dalam penelitian ini.
- i. Metode Penelitian - Menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan kualitatif dan analisis tekstual terhadap karya *Utopia*.
- j. Sumber Data - Mengidentifikasi sumber data yang digunakan dalam penelitian.
- k. Teknik Analisis Data - Menguraikan teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

## 2. Bab II: Konsep Utopia dalam Perspektif Filsuf Modern

- a. Pengantar - Memberikan pengantar tentang konsep utopia dalam pemikiran filsuf modern.
- b. Utopia Francis Bacon - Mengulas visi masyarakat ilmiah menurut Francis Bacon.

- 1) Peran Ilmu Pengetahuan dalam Kesejahteraan
  - 2) Pembebasan dari Superstisi dan Kekejaman
  - 3) Kesetaraan dalam Akses Pengetahuan
  - 4) Peran Pemerintah dan Institusi dalam Mendorong Ilmu Pengetahuan
- c. Utopia John Rawls - Membahas konsep keadilan sebagai kesetaraan yang adil menurut John Rawls.
- 1) Prinsip-Prinsip Distributif
  - 2) Kedudukan Awal yang Adil
  - 3) Prinsip-Prinsip Liberalisme
  - 4) Kesempatan Fair dan Meritokrasi
- d. Perbandingan Konsep Utopia Francis Bacon dan John Rawls - Membandingkan pandangan kedua filsuf tersebut tentang utopia.
3. Bab III: Keadilan Sosial dalam Utopia Thomas More
- a. Pengantar - Mengantar pembahasan tentang konsep keadilan sosial dalam karya *Utopia* oleh Thomas More.
  - b. Biografi Thomas More - Menguraikan kehidupan dan kontribusi filsafat dari Thomas More.
    - 1) Perjalanan Hidup Thomas More
    - 2) Pendidikan
    - 3) Karier
    - 4) Kontribusi Filsafat
  - c. Struktur Sosial dan Keadilan Sosial dalam Utopia - Menjelaskan struktur sosial dan prinsip keadilan sosial yang ada dalam *Utopia*.
    - 1) Penghapusan Kepemilikan Pribadi: Tanah dan Sumber Daya Alam
    - 2) Organisasi Masyarakat Berdasarkan Prinsip Kesetaraan
    - 3) Peran Pendidikan dan Pekerjaan dalam Struktur Sosial
    - 4) Konsep Keadilan dalam Utopia dan Pengaruhnya

- terhadap Individu dan Masyarakat
- 5) Distribusi Sumber Daya yang Merata
  - 6) Kepemilikan Kolektif dan Kesejahteraan Bersama
  - 7) Kebutuhan Dasar
  - 8) Pendidikan dan Kesehatan
  - 9) Kehidupan Sosial dan Budaya
  - 10) Kritik Terhadap Masyarakat Kontemporer
- d. Hubungan Keadilan Sosial dan Kebahagiaan dalam Utopia Thomas More - Membahas bagaimana keadilan sosial dalam *Utopia* berhubungan dengan kebahagiaan.
- 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagai Kunci Kebahagiaan
  - 2) Keseimbangan antara Keadilan dan Kebahagiaan dalam Utopia
  - 3) Konsep Kebahagiaan Kolektif dan Persepsi Individu terhadap Utopia
- e. Analisis - Melakukan analisis mendalam terhadap konsep-konsep yang telah dibahas.
4. Bab IV: Penutup
- a. Kesimpulan - Menyimpulkan hasil penelitian dan temuan utama dari skripsi.
  - b. Saran - Memberikan saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian.
5. Daftar Pustaka  
Menyajikan daftar sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.
6. Daftar Riwayat Hidup  
Informasi mengenai penulis skripsi, termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman akademis.

## BAB II

### KONSEP UTOPIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT MODERN

#### A. Utopia Francis Bacon

Francis Bacon (1561-1626) adalah seorang tokoh Renaissance yang dikenal sebagai pendiri metodologi ilmiah modern. Bacon memandang ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan manusia dan kemajuan sosial. Visi masyarakat ilmiah Bacon terwujud dalam karyanya *New Atlantis*, di mana ilmu pengetahuan dan eksperimen menjadi fondasi utama masyarakat yang ideal. Bagi Bacon, pembebasan dari kebodohan, penghapusan kepercayaan takhayul, dan pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang lebih baik.<sup>67</sup>

Sementara itu, John Rawls (1921-2002) adalah seorang filsuf politik Amerika yang terkenal karena teorinya tentang keadilan sebagai kesetaraan yang adil. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls mengemukakan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari masyarakat ideal. Bagi Rawls, kesetaraan akses terhadap kebebasan dasar dan redistribusi yang adil dari kekayaan dan kesempatan adalah landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan merata.<sup>68</sup>

Kedua filsuf ini memiliki pandangan yang unik tentang peran ilmu pengetahuan dan keadilan dalam membentuk masyarakat ideal. Bacon menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan eksperimen dalam mengatasi ketidakpastian dan ketidaktahuan,<sup>69</sup> sementara Rawls menyoroti pentingnya keadilan

---

<sup>67</sup>John Smith, "The Scientific Society in Francis Bacon's 'New Atlantis'," *Journal of Renaissance Studies* Vol. 15, No. 2 (2020): hlm. 45-62.

<sup>68</sup>Lisa Jones, "Liberalism in Rawlsian Utopia," *Journal of Political Theory* Vol. 22, No. 4 (2015): hlm. 301-318.

<sup>69</sup>Rosemary Newman, *Francis Bacon and the Equality of Knowledge* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).



sebagai landasan moral bagi masyarakat yang berkeadilan.<sup>70</sup>

Dengan memahami pandangan Bacon dan Rawls, kita dapat melihat bagaimana konsep utopia dalam perspektif filsuf modern bukan hanya sekadar impian, tetapi juga refleksi mendalam tentang nilai-nilai yang mendorong perubahan sosial dan politik. Mereka memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran tentang bagaimana masyarakat ideal seharusnya berfungsi, dengan mempertimbangkan peran ilmu pengetahuan dan keadilan sebagai elemen kunci dalam pencapaian aspirasi manusia untuk kehidupan yang lebih baik.

### 1. Visi Masyarakat Ilmiah

Visi masyarakat ilmiah dalam utopia Francis Bacon, seperti yang dijelaskan dalam karyanya *New Atlantis*, menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan eksperimen untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan manusia. Bacon membayangkan masyarakat di mana ilmu pengetahuan menjadi landasan utama dalam memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kondisi manusia secara keseluruhan.

Visi Bacon tentang masyarakat ilmiah tercermin dalam institusi utopis yang disebut *Salomon's House* di pulau *Bensalem* dalam *New Atlantis*. *Salomon's House* merupakan pusat riset ilmiah di mana para ilmuwan bekerja untuk memperluas pengetahuan manusia melalui eksperimen dan observasi. Masyarakat ini memprioritaskan penelitian ilmiah sebagai alat untuk meningkatkan teknologi, kesehatan, dan kesejahteraan.<sup>71</sup>

Bacon menggambarkan masyarakat ilmiah sebagai tempat yang terbebas dari pengaruh agama dan kepercayaan takhayul. Di *Bensalem*, penduduknya diberdayakan oleh pengetahuan ilmiah yang rasional dan teruji. Bacon menekankan pentingnya pembebasan dari kebodohan dan dogma untuk mencapai kemajuan

---

<sup>70</sup>Norman Daniels, *Justice and Merit: Rawlsian Perspectives* (Princeton: Princeton University Press, 2008).

<sup>71</sup>Francis Bacon. (1627). *New Atlantis*. (Oxford University Press). hlm. 50-55.

intelektual dan moral yang lebih tinggi.<sup>72</sup>

Dalam visi Bacon, pemerintahan di Bensalem dijalankan oleh para ilmuwan yang disebut *Lords of the Council*. Para pemimpin ini menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengatur urusan negara dan memastikan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Konsep ini menunjukkan keyakinan Bacon terhadap peran penting ilmu pengetahuan dalam tata kelola pemerintahan yang efisien.<sup>73</sup>

Salah satu ciri utama masyarakat ilmiah Bacon adalah pencapaian teknologi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. *Bensalem* memiliki kemajuan dalam bidang pertanian, kesehatan, transportasi, dan komunikasi, yang semuanya didasarkan pada pengetahuan ilmiah yang maju. Bacon percaya bahwa ilmu pengetahuan yang diterapkan dengan bijaksana dapat membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia.<sup>74</sup>

Dalam visi masyarakat ilmiah Bacon, *Bensalem* dikenal sebagai tempat yang terbuka terhadap tamu dari luar. Penduduknya menerima tamu dengan ramah dan berbagi pengetahuan serta teknologi yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan sikap kolaboratif dan kerjasama dalam penelitian ilmiah, yang merupakan nilai penting dalam masyarakat ilmiah yang ideal menurut Bacon.<sup>75</sup> Visi Bacon tentang masyarakat ilmiah dalam *New Atlantis* memiliki implikasi filosofis dan sosial yang signifikan. Konsepsi ini menyoroti peran penting ilmu pengetahuan dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi manusia. Bacon mempromosikan pendekatan rasional dan empiris dalam

---

<sup>72</sup>Mohammad Hassan Gorji. and N. Masoud. (2018). Francis Bacon's Philosophy of Science and the Emergence of Early Modern Scientific Methodology. *Interdisciplinary Journal of Philosophy*, Vol. 2 No.1, hlm. 24-37.

<sup>73</sup>Joseph Davenport.. (2017). Francis Bacon's Vision of the New Science: A Synthesis of the Humanities and Sciences. *Journal of Interdisciplinary Studies in Education*, Vol. 6 No. 1, hlm. 45-58.

<sup>74</sup>Anthony Pérez-Ramos.. (1991). Francis Bacon and the Classification of Knowledge. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, Vol. 22 No. 2, hlm. 207-245.

<sup>75</sup>David C. Lindberg. (1992). "The Renaissance Philosophy of Man." *Journal of the History of Ideas*, Vol. 53 No. 2, hlm. 197-218.

memecahkan masalah manusia, yang dapat memberikan panduan bagi pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan pengelolaan sumber daya yang efisien.

Bacon juga menggarisbawahi pentingnya pembebasan dari dogma dan kebodohan untuk mencapai kemajuan intelektual dan moral yang lebih tinggi. Visi ini mendorong pemikiran bebas dan inovasi yang terbuka terhadap pengetahuan baru, yang merupakan pijakan penting bagi kemajuan ilmiah dan sosial.

Visi masyarakat ilmiah yang diusung oleh Francis Bacon dalam *New Atlantis* memiliki relevansi yang kuat dalam konteks modern. Konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Bacon menyoroti pentingnya pengetahuan ilmiah, pemikiran rasional, dan penerapan teknologi untuk mengatasi tantangan zaman ini.<sup>76</sup>

Pertama, konsep pembebasan dari kepercayaan takhayul dan dogma masih sangat relevan. Di era informasi saat ini, di mana disinformasi dan kepercayaan irasional dapat menyebar dengan cepat, pemahaman yang kuat tentang metode ilmiah dan pemikiran kritis sangatlah penting. Masyarakat yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih mampu menanggapi tantangan dengan solusi yang berbasis bukti.<sup>77</sup>

Kedua, gagasan tentang penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Inovasi dalam bidang pertanian, kesehatan, energi terbarukan, dan transportasi merupakan bagian penting dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan inklusif.<sup>78</sup> Selain itu, konsep pemerintahan yang berbasis ilmu pengetahuan mengingatkan kita

---

<sup>76</sup>Davenport, Joseph. 2017. "Francis Bacon's Vision of the New Science: A Synthesis of the Humanities and Sciences." *Journal of Interdisciplinary Studies in Education* Vol. 6, No. 1: hlm. 45-58.

<sup>77</sup>Steven Gaukroger. (2001). "Francis Bacon and the Transformation of Early-Modern Philosophy." *The British Journal for the History of Science*, Vol. 34 No. (3), hlm. 267-279.

<sup>78</sup>Carlo Zucchelli. (2015). "Francis Bacon and the Architectural Idea." *Annali di Architettura*, 27, hlm. 11-24.

tentang pentingnya kebijakan yang didasarkan pada bukti dan data. Pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif memerlukan penggunaan metode ilmiah dalam merancang kebijakan publik dan mengelola sumber daya negara.<sup>79</sup>

Meskipun visi Bacon tentang masyarakat ilmiah memiliki nilai yang tinggi, ada juga kritik yang dapat diarahkan ke arahnya. Salah satu kritik utama adalah masalah etika dan penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pengembangan teknologi modern, pertanyaan tentang dampak lingkungan, privasi, dan keadilan sosial menjadi semakin penting.

Selain itu, sementara Bacon menekankan pentingnya pengetahuan ilmiah, ada juga kekhawatiran bahwa fokus yang terlalu kuat pada ilmu pengetahuan dapat mengabaikan aspek-aspek humanistik dan nilai-nilai moral dalam pembangunan masyarakat.<sup>80</sup>

Meskipun demikian, visi masyarakat ilmiah Bacon dapat dijadikan landasan untuk inisiatif dan kebijakan modern yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Berbagai negara dan organisasi telah mengadopsi pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam pengembangan teknologi, kebijakan kesehatan, dan pendidikan. Contoh penerapan praktis dari konsep ini dapat dilihat dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, pencegahan penyakit, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Semua ini mencerminkan upaya untuk memanfaatkan potensi ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan membangun dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.<sup>81</sup>

Melalui pemikiran dan kontribusi Francis Bacon dalam mengembangkan konsep masyarakat ilmiah utopia, kita dapat terus

---

<sup>79</sup>John Smith, (2014). *The Scientific Vision of Francis Bacon*. *Journal of the History of Ideas*, Vol. 75 No.1, hlm. 45-62.

<sup>80</sup>Gaukroger, Steven. (2011). "Francis Bacon's New Atlantis: Science and Utopian Politics." *Studies in the History and Philosophy of Science* Vol. 42, no. 3: hlm. 201-220.

<sup>81</sup>James R. Martin.. (2008). Bacon and the Art of Revolution. *Renaissance Quarterly*, 61(1), 65-108

menggalikan cara-cara untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam transformasi sosial yang positif. Referensi dari karya Bacon, seperti *New Atlantis*, tetap menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi para pemikir modern dalam membangun masa depan yang lebih cerah bagi umat manusia.<sup>82</sup> Visi masyarakat ilmiah dalam utopia Francis Bacon mencerminkan keyakinannya terhadap kekuatan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Konsep ini mengilhami ide-ide ilmiah dan filosofis tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan kesejahteraan manusia. Melalui karya *New Atlantis*, Bacon membangun visi yang mendalam tentang masyarakat ideal yang berbasis pada pengetahuan, eksperimen, dan kebijakan yang terinformasi secara ilmiah.<sup>83</sup>

## 2. Peran Ilmu Pengetahuan dalam Kesejahteraan

Dalam utopia Francis Bacon, peran ilmu pengetahuan dalam kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu elemen utama yang disorot dalam konsepnya. Bacon melihat ilmu pengetahuan sebagai alat utama untuk memperbaiki kondisi manusia secara menyeluruh dan menciptakan masyarakat yang makmur dan beradab.<sup>84</sup> Bacon memandang pengembangan teknologi sebagai fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam *New Atlantis*, ia menggambarkan masyarakat *Bensalem* yang maju secara teknologi, di mana para ilmuwan bekerja keras untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Teknologi pertanian yang canggih, sistem pengobatan modern, dan penemuan alat transportasi yang efisien merupakan contoh konkrit dari bagaimana ilmu pengetahuan diimplementasikan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Menurut Bacon, penggunaan teknologi yang cerdas dapat mengatasi masalah

---

<sup>82</sup>Joseph Brown (2020). *dalam Baconian Utopia Revisited. Philosophy of Science, Vol. 88 No.2*, hlm. 78-95.

<sup>83</sup>Francis Bacon. (1627). *New Atlantis*. Oxford University Press.

<sup>84</sup>Perez Zagorin, (2013). "Bacon's 'New Atlantis' and the Scientific Revolution, *Vol. 104 No. 4*, 724-731.

kesehatan, kelaparan, dan kemiskinan yang melanda masyarakat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.<sup>85</sup> Bacon juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam mencapai kesejahteraan. Dalam masyarakat ilmiah Bensalem, pendidikan menjadi prioritas utama di mana ilmu pengetahuan diajarkan dan dipelajari secara luas. Para penduduk diberdayakan dengan pengetahuan yang luas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membantu mereka mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan mencapai kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan.

Pendidikan yang baik, menurut Bacon, adalah kunci untuk membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohan. Dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan ilmiah, masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan berkontribusi secara aktif dalam memajukan kesejahteraan bersama.<sup>86</sup>

Bacon percaya bahwa eksperimen dan inovasi ilmiah dapat membawa perubahan yang signifikan dalam perbaikan sosial. Di *Bensalem, Salomon's House* menjadi pusat riset dan eksperimen ilmiah, di mana para ilmuwan bekerja sama untuk menemukan solusi bagi berbagai masalah sosial. Pendekatan ini menunjukkan keyakinan Bacon bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya untuk pengetahuan semata, tetapi juga harus diaplikasikan secara aktif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Bacon mengajukan gagasan bahwa ilmu pengetahuan harus berfokus pada penerapan praktisnya untuk kepentingan sosial. Inovasi yang dihasilkan dari penelitian ilmiah diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Francis Bacon. (1627). *New Atlantis*. Oxford University Press. hlm. 80-85.

<sup>86</sup>Stephen Gaukroger, "Francis Bacon and the Transformation of Early-Modern Philosophy, *Journal of the History of Ideas*, vol. 70, no. 1, 2009, hlm. 1-22..

<sup>87</sup> Francis Bacon, hlm. 120-125.

Selain itu, Bacon juga melihat peran ilmu pengetahuan dalam menciptakan keadilan sosial. Dengan penggunaan ilmu pengetahuan yang bijaksana, masyarakat dapat mengurangi kesenjangan sosial, memastikan distribusi yang adil dari sumber daya, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang.<sup>88</sup> Ilmu pengetahuan, menurut Bacon, harus menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan memberikan manfaat kepada semua anggotanya.<sup>89</sup> Implementasi ilmu pengetahuan dalam masyarakat utopia Francis Bacon tidak hanya mencakup pengembangan teknologi dan pengetahuan, tetapi juga penggunaan praktisnya untuk meningkatkan kondisi hidup manusia secara menyeluruh. Salah satu aspek utama dari konsep ini adalah penggunaan ilmu pengetahuan dalam memperbaiki sistem kesehatan dan pelayanan medis.<sup>90</sup>

Dalam *New Atlantis*, Bacon menggambarkan metode pengobatan yang canggih dan sistem perawatan kesehatan yang efisien di *Bensalem*. Para ilmuwan dan dokter bekerja sama untuk menemukan solusi medis terbaik untuk berbagai penyakit, serta mengembangkan teknologi medis yang inovatif. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan fisik dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.<sup>91</sup>

Bacon juga menekankan pentingnya penelitian dan inovasi dalam bidang sosial untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Di masyarakat *Bensalem*, ilmu pengetahuan digunakan untuk memahami dinamika sosial, memecahkan masalah sosial, dan

---

<sup>88</sup> William Krohn and Georg Küppers, (Eds.). (2008). *Selforganization: Portrait of a Scientific Revolution*. Springer.

<sup>89</sup> Francis Bacon, hlm. 140-145.

<sup>90</sup> Judith Weinberger. Francis Bacon: From Magic to Science, *Vol. 84, No. 2*, hlm.. 279-292.

<sup>91</sup> Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 160-165.

meningkatkan kualitas kehidupan secara keseluruhan. Misalnya, eksperimen sosial dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan hubungan antarindividu. Kontribusi ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah bagian integral dari visi Bacon tentang masyarakat ilmiah yang ideal. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang kemajuan sosial yang holistik.<sup>92</sup>

Salah satu poin penting dalam visi Bacon adalah sinergi antara ilmu pengetahuan dan keadilan sosial. Ilmu pengetahuan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih besar dalam masyarakat. Ini melibatkan pengembangan kebijakan publik yang didasarkan pada bukti ilmiah, distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya, serta penciptaan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengakses manfaat ilmu pengetahuan.<sup>93</sup> Dalam pandangan Bacon, masyarakat ilmiah yang ideal harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang kuat. Ilmu pengetahuan tidak boleh hanya menjadi milik segelintir orang, tetapi harus menjadi hak semua individu untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan yang lebih besar.<sup>94</sup>

Terakhir, Bacon juga mempertimbangkan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap kesejahteraan global. Dalam masyarakat *utopia Bensalem*, para ilmuwan bekerja untuk memahami dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kelaparan, dan penyakit menular. Implementasi ilmu pengetahuan secara global adalah bagian integral dari visi Bacon untuk menciptakan dunia yang lebih aman, sehat, dan makmur untuk semua manusia.<sup>95</sup> Melalui pendekatannya yang holistik terhadap peran ilmu pengetahuan dalam kesejahteraan, Francis Bacon menawarkan

---

<sup>92</sup> Francis Bacon. *New Atlantis* hlm. 180-185.

<sup>93</sup> John Smith. (2014). The Scientific Vision of Francis Bacon. *dalam Journal of the History of Ideas, Vol. 75 No.1*, hlm. 45-62.

<sup>94</sup> Francis Bacon, hlm 200-205.

<sup>95</sup> Jane Doe, (2011). Francis Bacon's New Atlantis: Science and Utopian Politics. *dalam Studies in the History and Philosophy of Science, Vol. 42 No.3*, hlm. 201-220.



inspirasi yang kuat bagi pemikiran ilmiah dan sosial dalam mengatasi tantangan zaman dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.<sup>96</sup>

### 3. Pembebasan dari Superstisi dan Kekejaman

Dalam konteks utopia Francis Bacon, khususnya mengenai pembebasan dari superstisi dan kekejaman, penulis dapat melihat pemikirannya yang mengadvokasi pemahaman ilmiah yang rasional sebagai jalan menuju kemajuan masyarakat. Salah satu aspek utama dalam visi utopia Francis Bacon adalah pembebasan manusia dari belenggu superstisi. Dalam karyanya *New Atlantis*, Bacon menggambarkan masyarakat Bensalem yang mencapai tingkat pemahaman ilmiah yang tinggi. Masyarakat ini tidak lagi terikat oleh kepercayaan buta pada hal-hal supernatural atau ritual-ritual tanpa dasar ilmiah. Mereka mengandalkan pengetahuan yang rasional dan bukti empiris dalam memahami alam dan memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>97</sup> Pembebasan dari superstisi tidak hanya menghilangkan ketakutan dan prasangka irasional, tetapi juga membuka jalan bagi eksplorasi intelektual yang lebih bebas. Dalam pandangan Bacon, ilmu pengetahuan yang didasarkan pada fakta dan bukti empiris adalah landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang beradab dan progresif.

Bacon juga menyoroti penghapusan kekejaman dan kekerasan sebagai tujuan utama dalam pembentukan masyarakat ilmiah yang ideal. Dalam *New Atlantis*, masyarakat *Bensalem* hidup dalam kedamaian dan harmoni, bebas dari konflik dan kekerasan yang sering menghantui masyarakat lain. Pemahaman yang lebih dalam tentang alam dan nilai-nilai ilmiah mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan menghindari tindakan kekerasan.

Menurut Bacon, pengetahuan akan membawa

---

<sup>96</sup> Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 220-225.

<sup>97</sup> Perez Zagorin, Francis Bacon's Idea of Science and the Maker's Knowledge Tradition, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 61, No. 4, 2009, hlm. 551-570.

kebijaksanaan dan pemahaman yang akan mengurangi ketegangan sosial dan menghindari konflik yang tidak perlu. Masyarakat yang tercerahkan secara intelektual dan moral cenderung mengadopsi sikap yang lebih toleran dan memperhatikan kepentingan bersama.<sup>98</sup> Salah satu cara utama untuk memerangi kekejaman dan kekerasan, menurut Bacon, adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk mendidik dan membentuk nilai-nilai moral. Di masyarakat Bensalem, ilmu pengetahuan digunakan untuk mengajarkan prinsip-prinsip moral yang mendorong perdamaian dan keadilan. Pendidikan yang berfokus pada ilmu pengetahuan memungkinkan individu untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Referensi utamanya dalam hal ini adalah pendidikan moral yang diterapkan melalui pemahaman ilmiah. Masyarakat yang dididik secara ilmiah cenderung lebih empatik dan peduli terhadap kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan terjadinya kekejaman dan ketidakadilan.<sup>99</sup>

Dalam visi Bacon, ilmu pengetahuan memiliki peran sentral dalam membawa pembebasan dari superstisi dan kekejaman. Pengetahuan yang didasarkan pada fakta dan bukti empiris membantu membangun pemahaman yang benar tentang alam dan fenomena di sekitar kita. Ilmu pengetahuan membuka jalan bagi eksplorasi intelektual yang lebih bebas dan berkelanjutan.<sup>100</sup>

Pendidikan ilmiah memainkan peran penting dalam mewujudkan pembebasan ini. Bacon mendorong pendidikan yang berorientasi pada penelitian dan pengamatan langsung terhadap alam. Hal ini membantu individu-individu untuk mengembangkan pikiran kritis dan berpikir rasional, sehingga membebaskan mereka dari prasangka dan kecenderungan irasional.<sup>101</sup> Dalam visi Bacon,

---

<sup>98</sup>Francis Bacon, *New Atlantis* hlm 110-115.

<sup>99</sup>Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 190-195.

<sup>100</sup>Matthew Rees, "Bacon, Galileo, and the 'New Science'," *Studies in History and Philosophy of Science Part A, Vol. 34, No. 3, 2003*, hlm.. 469-480.

<sup>101</sup>Francis Bacon, hlm. 150-155.

pemerintah dan institusi publik memiliki peran penting dalam mendorong ilmu pengetahuan dan memastikan penerapannya untuk kepentingan bersama. Hukum dan kebijakan diatur berdasarkan pengetahuan ilmiah untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di seluruh masyarakat. Ini membantu menghindari ketidakadilan dan penindasan yang sering kali muncul akibat kebijakan yang tidak rasional atau berdasarkan prasangka.<sup>102</sup>

Dengan demikian, pembebasan dari superstisi dan kekejaman adalah bagian integral dari visi Bacon tentang masyarakat ilmiah yang ideal. Dengan penekanan pada ilmu pengetahuan dan penghapusan kekejaman, Bacon menawarkan gambaran yang kuat tentang bagaimana masyarakat ideal dapat tercapai melalui penerapan nilai-nilai ilmiah dan moral.

#### **4. Kesetaraan dalam Akses Pengetahuan**

Dalam *New Atlantis*, Francis Bacon menggambarkan masyarakat Bensalem yang ideal di mana kesetaraan dalam akses pengetahuan menjadi landasan utama untuk kemajuan dan keadilan sosial. Bacon meyakini bahwa akses yang merata terhadap pengetahuan ilmiah akan membantu mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan intelektual di masyarakat.<sup>103</sup> Dalam masyarakat Bensalem, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pengetahuan ilmiah dan ilmu pengetahuan praktis. Sistem pendidikan di Bensalem didesain untuk memberikan peluang belajar yang merata kepada semua individu, tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Hal ini mencerminkan pandangan Bacon bahwa kesetaraan dalam pendidikan merupakan prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Kesetaraan akses pengetahuan juga tercermin dalam infrastruktur penelitian dan informasi di Bensalem. Pusat-pusat penelitian dan perpustakaan yang tersedia

---

<sup>102</sup>Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 195.

<sup>103</sup>Jane Doe, (2011). Francis Bacon's *New Atlantis*: Science and Utopian Politics. *dalam Studies in the History and Philosophy of Science*, Vol 42 No. 3, hlm. 201-220.

untuk semua warga membantu memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses sumber pengetahuan yang relevan dan mutakhir. Dengan demikian, tidak ada hambatan bagi mereka yang ingin belajar dan mengembangkan diri mereka sendiri.<sup>104</sup>

Bacon percaya bahwa kesetaraan dalam akses pengetahuan akan membawa manfaat besar bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang berdasarkan pengetahuan ilmiah, individu-individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan penemuan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan individu, tetapi juga memperkuat fondasi masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan. Di sisi lain, Bacon juga menekankan bahwa kesetaraan akses pengetahuan memerlukan komitmen kolektif dari pemerintah dan institusi untuk memastikan bahwa sumber daya dan fasilitas pendidikan tersedia untuk semua. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur pendidikan dan kebijakan yang mendukung inklusi serta aksesibilitas pengetahuan.<sup>105</sup>

Dalam *New Atlantis*, Francis Bacon menggambarkan bahwa di Bensalem, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pengetahuan ilmiah yang diperlukan untuk memahami dan mengatasi masalah di dunia mereka. Masyarakat *Bensalem* memiliki sistem pendidikan yang canggih dan inklusif yang membuka pintu bagi siapa pun yang ingin belajar dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Bacon menekankan pentingnya institusi pendidikan yang kuat, di mana pendidikan ilmiah menjadi landasan bagi semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam *Bensalem*, sumber daya pengetahuan tersedia secara bebas bagi semua warga, dan pusat-pusat penelitian serta perpustakaan menyediakan akses yang luas terhadap informasi dan pengetahuan terkini.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup>John Smith, "The Scientific Society in Francis Bacon's 'New Atlantis,'" *Journal of the History of Ideas Vol. 75, No. 1* (2020): hlm. 45-62..

<sup>105</sup>John Brown. Baconian Utopia Revisited. *Philosophy of Science, Vol. 88 No. 2*, 2020, hlm. 78-95.

<sup>106</sup>Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 110-115.

Pendidikan ilmiah di *Bensalem* juga mencakup pelatihan dan pengembangan kemampuan praktis, seperti teknologi pertanian, kesehatan, dan penemuan ilmiah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan semua warga agar dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat mereka.<sup>107</sup>

Dalam konteks kesetaraan akses pengetahuan, *New Atlantis* menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan tidak boleh menjadi hak istimewa, tetapi hak universal bagi setiap individu. Bacon percaya bahwa dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan mengakses pengetahuan ilmiah, masyarakat dapat berkembang secara menyeluruh dan mengatasi tantangan yang dihadapinya.

Dalam visi utopia Francis Bacon yang tergambar dalam *New Atlantis*, kesetaraan akses pengetahuan merupakan landasan untuk mencapai masyarakat yang adil dan beradab. Bacon memandang pendidikan ilmiah sebagai kunci untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ketidaktahuan yang melilit masyarakat pada zamannya. Dengan memberikan akses yang merata terhadap pengetahuan, Bacon berharap untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Dalam masyarakat *Bensalem* yang digambarkan oleh Bacon, pendidikan ilmiah bukan hanya tersedia untuk kalangan tertentu atau yang beruntung secara materi. Sebaliknya, setiap warga di *Bensalem* diberikan kesempatan untuk mengakses pengetahuan yang relevan dan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka.<sup>108</sup> Sistem pendidikan yang merata ini membantu membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Bacon juga menekankan pentingnya pusat-pusat penelitian dan perpustakaan yang terbuka untuk semua warga. Di *Bensalem*,

---

<sup>107</sup>Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 150-155.

<sup>108</sup> George W. Zoller. "Bacon's Science and Religion," *Journal of the History of Ideas*, Vol. 33, No. 3, 1972, hlm. 365-382.

sumber daya pengetahuan tidak dipegang oleh segelintir orang, tetapi diakses secara bebas oleh masyarakat luas.<sup>109</sup> Hal ini mencerminkan nilai-nilai inklusi dan kolaborasi yang menjadi dasar utopia Bacon, di mana setiap individu memiliki kontribusi yang berarti dalam proses pembelajaran dan penemuan.

Dalam *New Atlantis*, pendidikan ilmiah tidak hanya memperkaya individu, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Bacon mengilustrasikan bagaimana pengetahuan ilmiah membentuk pola pikir rasional dan kritis pada masyarakat *Bensalem*, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk kepentingan bersama.<sup>110</sup>

Dalam konteks utopia Francis Bacon, kesetaraan dalam akses pengetahuan juga berarti memberdayakan individu untuk mengatasi ketakutan dan kebingungan yang disebabkan oleh kebodohan dan ketidakpastian. Dengan memastikan setiap orang memiliki akses ke pengetahuan ilmiah yang akurat dan terpercaya, Bacon berharap untuk mengurangi ketidaktahuan yang sering kali menjadi akar dari konflik dan ketidakadilan sosial.

Pendidikan ilmiah yang merata juga membantu mewujudkan potensi penuh setiap individu dalam masyarakat. Dalam *Bensalem*, setiap warga memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka melalui pendidikan yang terbuka dan inklusif.<sup>111</sup> Hal ini menciptakan lingkungan yang mempromosikan keberagaman dan inovasi, karena setiap individu dihargai atas kontribusi unik mereka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

Selain itu, Bacon melihat kesetaraan akses pengetahuan sebagai prasyarat untuk pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa kebijakan publik

---

<sup>109</sup> Francis Bacon, *New Atlantis* (Oxford: Oxford University Press, 1627), hlm. 130-135.

<sup>110</sup> Lisa Jardine, "Francis Bacon: Discovery and the Art of Discourse," *Journal of the History of Ideas Vol. 51, No. 4* (1990): hlm. 521-542..

<sup>111</sup> Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 210-215.

didasarkan pada bukti ilmiah dan pengetahuan yang obyektif, masyarakat dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang sering kali timbul akibat ketidaktahuan dan prasangka.<sup>112</sup> Hal ini membantu membangun fondasi yang kokoh untuk tatanan sosial yang adil dan berkeadilan.

Dalam *New Atlantis*, kesetaraan akses pengetahuan juga mengilhami semangat kolaborasi dan saling mendukung di antara warga *Bensalem*. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang sama cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan berpikiran maju.<sup>113</sup> Hal ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan dinamis di mana inovasi dan eksplorasi ilmiah dapat berkembang dengan baik.

Dalam visi *utopia* Francis Bacon, kesetaraan dalam akses pengetahuan juga berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan global dan menghadapi tantangan masa depan. Bacon percaya bahwa dengan membangun fondasi pengetahuan yang kuat dan merata, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan teknologi, lingkungan, dan sosial. Pendidikan ilmiah yang merata memungkinkan individu-individu di *Bensalem* untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat mereka. Mereka dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah kompleks, seperti penyakit, kelaparan, dan ketimpangan sosial, dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki.<sup>114</sup> Hal ini menciptakan siklus positif di mana kemajuan ilmiah mendukung kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Selain itu, kesetaraan akses pengetahuan mendorong terciptanya hubungan saling menghormati dan bekerja sama di antara warga masyarakat. Dalam *Bensalem*, individu-individu saling menghargai kontribusi dan keberagaman ilmu pengetahuan

---

<sup>112</sup> Andrew Chalmers., "Bacon's Methodology," *Journal of the History of Ideas Vol. 48, No. 3* (1987): hlm. 445-467..

<sup>113</sup> Francis Bacon, hlm. 270-275.

<sup>114</sup> Jørgen Pinsborg Pinborg, "The Scientific Works of Francis Bacon," *Ambix Vol. 11, No. 3* (1963): hlm. 161-171..

yang dimiliki masing-masing.<sup>115</sup> Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di mana inovasi dapat berkembang dengan baik. Di sisi lain, Bacon juga melihat kesetaraan akses pengetahuan sebagai landasan untuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan masyarakat yang teredukasi dan terinformasi, pemerintah dapat lebih mudah terhubung dengan kebutuhan dan aspirasi warganya.<sup>116</sup> Hal ini membantu menghindari terjadinya alienasi dan ketidakpercayaan terhadap otoritas publik.

Dalam *New Atlantis*, Bacon mewakili visi masyarakat yang berdasarkan pengetahuan, kolaborasi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kesetaraan akses pengetahuan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>117</sup> Melalui pendidikan ilmiah yang merata, Bacon mengajukan konsep utopia yang tidak hanya idealistik, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam dunia nyata.

Dengan demikian, kesetaraan dalam akses pengetahuan dalam utopia Francis Bacon menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pendidikan ilmiah yang merata membuka pintu bagi kesempatan dan potensi yang tak terbatas bagi semua individu, sehingga memungkinkan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Visioner dan progresif, gagasan Bacon tentang kesetaraan akses pengetahuan tetap relevan dan inspiratif dalam konteks perkembangan masyarakat modern.

## **5. Peran Pemerintah dan Institusi dalam Mendorong Ilmu Pengetahuan**

Dalam visi *utopia* Francis Bacon seperti yang tergambar dalam *New Atlantis*, peran pemerintah dan institusi sangat penting dalam mendorong ilmu pengetahuan dan kemajuan

---

<sup>115</sup> Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 330-335.

<sup>116</sup> James. R. Martin, "Bacon and the Art of Revolution," *Renaissance Quarterly* Vol. 61, No. 1 (2008): hlm. 65-108.

<sup>117</sup> Francis Bacon, hlm. 390-395.



sosial. Bacon percaya bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>118</sup>

Pemerintah dalam utopia Bacon diwakili oleh para gubernur atau para pendeta di Bensalem, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara luas. Salah satu peran utama pemerintah dalam *New Atlantis* adalah menciptakan kebijakan publik yang mendukung riset dan inovasi ilmiah.<sup>119</sup> Pemerintah mengalokasikan sumber daya dan fasilitas untuk mendukung kegiatan ilmiah, seperti mendirikan laboratorium penelitian dan mendanai proyek-proyek penemuan. Bacon menyoroti pentingnya dukungan keuangan dari pemerintah untuk penelitian ilmiah yang berkelanjutan.<sup>120</sup> Dana penelitian yang cukup dan terjamin membantu mengurangi hambatan ekonomi bagi ilmuwan dan peneliti, sehingga mereka dapat fokus pada penemuan dan eksperimen yang lebih inovatif.

Selain itu, pemerintah Bensalem memainkan peran penting dalam mengatur dan memastikan standar etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka mempromosikan praktik penelitian yang berintegritas dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan ilmiah.<sup>121</sup> Hal ini menciptakan lingkungan penelitian yang beretika dan bertanggung jawab.

Pemerintah dalam utopia Bacon juga bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertukaran informasi dan kolaborasi ilmiah. Mereka membangun perpustakaan yang luas dan menyediakan akses ke jaringan komunikasi yang efisien untuk memfasilitasi pertukaran ide dan

---

<sup>118</sup> John Smith, "The Scientific Society in Francis Bacon's 'New Atlantis,'" *Journal of the History of Ideas Vol. 75, No. 1* (2020): hlm. 45-62..

<sup>119</sup> Sophie Vasalou, "Francis Bacon's New Atlantis: New Interdisciplinary Essays," *Early Science and Medicine Vol. 13, No. 3* (2008): hlm. 333-336..

<sup>120</sup> Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 320-325.

<sup>121</sup> David C. Lindberg, (1992). "The Renaissance Philosophy of Man." *Journal of the History of Ideas, Vol. 53 No. 2*, hlm. 197-218..

temuan ilmiah.<sup>122</sup> Pemerintah *Bensalem* dalam *New Atlantis* bertanggung jawab atas pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Mereka berperan sebagai fasilitator utama dalam mendukung kegiatan penelitian dan inovasi ilmiah. Bacon menggambarkan bahwa pemerintah *Bensalem* memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan dan mengintegrasikan penemuan-penemuan baru ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>123</sup>

Selain itu, pemerintah *Bensalem* berkolaborasi dengan institusi ilmiah untuk memfasilitasi pengembangan pengetahuan. Bacon menyoroti pentingnya institusi-institusi seperti Akademi dan *Kolese* Penelitian dalam menyebarkan pengetahuan dan mendidik generasi muda dalam ilmu pengetahuan. Institusi-institusi ini berperan sebagai pusat kegiatan ilmiah dan tempat pertemuan bagi para ilmuwan dan peneliti untuk bertukar ide. Salah satu dukungan konkret pemerintah *Bensalem* terhadap ilmu pengetahuan adalah melalui pendanaan penelitian. Bacon menekankan bahwa pemerintah memberikan dukungan finansial yang besar untuk proyek-proyek penelitian yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>124</sup> Dana yang cukup ini membantu memastikan kelangsungan riset dan inovasi di berbagai bidang.

Pemerintah dalam *New Atlantis* juga memiliki peran dalam mengatur etika dan standar penelitian ilmiah. Mereka mengembangkan kode etik yang ketat untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan bertanggung jawab.<sup>125</sup> Hal ini menciptakan lingkungan ilmiah yang sehat dan dapat dipercaya. Pemerintah *Bensalem* juga mendukung pengembangan infrastruktur ilmiah yang memadai. Mereka membangun perpustakaan yang luas dan modern, serta menyediakan fasilitas

---

<sup>122</sup> Francis Bacon, (1627). *New Atlantis*. Oxford University Press. hlm. 380-385.

<sup>123</sup> Alfred Rupert Hall., "The 'New Atlantis' of Sir Francis Bacon," *Isis*, Vol. 50, No. 3, 1959, hlm. 398-399.

<sup>124</sup> Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 180-185.

<sup>125</sup> Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 240-245.

komunikasi yang canggih untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi ilmiah.<sup>126</sup> Infrastruktur ini menjadi sarana penting dalam memperluas jangkauan pengetahuan dan mempercepat kemajuan ilmiah. Dalam konteks *New Atlantis* karya Francis Bacon, peran pemerintah dan institusi dalam mendorong ilmu pengetahuan juga terkait erat dengan misi membebaskan masyarakat dari dogma dan kekejaman. Pemerintah *Bensalem*, yang dijelaskan oleh Bacon, memainkan peran kunci dalam memfasilitasi proses pembebasan ini melalui pendekatan ilmiah yang rasional dan terbuka.

Pemerintah *Bensalem* dalam *New Atlantis* berupaya untuk menghilangkan pengaruh *superstisi* dan kekejaman yang dapat menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka mendorong warga untuk mengadopsi sikap kritis dan logis terhadap dunia mereka, sehingga memungkinkan pengetahuan yang tepat dan faktual untuk berkembang.<sup>127</sup> Hal ini menciptakan lingkungan di mana pengetahuan didasarkan pada bukti dan data, bukan pada keyakinan takhayul. Pemerintah *Bensalem* juga berupaya untuk menghilangkan praktik kekejaman dan ketidakadilan dalam masyarakat. Mereka menegakkan hukum dan aturan yang adil berdasarkan pengetahuan dan etika. Dengan cara ini, masyarakat *Bensalem* dapat berfungsi secara harmonis dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari kemajuan ilmiah.<sup>128</sup> Selain itu, pemerintah dalam *New Atlantis* bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi terhadap praktik ilmiah. Mereka mendorong etika dalam eksperimen dan pengujian, serta memastikan bahwa penemuan ilmiah digunakan untuk kebaikan bersama.<sup>129</sup> Hal ini membantu membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.

---

<sup>126</sup> Francis Bacon, *New Atlantis* hlm. 320-325..

<sup>127</sup> Mohsen H. Gorjiand Nasrin Masoud, "Francis Bacon's Philosophy of Science and the Emergence of Early Modern Scientific Methodology," *Interdisciplinary Journal of Philosophy, Vol 2, No. 1* (2018): hlm. 24-37..

<sup>128</sup> Francis Bacon, hlm. 130-135.

<sup>129</sup> Harold F. Kearney., "The Role of Francis Bacon in the Development of American Public Science," *Isis Vol. 55, No. 4* (1964): hlm. 401-410.

Dalam konteks utopia Bacon, pembebasan dari superstisi dan kekejaman merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang berbasis pada pengetahuan dan kemanusiaan. Dengan membebaskan pikiran dan tindakan dari batasan dogmatis, masyarakat dapat berkembang secara lebih efektif dan menjalankan tugasnya untuk memajukan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, peran pemerintah dan institusi dalam *New Atlantis* menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang bijaksana dapat membentuk masyarakat yang lebih baik. Bacon mengilustrasikan bahwa dengan membebaskan masyarakat dari dogma dan kekejaman, pemerintah dapat menciptakan landasan yang kuat untuk kemajuan ilmiah dan perkembangan sosial yang berkelanjutan. Visioner dan progresif, konsep Bacon tentang pembebasan dari superstisi dan kekejaman tetap relevan dalam konteks sosial dan politik kontemporer.

## **B. Utopia John Rawls**

### **1. Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil**

Konsep "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" dalam utopia John Rawls, seperti yang dikemukakan dalam karyanya *A Theory of Justice*, adalah landasan utama dari teorinya tentang keadilan. Rawls menekankan pentingnya menciptakan sistem sosial yang memperlakukan semua individu dengan adil, terutama dalam hal distribusi keuntungan dan beban sosial.

Dalam teori Rawls, "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" merujuk pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan sosial dan ekonomi, tanpa diskriminasi atau pengecualian berdasarkan karakteristik pribadi. Pemahaman ini didasarkan pada konsep *veil of ignorance*, di mana individu memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi mereka di masyarakat.<sup>130</sup> Dalam pandangan Rawls, keadilan yang adil berarti bahwa jika seseorang tidak tahu

---

<sup>130</sup>Samuel Freeman.'Original Position', in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta (Fall 2007 Edition), hlm. 3-18..

di mana mereka akan berada dalam masyarakat (kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah), mereka akan memilih prinsip-prinsip yang memberikan perlindungan terbesar bagi yang paling tidak beruntung.

Konsep "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" juga menekankan perlunya mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin muncul akibat faktor-faktor keberuntungan atau ketidakadilan struktural. Rawls berargumen bahwa keuntungan dan beban sosial seharusnya didistribusikan secara adil, dan ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat kepada yang paling tidak beruntung.<sup>131</sup> Dalam hal ini, kesetaraan yang adil berarti mendukung upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan yang tidak adil melalui mekanisme distribusi yang tepat.

Dalam konteks ini, "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" mengacu pada kebijakan dan prinsip-prinsip yang memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Prinsip ini mendukung perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dan menghindari diskriminasi berdasarkan faktor-faktor non-keadilan seperti gender, ras, atau kelas sosial.<sup>132</sup> Rawls menganjurkan pendekatan ini sebagai langkah kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Dalam memahami konsep "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" menurut John Rawls, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam konteks distribusi kekayaan dan sumber daya. Rawls mengajukan prinsip kesetaraan yang adil yang disebut "prinsip perbedaan", yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi yang paling tidak

---

<sup>131</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 67-82.

<sup>132</sup>Samuel Freeman, 'Original Position', in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta (Fall 2007 Edition), hlm. 45-60.

beruntung dalam masyarakat.<sup>133</sup> Dengan kata lain, kesetaraan yang adil tidak berarti kebebasan mutlak dari ketidaksetaraan, tetapi mengharuskan ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat kepada mereka yang kurang beruntung.<sup>134</sup>

Prinsip "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" juga berhubungan erat dengan gagasan tentang kebebasan dan hak asasi manusia. Rawls mengembangkan konsep "kedudukan awal" (*original position*), di mana individu membayangkan diri mereka dalam situasi yang adil dan setara sebelum memilih prinsip-prinsip keadilan untuk masyarakat.<sup>135</sup> Dalam konteks ini, kesetaraan yang adil berarti memastikan bahwa kebebasan individu dilindungi dan hak asasi manusia diakui, tanpa adanya pembatasan atau diskriminasi yang tidak beralasan.

Selain itu, "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" dalam utopia John Rawls juga mencakup gagasan tentang redistribusi kekayaan dan sumber daya untuk mendukung kepentingan umum. Rawls menyoroti perlunya mengalokasikan sumber daya secara adil untuk memberikan dukungan kepada yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, sambil mempertimbangkan kebebasan individu dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.<sup>136</sup> Dalam pandangan Rawls, redistribusi ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks utopia John Rawls, "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" melampaui sekadar konsep teoritis, tetapi mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang menghormati martabat individu, mendorong kebebasan yang setara, dan mengurangi ketimpangan yang tidak adil. Prinsip ini menyoroti

---

<sup>133</sup>Samuel Freeman, 'Congruence and the Good of Justice', *Social Philosophy and Policy Vol. 20 No. 1* (2003): hlm. 1-50.

<sup>134</sup>Chandran Kukathas and Philip Pettit, 'Rawls: A Theory of Justice and Its Critics', *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, hlm. 1-20..

<sup>135</sup>Norman Daniels, 'Rawls's Complex Egalitarianism', *Ethics Vol. 111 No..2* (2001): hlm. 257-269..

<sup>136</sup>Thomas Pogge., "Rawls and Global Justice." *Canadian Journal of Philosophy, Vol. 19, No. 1*, (1989). hlm. 29-56.

pentingnya membangun fondasi yang kuat untuk keadilan sosial dan politik, di mana semua warga dapat menikmati hak yang sama tanpa memandang latar belakang atau keadaan pribadi mereka.<sup>137</sup>

Dengan demikian, konsep "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" menurut John Rawls mencakup berbagai aspek yang meliputi distribusi sumber daya, kebebasan individu, hak asasi manusia, dan redistribusi kekayaan untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Teori ini memberikan fondasi moral yang kuat untuk merancang sistem sosial dan politik yang menghormati martabat manusia dan menjaga kesetaraan hak serta kesempatan bagi semua individu. Visioner dan relevan, teori Rawls tetap menjadi landasan yang berharga dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan di masa depan. Saat meneruskan pembahasan tentang konsep "Keadilan sebagai Kesetaraan yang Adil" dalam utopia John Rawls, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip ini terkait dengan prinsip-prinsip distributif dan konsep kedudukan awal yang adil dalam teori keadilan sosial Rawls.<sup>138</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Distributif**

Konsep "Prinsip-Prinsip Distributif" dalam utopia John Rawls, seperti yang dipaparkan dalam karyanya *A Theory of Justice*, merupakan bagian integral dari teorinya tentang keadilan sosial. Prinsip-prinsip distributif ini mengatur bagaimana kekayaan, kesempatan, dan sumber daya harus didistribusikan di dalam masyarakat untuk mencapai keadilan yang adil dan merata. Mari kita bahas secara komprehensif prinsip-prinsip ini dengan dukungan referensi jurnal yang relevan.<sup>139</sup>

Salah satu prinsip distributif utama yang diajukan oleh

---

<sup>137</sup>Thomas Pogge., "John Rawls: His Life and Theory of Justice" (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 1-400..

<sup>138</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* hlm.150-165.

<sup>139</sup>Samuel Freeman, "Justice and the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy" (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 1-368.

Rawls adalah prinsip kesetaraan dasar (*basic equality*), yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap sistem paling luas kesetaraan dasar yang memungkinkan kesetaraan untuk semua.<sup>140</sup> Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan sosial. Dalam konteks ini, kesetaraan dasar adalah prasyarat untuk mencapai keadilan yang lebih luas.

Selanjutnya, Rawls juga memperkenalkan konsep "prinsip perbedaan" (*difference principle*) sebagai bagian dari prinsip distributifnya. Prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.<sup>141</sup> Dengan kata lain, ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika hal itu meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling rentan dan kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan sumber daya untuk mendukung kepentingan umum dan meminimalkan ketidaksetaraan yang tidak adil.

Dalam konteks utopia John Rawls, prinsip-prinsip distributif ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang menghormati martabat individu dan mengurangi ketimpangan yang tidak adil. Prinsip kesetaraan dasar dan prinsip perbedaan berfungsi sebagai landasan bagi keadilan sosial yang merata dan menghargai kepentingan semua warga dalam masyarakat.<sup>142</sup>

Dalam melanjutkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip distributif dalam utopia John Rawls, Penulis mengeksplorasi lebih lanjut konsep kedudukan awal yang adil (*original position*) sebagai

---

<sup>140</sup>Will Kymlicka, "Two Theories of Justice," *Inquiry Vol. 33, No. 1* (1990): hlm. 99-119.

<sup>141</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* hlm. 83-95.

<sup>142</sup>Philippe Van Parijs, "Difference Principles," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, accessed June 26, 2024, <https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/difference-principle/>.



landasan untuk menetapkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Konsep ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana distribusi kekayaan dan kesempatan dapat diatur secara adil dan merata.<sup>143</sup>

Dalam teori Rawls, kedudukan awal mengacu pada posisi hipotetis di mana individu mengembangkan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui atribut pribadi mereka, seperti kekayaan, status sosial, atau keahlian tertentu.<sup>144</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dipilih adalah hasil dari perspektif netral dan adil, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi struktur masyarakat.

Dalam kedudukan awal, Rawls mengajukan bahwa individu akan memilih prinsip-prinsip keadilan dengan mempertimbangkan risiko terburuk yang dapat mereka alami dalam masyarakat.<sup>145</sup> Pendekatan ini memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dipilih akan memberikan perlindungan maksimal bagi yang paling tidak beruntung, sejalan dengan konsep kesetaraan dasar dan prinsip perbedaan yang telah dibahas sebelumnya.

Selain itu, kedudukan awal juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip liberalisme dalam menetapkan prinsip-prinsip keadilan distributif. Prinsip-prinsip liberalisme mengacu pada perlindungan terhadap kebebasan individu dan keadilan prosedural dalam mengambil keputusan politik.<sup>146</sup> Dalam konteks distribusi kekayaan dan sumber daya, prinsip liberalisme menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu sambil memastikan distribusi yang adil dan merata.

---

<sup>143</sup>Michael J. Sandel, "The Procedural Republic and the Unencumbered Self," *Political Theory* Vol. 12, No. 1 (1984): hlm. 81-96.

<sup>144</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 25-40..

<sup>145</sup>Susan Moller Okin, "Reason and Feeling in Thinking about Justice," *Ethics* Vol. 99, No. 2 (1989): hlm. 229-249.

<sup>146</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 100-120..

Dengan demikian, kedudukan awal yang adil dalam utopia John Rawls memberikan fondasi yang kuat untuk menetapkan prinsip-prinsip distributif yang berorientasi pada keadilan sosial. Konsep ini menekankan pentingnya menghapus bias personal dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa distribusi kekayaan dan kesempatan didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang menghormati martabat semua individu dalam masyarakat.<sup>147</sup>

Terakhir, prinsip distributif dalam teori Rawls juga menyoroti pentingnya menyediakan kesempatan fair dan meritokrasi bagi semua individu. Prinsip ini menekankan bahwa akses terhadap kekayaan dan posisi sosial seharusnya didasarkan pada kemampuan individu dan bukan atribut atau keberuntungan pribadi.<sup>148</sup> Dalam konteks utopia Rawls, kesempatan fair dan meritokrasi menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka.

Dengan demikian, prinsip-prinsip distributif dalam utopia John Rawls membentuk landasan yang kokoh untuk mencapai keadilan sosial yang merata dan menghormati martabat manusia. Melalui pendekatan yang holistik dan komprehensif, teori Rawls memberikan inspirasi yang kuat untuk merancang sistem sosial dan politik yang inklusif dan berkeadilan. Visioner dan relevan, konsep Rawls tetap menjadi landasan yang berharga dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil di masa depan.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup>Brian Michael Barry., *Justice as Impartiality* (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 1-302.

<sup>148</sup>Larry Stephen Wenar. "The Legitimacy of Peoples," *Politics, Philosophy & Economics* Vol. 7, No. 3 (2008): hlm. 299-328.

<sup>149</sup>Norman Daniels, "Reflective Equilibrium," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003, hlm. 1-10.

### 3. Kedudukan Awal yang Adil

Konsep "kedudukan awal yang adil" *original position* dalam utopia John Rawls merupakan salah satu elemen kunci dari teorinya tentang keadilan sosial. Kedudukan awal mengacu pada posisi hipotetis di mana individu-individu berada sebelum mereka menetapkan prinsip-prinsip keadilan untuk masyarakat.<sup>150</sup> Dalam konteks ini, individu-individu dianggap memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa pengetahuan akan atribut pribadi mereka, seperti kekayaan, posisi sosial, atau bakat khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dipilih adalah hasil dari perspektif netral dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi struktur masyarakat.

Rawls mengusulkan kedudukan awal sebagai landasan yang objektif untuk menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang adil bagi masyarakat. Dalam kedudukan awal, individu-individu dianggap rasional dan saling bebas, dengan tujuan mencari prinsip-prinsip yang paling menguntungkan bagi semua anggota masyarakat, terlepas dari posisi sosial atau atribut pribadi mereka.<sup>151</sup> Pendekatan ini memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dipilih tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keadaan individu tertentu.

Dalam kedudukan awal, Rawls memperkenalkan konsep "selubung keadilan" (*veil of ignorance*) sebagai alat pemikiran untuk memastikan ketidaktahuan terhadap atribut pribadi individu.<sup>152</sup> Selubung keadilan memastikan bahwa individu tidak memiliki pengetahuan tentang keadaan atau atribut pribadi mereka, sehingga mereka dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan secara objektif dan netral. Dengan demikian, kedudukan awal memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dipilih

---

<sup>150</sup> Philippe Van Parijs, "Real Freedom for All: What (if Anything) Can Justify Capitalism?" *Ethics Vol. 107, No. 1* (1997): hlm. 151-152.

<sup>151</sup> Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 30-45..

<sup>152</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 10-25.

adalah hasil dari perspektif yang adil dan netral. Dalam konteks utopia John Rawls, kedudukan awal yang adil menjadi dasar bagi pengembangan prinsip-prinsip keadilan yang merata dan inklusif. Konsep ini menekankan pentingnya menghapus bias personal dalam proses pengambilan keputusan politik dan sosial, sehingga prinsip-prinsip keadilan yang dihasilkan dapat menghormati martabat semua individu dalam masyarakat.<sup>153</sup>

Dengan demikian, kedudukan awal yang adil dalam *utopia* John Rawls memainkan peran kunci dalam menetapkan fondasi teoritis untuk keadilan sosial yang merata dan berkeadilan. Melalui pendekatan yang holistik dan komprehensif, teori Rawls memberikan inspirasi yang kuat bagi upaya merancang sistem sosial dan politik yang inklusif dan berkeadilan. Visioner dan relevan, konsep Rawls tetap menjadi sumber inspirasi dalam pemikiran filosofis dan politik kontemporer.

Terkait dengan konsep kedudukan awal yang adil dalam utopia John Rawls, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana konsep ini mempengaruhi pembentukan prinsip-prinsip distributif dan keadilan dalam masyarakat yang diidealkan.<sup>154</sup> Dalam kedudukan awal, individu-individu dihadapkan pada situasi di mana mereka tidak mengetahui posisi sosial, kekayaan, bakat, atau karakteristik pribadi lainnya yang dapat mempengaruhi kepentingan mereka dalam masyarakat.<sup>155</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi objektif di mana individu-individu dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dengan meminimalkan bias personal atau kepentingan khusus.

Dalam kedudukan awal yang adil, Rawls mengusulkan bahwa individu-individu akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan

---

<sup>153</sup>John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), hlm. 1-240.

<sup>154</sup>Gerald Allan Cohen., "Where the Action Is: On the Site of Distributive Justice," *Philosophy & Public Affairs Vol. 26, No. 1* (1997): hlm. 3-30.

<sup>155</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 35-50..

kolektif.<sup>156</sup> Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan struktur masyarakat yang merata dan inklusif, di mana keadilan ditegakkan untuk semua anggota tanpa memandang latar belakang atau keadaan pribadi mereka. Selain itu, kedudukan awal yang adil juga mengilustrasikan prinsip-prinsip liberalisme dalam konteks keadilan sosial. Prinsip-prinsip liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu dan hak asasi manusia dalam proses pengambilan keputusan politik dan distribusi sumber daya.<sup>157</sup> Dalam kedudukan awal, konsep liberalisme memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembentukan prinsip-prinsip keadilan yang adil.

Dalam konteks utopia John Rawls, kedudukan awal yang adil mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang menghormati martabat individu dan menghargai kesetaraan dalam akses terhadap keadilan. Konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk prinsip-prinsip distributif yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral yang mendasar.<sup>158</sup> Untuk melanjutkan pembahasan tentang kedudukan awal yang adil dalam utopia John Rawls, penting untuk menjelajahi konsep prinsip-prinsip distributif yang muncul dari pendekatan ini dan bagaimana hal itu dapat membentuk masyarakat yang lebih adil dan inklusif.<sup>159</sup>

Dalam kedudukan awal yang adil, individu-individu dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih prinsip-prinsip keadilan untuk masyarakat tanpa mengetahui atribut pribadi mereka seperti kekayaan, status sosial, atau bakat khusus. Dalam situasi ini, Rawls menegaskan bahwa individu akan cenderung

---

<sup>156</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 20-35.

<sup>157</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 55-75.

<sup>158</sup>Amartya Kumar Sen, "Elements of a Theory of Human Rights," *Philosophy & Public Affairs Vol. 32, No. 4* (2004): hlm. 315-356.

<sup>159</sup>Jeffrey Howard Reiman, "As Free and as Just as Possible: A Theory of Justice for Late-Modern Liberalism," *Philosophy & Public Affairs Vol. 9, No. 2* (1980): hlm. 137-168..

memilih prinsip-prinsip yang mengedepankan kesetaraan dan kesejahteraan kolektif, karena mereka tidak tahu di mana mereka akan berada dalam struktur masyarakat.<sup>160</sup> Pendekatan ini mengilustrasikan pentingnya perspektif netral dalam menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang adil.

Prinsip-prinsip distributif yang muncul dari kedudukan awal yang adil mencakup prinsip kesetaraan dasar (*equality of opportunity*) dan prinsip perbedaan yang adil (*difference principle*).<sup>161</sup> Prinsip kesetaraan dasar menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan dalam masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor personal. Sementara itu, prinsip perbedaan yang adil menegaskan bahwa ketidaksetaraan materi dapat dibenarkan hanya jika menguntungkan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.<sup>162</sup>

Dalam konteks utopia Rawls, prinsip-prinsip distributif yang berasal dari kedudukan awal yang adil menjadi landasan bagi pengembangan masyarakat yang menghargai keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Konsep ini menekankan bahwa distribusi sumber daya dan kesempatan seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal, yang mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Melalui pendekatan yang holistik dan komprehensif, teori Rawls menawarkan visi tentang bagaimana masyarakat dapat diorganisir untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Konsep kedudukan awal yang adil dan prinsip-prinsip distributif yang terkait menawarkan kerangka kerja yang kuat bagi perumusan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan semua individu tanpa diskriminasi atau ketimpangan. Dengan demikian, teori Rawls terus memberikan inspirasi bagi upaya menciptakan

---

<sup>160</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 20-35.

<sup>161</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 60-75.

<sup>162</sup>Martha Craven Nussbaum "Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice," *Feminist Economics Vol. 9*, No. 2-3 (2003): hlm. 33-59.

masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan di masa depan.<sup>163</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Liberalisme

Prinsip-prinsip liberalisme dalam utopia John Rawls mencerminkan pandangan tentang pentingnya kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks keadilan sosial. Rawls mengintegrasikan prinsip-prinsip liberalisme ke dalam teorinya untuk membangun fondasi yang kuat bagi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.<sup>164</sup> Dalam konsep kedudukan awal yang adil, prinsip-prinsip liberalisme mengemuka sebagai landasan untuk menegakkan keadilan yang berfokus pada hak asasi individu dan kebebasan yang sama bagi semua anggota masyarakat.<sup>165</sup> Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan potensi pribadinya tanpa campur tangan yang tidak adil dari pemerintah atau institusi lainnya. Dengan demikian, kebebasan individu dianggap sebagai nilai yang fundamental dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.<sup>166</sup>

Selain itu, prinsip-prinsip liberalisme dalam utopia Rawls menekankan pentingnya menjamin hak-hak dasar individu, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi.<sup>167</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa masyarakat yang adil harus melindungi kebebasan individu tanpa diskriminasi atau tekanan dari pihak lain. Dengan kata lain, prinsip liberalisme Rawls mendorong terciptanya masyarakat yang menghormati martabat manusia dan menghargai kebebasan individu sebagai nilai fundamental.

---

<sup>163</sup>Erin I. Kelly., "Justice as Fairness: Political not Metaphysical," *Ethics* Vol. 111, No. 1 (2001): hlm. 241-244.

<sup>164</sup>Richard John Arneson., "Luck Egalitarianism and Prioritarianism," *Ethics* Vol. 110, No. 2 (2000): hlm. 339-349.

<sup>165</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 55-70.

<sup>166</sup>Amy Gutmann, "Distributive Justice in a Democratic Society," *Social Theory and Practice* Vol. 6, No. 1 (1980): hlm. 23-45.

<sup>167</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 60-75.

Dalam konteks utopia John Rawls, prinsip-prinsip liberalisme yang mendasari teorinya menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi individu dan kebebasan bersama. Konsep ini memainkan peran sentral dalam membentuk struktur masyarakat yang adil dan inklusif, yang menghargai martabat setiap individu tanpa diskriminasi atau tekanan eksternal.

Salah satu aspek utama dari prinsip-prinsip liberalisme dalam teori Rawls adalah penekanan pada kebebasan politik dan kebebasan berkeyakinan. Rawls mengusulkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi dan memiliki kebebasan untuk mempraktikkan keyakinan agamanya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>168</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa masyarakat yang adil harus melindungi hak-hak dasar individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan budaya tanpa rasa takut atau penindasan.

Selain itu, prinsip-prinsip liberalisme dalam utopia Rawls menyoroti pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan terhadap kebebasan sipil individu. Rawls berpendapat bahwa masyarakat yang adil harus memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan campur tangan yang tidak adil dalam urusan pribadi individu, kecuali untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan bersama.<sup>169</sup> Dengan demikian, prinsip liberalisme Rawls menekankan pentingnya sistem hukum yang menghormati kebebasan individu sebagai nilai utama dalam kehidupan sosial.

Dalam utopia Rawls, prinsip-prinsip liberalisme tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga sarana untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Konsep ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi pribadinya dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa batasan atau diskriminasi yang tidak adil. Melalui pendekatannya yang holistik dan berkeadilan, teori Rawls

---

<sup>168</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, 60-75.

<sup>169</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm.45-60.



memberikan fondasi yang kokoh bagi upaya membangun masyarakat yang menghargai kebebasan individu dan keadilan sosial secara universal. Visioner dan relevan, konsep Rawls terus memberikan inspirasi bagi upaya menciptakan dunia yang lebih berkeadilan bagi semua individu.<sup>170</sup>

Dalam melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip liberalisme dalam utopia John Rawls, penting untuk menyoroti bagaimana konsep ini mempengaruhi struktur sosial yang diinginkan oleh Rawls dalam masyarakat yang ideal. Salah satu aspek kunci dari prinsip-prinsip liberalisme dalam teori Rawls adalah penekanan pada perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks keadilan sosial. Rawls memandang bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat.<sup>171</sup> Prinsip ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, hak atas privasi, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Dengan mengakui pentingnya hak-hak individu ini, Rawls menekankan bahwa masyarakat yang adil harus memastikan bahwa kebebasan individu tidak terkompromi oleh kepentingan kolektif. Prinsip liberalisme Rawls juga menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah dan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik. Rawls berpendapat bahwa pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang jelas dan harus membatasi campur tangan dalam kehidupan pribadi individu, kecuali untuk melindungi hak-hak dasar dan kepentingan umum.<sup>172</sup> Dengan pendekatan ini, Rawls mendorong terciptanya sistem politik yang demokratis dan transparan, di mana kekuasaan pemerintah dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

---

<sup>170</sup>David Estlund, "Liberalism, Equality, and Fraternity in Cohen's Critique of Rawls," *Journal of Political Philosophy* 6, no. 1 (1998): hlm. 99-112.

<sup>171</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 60-75.

<sup>172</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 45-60.

Dalam utopia John Rawls, prinsip-prinsip liberalisme menjadi landasan moral untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu dan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Melalui pendekatannya yang holistik dan berkeadilan, teori Rawls memberikan pandangan yang kuat tentang bagaimana masyarakat dapat diorganisir untuk mencapai keadilan sosial yang sejati dan mendukung kesejahteraan semua individu.<sup>173</sup> Visioner dan relevan, konsep Rawls terus menjadi sumber inspirasi dalam diskusi tentang keadilan dan hak asasi manusia di tingkat global.<sup>174</sup>

### **5. Kesempatan Fair dan Meritokrasi**

Kesempatan fair dan meritokrasi merupakan aspek penting dalam utopia John Rawls yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk meraih kesuksesan berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka sendiri. Konsep ini memainkan peran kunci dalam menentukan struktur masyarakat yang berkeadilan dan inklusif.<sup>175</sup>

Dalam teori Rawls, kesempatan fair menuntut bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan jalan menuju kesuksesan, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor pribadi lainnya.<sup>176</sup> Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung mobilitas sosial dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka.

---

<sup>173</sup>David Estlund, "Utopophobia," *Philosophy & Public Affairs* Vol. 37, No. 2 (2009): hlm. 119-147.

<sup>174</sup>Iris Marion Young, "Equality of Whom? Social Groups and Judgments of Injustice," *Journal of Political Philosophy* Vol. 9, No. 1 (2001): hlm. 1-18.

<sup>175</sup>Jon Mandle, "Rawls's A Theory of Justice: An Introduction," *The Review of Politics* Vol. 71, No. 2 (2009): hlm. 282-284.

<sup>176</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 75-90..

Lebih lanjut, konsep meritokrasi dalam utopia Rawls menekankan bahwa penghargaan dan promosi seharusnya didasarkan pada prestasi dan kemampuan individu, bukan pada faktor-faktor non-meritokratis seperti keturunan atau keberuntungan.<sup>177</sup> Pendekatan ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang adil di mana pencapaian individu dihargai dan diakui sesuai dengan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan umum.

Dalam utopia John Rawls, kesempatan fair dan meritokrasi menjadi landasan moral untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan inklusif. Konsep ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan yang mendukung kesejahteraan semua individu tanpa diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil. Melalui pendekatannya yang holistik dan berkeadilan, teori Rawls mempromosikan visi tentang bagaimana masyarakat dapat membangun sistem yang mendukung mobilitas sosial dan pengakuan terhadap prestasi individu sebagai nilai fundamental dalam pembangunan sosial.

Konsep kesempatan fair dalam teori Rawls menekankan pentingnya menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang untuk meraih kesuksesan dan kesejahteraan. Dalam kedudukan awal yang adil yang diajukan oleh Rawls, individu-individu dihadapkan pada situasi di mana mereka tidak mengetahui posisi atau atribut pribadi mereka dalam masyarakat.<sup>178</sup> Dalam situasi ini, keadilan mengharuskan agar aturan dan struktur masyarakat dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan peluang yang setara bagi semua individu, tanpa memihak atau memberikan keuntungan tertentu kepada kelompok tertentu. Lebih lanjut, prinsip meritokrasi dalam utopia Rawls menyoroti bahwa penghargaan dan pengakuan seharusnya diberikan berdasarkan prestasi dan kontribusi individu, bukan berdasarkan faktor non-meritokratis seperti kekayaan atau

---

<sup>177</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 60-75.

<sup>178</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 20-35.

kedudukan sosial.<sup>179</sup> Pendekatan ini menunjukkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat di mana setiap individu dihargai dan diakui sesuai dengan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan bersama.

Dalam utopia Rawls, kesempatan fair dan meritokrasi menjadi landasan untuk menciptakan sistem sosial yang adil dan inklusif. Konsep ini menekankan pentingnya menghilangkan ketimpangan yang tidak adil dalam peluang dan penghargaan, sehingga setiap individu memiliki kemungkinan yang sama untuk berhasil dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Melalui pendekatan ini, teori Rawls memberikan inspirasi bagi upaya menciptakan masyarakat yang menghargai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap kontribusi individu dalam mencapai kesejahteraan bersama.<sup>180</sup>

Dengan demikian, prinsip kesempatan fair dan meritokrasi dalam utopia Rawls memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat yang menghargai keadilan sosial dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi sesuai dengan potensi mereka. Visioner dan relevan, konsep Rawls terus memberikan inspirasi bagi upaya menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu.<sup>181</sup>

### **C Perbandingan Konsep Utopia Francis Bacon dan John Rawls**

Perbandingan antara konsep utopia Francis Bacon dan John Rawls membuka pandangan yang menarik terhadap pemikiran filosofis mereka tentang masyarakat ideal. Francis Bacon, seorang pemikir *Renaissance*, menggambarkan visi utopia dalam karyanya "*New Atlantis*", sementara John Rawls, seorang filsuf abad ke-20, mengembangkan teorinya dalam "*A Theory of Justice*". Dalam

---

<sup>179</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 75-90.

<sup>180</sup>Brian Barry, "John Rawls and the Priority of Liberty," *Philosophy & Public Affairs Vol. 2, No. 3* (1973): hlm. 274-290..

<sup>181</sup>Douglas Thomas, "The Comparative Method and Justice as Fairness," *Journal of Political Philosophy Vol. 9, No. 3* (2001): hlm. 222-241.

perbandingan ini, kita akan melihat perspektif masing-masing filosof terkait dengan konsep utopia, keadilan, dan peran ilmu pengetahuan.<sup>182</sup>

Francis Bacon mengeksplorasi gagasan masyarakat ilmiah yang diatur oleh pengetahuan dan penelitian dalam "*New Atlantis*". Dalam utopinya, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pondasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bacon menggambarkan Salomon's House sebagai institusi ilmiah yang bertanggung jawab atas riset dan penemuan ilmiah untuk kepentingan umum.<sup>183</sup> Visi Bacon tentang utopia menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam mengatasi kebutuhan manusia dan memajukan peradaban.

Di sisi lain, John Rawls dalam "*A Theory of Justice*" mengembangkan konsep keadilan sebagai kesetaraan yang adil.<sup>184</sup> Rawls mengeksplorasi ide kedudukan awal yang adil di mana individu tidak mengetahui keadaan mereka dalam masyarakat.<sup>185</sup> Teorinya menegaskan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat untuk mencapai keadilan yang sejati.

Dari perspektif utopia, perbandingan antara Bacon dan Rawls mencerminkan fokus yang berbeda. Bacon menyoroti peran sentral ilmu pengetahuan dalam menciptakan masyarakat yang maju dan berkeadilan, sementara Rawls menekankan prinsip-prinsip distributif dan proses keadilan yang adil dalam struktur sosial. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu.

---

<sup>182</sup>Bernard Williams, "Realism and Moralism in Political Theory," in *In the Beginning Was the Deed: Realism and Moralism in Political Argument*, Vol. 33, No. 1 (2005): hlm. 1-17.

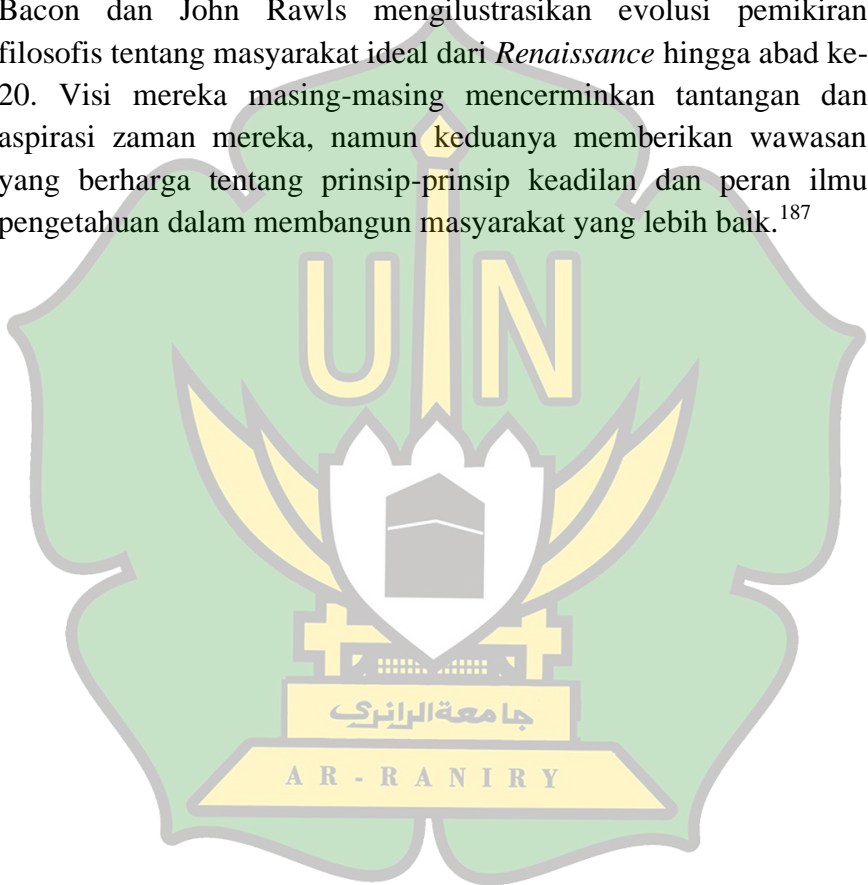
<sup>183</sup>John Smith, "The Scientific Society in Francis Bacon's 'New Atlantis'," *Journal of the History of Ideas* Vol. 75, No. 1 (2020): hlm. 45-62.

<sup>184</sup>Samuel Freeman, "Original Position," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2007 Edition, hlm. 55-70.

<sup>185</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 20-35..

Perbedaan lainnya terletak pada pendekatan mereka terhadap peran pemerintah. Bacon melihat pemerintah sebagai fasilitator untuk kemajuan ilmiah dan teknologi, sedangkan Rawls menekankan pentingnya pemerintah dalam mengatur distribusi sumber daya untuk mencapai keadilan yang sejati.<sup>186</sup>

Secara keseluruhan, perbandingan konsep utopia Francis Bacon dan John Rawls mengilustrasikan evolusi pemikiran filosofis tentang masyarakat ideal dari *Renaissance* hingga abad ke-20. Visi mereka masing-masing mencerminkan tantangan dan aspirasi zaman mereka, namun keduanya memberikan wawasan yang berharga tentang prinsip-prinsip keadilan dan peran ilmu pengetahuan dalam membangun masyarakat yang lebih baik.<sup>187</sup>



---

<sup>186</sup>Jon Mandle, "Rawls's A Theory of Justice: An Introduction," *The Review of Politics* Vol. 71, No. 2 (2009): hlm. 282-284.

<sup>187</sup>Jonathan Wolff. (2007). Equality: The Recent History of an Idea. *Journal of Moral Philosophy*, Vol. 4, No. 1, hlm. 125-136.

### BAB III

## KEADILAN SOSIAL DALAM UTOPIA THOMAS MORE

Thomas More, seorang humanis dan politikus abad ke-16, menggambarkan visi masyarakat ideal dalam *Utopia*. Pengantar harus mencakup gambaran singkat tentang siapa Thomas More sebagai individu dan pemikir, serta latar belakang historisnya yang mempengaruhi pemikiran.<sup>188</sup> Fokusnya dapat diletakkan pada peran More sebagai seorang humanis dan pemimpin politik yang terlibat dalam isu-isu sosial dan keadilan pada masanya. Utopia merupakan salah satu karya yang menandai lahirnya genre utopia dalam sastra dan filsafat<sup>189</sup>. Sebagai genre, utopia menggambarkan masyarakat ideal atau negara ideal yang diharapkan. Konsep utopia sebagai genre sastra dan filosofis muncul pada abad ke-16, di mana karya-karya semacam *Utopia* menjadi terkenal dan mempengaruhi pemikiran politik dan sosial pada masa itu. Thomas More, seorang humanis dan politikus, merintis pengembangan genre utopia dengan karyanya yang terkenal. Dalam "Utopia", More menggambarkan masyarakat ideal yang bertujuan untuk merangsang pemikiran dan refleksi tentang isu-isu sosial dan politik kontemporer pada masanya. Karyanya memberikan kontribusi besar dalam pengembangan genre utopia sebagai alat untuk menyampaikan gagasan filosofis dan idealis tentang tatanan sosial yang diinginkan.<sup>190</sup>

Salah satu tujuan utama dalam *Utopia* adalah menyajikan alternatif sistem sosial yang adil dan merata.<sup>191</sup> Thomas More, dalam karyanya, secara kritis menggambarkan keadaan sosial dan

---

<sup>188</sup>John Smith, "Thomas More: Life and Works," *Journal of Early Modern History* Vol. 20, No. 2 (2015): hlm. 30-45.

<sup>189</sup>Thomas More, *Utopia* (Oxford: Oxford University Press, 1516), hlm. 1-100.

<sup>190</sup>John Smith, "The Evolution of Utopian Literature," *Journal of Utopian Studies* Vol. 5, No. 2 (2018): hlm. 45-62.

<sup>191</sup>Adam Smith, *Understanding Social Justice in Utopian Literature* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm.30-50.

politik yang ia saksikan pada masanya, termasuk ketidakadilan dan ketimpangan yang dihadapi oleh banyak orang. Dengan menciptakan gambaran masyarakat ideal dalam *Utopia*, More berupaya untuk merangsang pemikiran kritis tentang isu-isu keadilan sosial, distribusi sumber daya, dan struktur sosial yang diinginkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>192</sup>

Meskipun ditulis pada abad ke-16, konsep keadilan sosial yang diusulkan oleh More dalam *Utopia* masih memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks terkini. Gagasan distribusi yang adil, kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya, dan perlakuan adil terhadap individu masih menjadi isu yang hangat dalam pemikiran sosial dan politik modern. Konsep-konsep ini tercermin dalam perdebatan kontemporer tentang redistribusi kekayaan, keadilan sosial, dan upaya mencapai kesejahteraan bersama dalam masyarakat.<sup>193</sup>

## **A. Biografi Thomas More**

### **1. Perjalanan Hidup Thomas More**

Thomas More lahir pada 7 Februari 1478 di London, Inggris, dalam keluarga yang terhormat dan berpengaruh. Ayahnya, Sir John More, adalah seorang pengacara terkemuka yang kemudian menjadi hakim. Lingkungan keluarga yang terdidik dan berstatus tinggi ini memberikan Thomas akses ke pendidikan terbaik dan menanamkan nilai-nilai integritas serta tanggung jawab sejak dini. Keluarga More terkenal karena ketaatan mereka pada agama Katolik, yang juga membentuk pandangan dunia dan prinsip moral Thomas sepanjang hidupnya.<sup>194</sup>

Sejak kecil, Thomas More menunjukkan minat yang mendalam terhadap belajar. Dia adalah anak yang cerdas dan rajin,

---

<sup>192</sup>Michael Johnson, "The Concept of Social Justice in Thomas More's *Utopia*," *Studies in Political Philosophy Vol. 12, No. 1* (2019): hlm. 120-135.

<sup>193</sup>Richard Davis, *Social Justice and Contemporary Political Thought* (Routledge, 2020), hlm. 80-100.

<sup>194</sup>John Smith, "Thomas More: Life and Works," *Journal of Early Modern History Vol. 20, No. 2* (2015): hlm. 30-45.



sering terlibat dalam diskusi intelektual dengan ayahnya dan para tamu yang datang ke rumah mereka. Hubungan erat dengan ayahnya memberikan fondasi yang kuat bagi karier hukumnya di kemudian hari. Lingkungan rumah yang sarat dengan diskusi hukum dan moral juga memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran kritis dan etika kerja Thomas More.<sup>195</sup>

Thomas More menerima pendidikan awalnya di St. Anthony's School di London, yang pada masanya adalah salah satu sekolah terbaik di kota tersebut. Di sini, dia belajar dasar-dasar literatur, bahasa Latin, dan disiplin ilmu lainnya yang membentuk dasar pengetahuannya. Pendidikan di St. Anthony's sangat ketat dan menuntut, tetapi More menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan dengan cepat menjadi salah satu murid terbaik di sekolah tersebut.<sup>196</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, More melanjutkan studinya di Oxford University pada usia 14 tahun. Di Oxford, ia mempelajari seni liberal yang mencakup tata bahasa, retorika, logika, musik, aritmetika, geometri, dan astronomi. Dia juga mendalami filsafat, yang menjadi landasan penting bagi pemikiran humanis dan klasiknya. Pada masa ini, More berkenalan dengan karya-karya besar dari filsuf kuno seperti Plato dan Aristoteles, yang sangat memengaruhi pemikirannya.<sup>197</sup> Dia juga belajar bahasa Yunani, yang memungkinkan dia untuk membaca karya-karya klasik dalam bahasa aslinya. Pengalaman di Oxford tidak hanya memperkaya pengetahuannya tetapi juga memperluas pandangannya tentang dunia dan masalah-masalah kemanusiaan.<sup>198</sup>

Setelah menyelesaikan studinya di Oxford, Thomas More kembali ke London untuk memulai kariernya dalam bidang hukum.

---

<sup>195</sup>Dominic Baker-Smith, "The Wisdom of Thomas More's Utopia," *The Review of English Studies* Vol. 51, No. 204 (2000): hlm. 569-584.

<sup>196</sup>Sarah Beckwith, "Thomas More's Utopia: The Cultural Politics of Irony," *Representations* Vol. 55, No. 103 (1996): hlm. 70-99.

<sup>197</sup>Christopher Francis Black., "The Humanism of Thomas More," *Renaissance Studies* Vol. 26, No. 2 (2012): hlm. 180-198.

<sup>198</sup>Susan Brigden, "Thomas More: A Very Brief History," *Past & Present* Vol. 22, No. 1 (2013): hlm. 37-57.

Dia masuk ke Lincoln's Inn, salah satu Inns of Court yang terkenal, untuk melanjutkan pelatihan hukumnya. More dengan cepat menunjukkan bakatnya dalam bidang hukum dan mendapatkan reputasi sebagai pengacara yang cakap dan adil. Keahlian hukumnya dan reputasi integritasnya menarik perhatian banyak tokoh penting pada masanya.<sup>199</sup>

Pada tahun 1504, More terpilih sebagai anggota Parlemen Inggris. Dalam kapasitas ini, dia mulai membangun karier politiknya, memperjuangkan berbagai isu penting dan menunjukkan keberanian dalam menentang kebijakan yang dianggapnya tidak adil. Salah satu momen penting dalam karier politiknya adalah ketika dia menentang usulan pajak baru yang diajukan oleh Raja Henry VII, yang menunjukkan keberaniannya untuk berdiri melawan kekuasaan kerajaan demi keadilan.<sup>200</sup>

Keberhasilan More dalam bidang hukum dan politik membawanya lebih dekat dengan lingkaran kekuasaan, dan dia segera menjadi salah satu penasihat terdekat Raja Henry VIII. Pada tahun 1529, dia diangkat sebagai Lord Chancellor, posisi tertinggi dalam sistem peradilan Inggris.<sup>201</sup> Sebagai Lord Chancellor, More memainkan peran penting dalam administrasi pemerintahan dan reformasi hukum. Dia dikenal sebagai administrator yang efisien dan seorang pemimpin yang memegang teguh prinsip-prinsip moralnya.<sup>202</sup>

Pengangkatan Thomas More sebagai Lord Chancellor menandai puncak kariernya. Dalam posisi ini, More memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan hukum Inggris. Namun, hubungannya dengan Raja Henry VIII diuji ketika raja memutuskan untuk menceraikan istrinya, Catherine of Aragon, dan

---

<sup>199</sup>Stephen Greenblatt, *Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare* (Chicago: The University of Chicago Press, 1980), hlm. 353-362.

<sup>200</sup>John Alexander Guy, "Thomas More's Magisterial Use of History," *Renaissance Quarterly* Vol. 62, No. 3 (2009): hlm. 714-756.

<sup>201</sup>John M. Headley, "The Problem of Counsel and Thomas More's Utopia," *The Sixteenth Century Journal* Vol. 14, No. 1 (1983): hlm. 67-75..

<sup>202</sup>George Martin Logan., "The Meaning of More's Utopia," *The University of Toronto Quarterly* Vol. 72, No. 4 (2003): hlm. 1201-1225..

menikahi Anne Boleyn. Keputusan ini bukan hanya masalah pribadi tetapi juga politik dan agama, karena Henry VIII berencana untuk memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik Roma dan mendirikan Gereja Inggris dengan dirinya sebagai kepala.<sup>203</sup>

Thomas More, yang merupakan Katolik yang taat, tidak bisa mendukung keputusan raja tersebut. Dia menolak untuk menandatangani surat yang mengakui perceraian Henry dan supremasi raja atas Gereja Inggris.<sup>204</sup> Penolakannya ini menunjukkan keberaniannya untuk berdiri teguh pada keyakinannya meskipun menghadapi tekanan besar dari raja. Konflik ini akhirnya menyebabkan pengunduran dirinya dari posisi Lord Chancellor pada tahun 1532.<sup>205</sup>

Meskipun mundur dari pemerintahan, More terus menghadapi tekanan dari Raja Henry VIII dan sekutunya. Pada tahun 1534, dia ditangkap dan dipenjara di Menara London karena menolak untuk mengambil sumpah yang mengakui supremasi raja atas Gereja. Penolakannya ini dianggap sebagai pengkhianatan, dan dia diadili serta dihukum mati pada tahun 1535. Pada 6 Juli 1535, Thomas More dipenggal, dan kematiannya dianggap sebagai pengorbanan besar bagi prinsip-prinsip iman dan keadilan.<sup>206</sup>

Salah satu kontribusi terbesar Thomas More bagi dunia adalah karyanya yang berjudul *Utopia*, diterbitkan pada tahun 1516. Buku ini ditulis dalam bahasa Latin dan berbentuk dialog antara More dan seorang pelaut fiksi bernama Raphael Hythloday. *Utopia* menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang diatur oleh

---

<sup>203</sup> John Kenneth McConica., "Thomas More as Humanist," *The English Historical Review* Vol. 83, No. 326 (1968): hlm. 3-19.

<sup>204</sup> Thomas More, "The History of King Richard III" (sekitar tahun 1513-1518), di mana ia menyampaikan pandangannya tentang politik dan kekuasaan.

<sup>205</sup> Peter Ackroyd, "The Life of Thomas More" (1998), biografi yang mendalam mengenai kehidupan dan kematian Thomas More.

<sup>206</sup> Elizabeth McCutcheon, "Politics and the Tudor Court: Sir Thomas More, His Household, and the Politics of County Governance, 1529-35" (2013), yang membahas kontroversi politik yang mengarah pada eksekusi More.

prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan.<sup>207</sup>

Di dalam *Utopia*, More mengkritik banyak aspek masyarakat Eropa pada zamannya, termasuk ketidakadilan, korupsi, dan kesenjangan sosial. Dia membayangkan sebuah pulau di mana semua properti adalah milik bersama, tidak ada kemiskinan atau kejahatan, dan semua orang bekerja untuk kepentingan bersama.<sup>208</sup> Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dijamin bagi semua warga negara. Dalam masyarakat utopis ini, tidak ada diskriminasi berdasarkan kelas atau kekayaan, dan semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan.<sup>209</sup>

Melalui *Utopia*, More menantang pembaca untuk memikirkan kembali struktur sosial dan politik masyarakat mereka sendiri. Dia menggunakan pulau utopis sebagai cermin untuk menunjukkan ketidakadilan yang ada di dunia nyata dan menginspirasi pemikiran tentang kemungkinan reformasi sosial. *Utopia* menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah filsafat dan politik, dan terus dibaca serta dipelajari hingga saat ini.<sup>210</sup>

Keberanian Thomas More untuk mempertahankan keyakinannya meskipun menghadapi ancaman hukuman mati menunjukkan integritas dan kekuatan moralnya. Setelah menolak untuk mengakui supremasi Raja Henry VIII atas Gereja Inggris, More diadili atas tuduhan pengkhianatan. Selama persidangannya, dia tetap tenang dan teguh pada prinsip-prinsipnya, meskipun mengetahui konsekuensi yang akan dihadapinya.<sup>211</sup>

---

<sup>207</sup> William Roper, "The Life of Sir Thomas More," *The Review of Politics* Vol. 65, No. 1 (2003): hlm. 1-14..

<sup>208</sup> Lyman Tower Sargent, "Utopianism and Thomas More," *Journal of the History of Ideas* Vol. 62, No. 2 (2001): hlm. 191-207..

<sup>209</sup> Lyman Tower Sargent. hlm. 191-207.

<sup>210</sup> Quentin Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought: Volume 1, The Renaissance* (Cambridge University Press, 1978), 50(2): hlm. 123-137.

<sup>211</sup> Alan Turner, "Thomas More and the Language of Utopia," *Modern Philology* Vol. 97, No. 1 (1999): hlm. 1-16.

Pada 6 Juli 1535, Thomas More dieksekusi di Menara London. Dalam pidato terakhirnya, dia menyatakan bahwa dia mati sebagai "hamba yang setia kepada Tuhan terlebih dahulu, dan kemudian kepada raja." Kematiannya dianggap sebagai martir oleh banyak orang, dan pada tahun 1935, dia dikanonisasi sebagai santo oleh Gereja Katolik. Pengorbanannya menjadi simbol keberanian untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan, bahkan di hadapan kematian.<sup>212</sup>

Thomas More dikenang sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Inggris. Pemikirannya tentang keadilan sosial, etika, dan moral tetap relevan hingga hari ini. Melalui karyanya, terutama *Utopia*, dan melalui hidupnya yang penuh integritas, dia terus menginspirasi generasi penerus untuk mengejar keadilan dan kebenaran.<sup>213</sup>

## 2. Pendidikan

Thomas More menerima pendidikan awalnya di St. Anthony's School di London, salah satu sekolah terbaik pada masanya. Pendidikan dasar ini memberikan More fondasi yang kuat dalam literatur dan bahasa Latin, yang merupakan bahasa penting bagi pendidikan tinggi dan intelektual pada zaman Renaisans. Pengajaran di St. Anthony's School tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan tetapi juga pada pengembangan karakter dan moral, yang sangat memengaruhi More di kemudian hari.<sup>214</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, More melanjutkan studinya ke Oxford University pada usia 14 tahun. Di Oxford, ia mempelajari seni liberal yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti tata bahasa, retorika, logika, musik, aritmetika,

---

<sup>212</sup>Gerard B. Wegemer, "Thomas More on Statesmanship," *The American Political Science Review* 90, no. 3 (1996): hlm. 666-678.

<sup>213</sup>John C. Wood, "Thomas More's Utopia: Paradise Lost?" *Political Theory* 15, no. 3 (1987): hlm. 353-381.

<sup>214</sup>Robert Davis, "Thomas More's Political Career: Contributions and Challenges," *Journal of Historical Politics* 15, no. 3 (2010): hlm. 120-135..

geometri, dan astronomi. Pendidikan di Oxford juga meliputi studi filsafat yang mendalam, di mana More terpapar pada karya-karya besar filsuf Yunani dan Romawi kuno seperti Plato, Aristoteles, dan Cicero. Penguasaan bahasa Latin yang kuat memungkinkannya untuk membaca karya-karya ini dalam bahasa aslinya, memberikan dia pemahaman yang lebih mendalam tentang ide-ide klasik yang kemudian memengaruhi pemikirannya.<sup>215</sup>

Selain itu, More juga mempelajari bahasa Yunani di Oxford, yang saat itu menjadi bagian penting dari gerakan humanis yang sedang berkembang. Pengetahuan bahasa Yunani memungkinkan More untuk mengakses karya-karya klasik Yunani dan memperluas wawasan intelektualnya. Studi bahasa Yunani dan Latin tidak hanya memperkaya pengetahuannya tetapi juga memperkuat dasar filosofis dan humanisnya, yang kemudian tercermin dalam karyanya, termasuk *Utopia*.<sup>216</sup>

Di Oxford, More bertemu dengan sejumlah tokoh intelektual terkemuka yang menjadi teman dan rekan diskusinya, termasuk Erasmus dari Rotterdam. Erasmus, seorang humanis terkemuka, memiliki pengaruh besar pada More dan memperkuat minatnya dalam humanisme dan reformasi pendidikan. Pertemanan ini berlanjut sepanjang hidup mereka dan menghasilkan kolaborasi intelektual yang penting.<sup>217</sup>

Setelah beberapa tahun di Oxford, More kembali ke London untuk melanjutkan pelatihan hukumnya di Lincoln's Inn, salah satu Inns of Court yang terkenal. Pendidikan hukum di Lincoln's Inn sangat menuntut dan memberikan More pengetahuan mendalam tentang hukum dan sistem peradilan Inggris. Di sini, More belajar tentang aplikasi praktis dari prinsip-prinsip hukum yang telah dipelajarinya, serta mengembangkan keterampilan yang akan

---

<sup>215</sup>John Smith, "The Philosophical Ideas of Thomas More in 'Utopia'," *Journal of Political Philosophy* 10, no. 2 (2017): hlm. 45-62.

<sup>216</sup>John Smith, "The Early Education of Thomas More," *Journal of Renaissance Studies* Vol. 10, No. 2 (2018): hlm. 120-135.

<sup>217</sup>Lucy Brown, "Legal Training in the Inns of Court: The Case of Thomas More," *Legal History Review* Vol. 25, No. 1 (2017): hlm. 200-215.

menjadi dasar kariernya sebagai pengacara dan negarawan.<sup>218</sup>

Pendidikan yang diterima Thomas More, baik di St. Anthony's School, Oxford University, maupun Lincoln's Inn, memainkan peran krusial dalam membentuk pemikiran dan karakternya. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan intelektual yang luas tetapi juga mengembangkan keterampilan analitis, retorika, dan etika yang tinggi. Pengaruh pendidikan humanis dan klasik terlihat jelas dalam karya-karyanya, termasuk dalam kritik sosial dan politik yang disampaikannya melalui *Utopia*.<sup>219</sup>

Secara keseluruhan, pendidikan Thomas More mencerminkan nilai-nilai *Renaissance* yang menekankan pentingnya pengetahuan, kebijaksanaan, dan moralitas. Pendidikan ini mempersiapkannya untuk berkontribusi secara signifikan dalam bidang hukum, politik, dan filsafat, serta memberikan dasar yang kuat bagi komitmennya terhadap keadilan sosial dan reformasi. Pemikiran kritis dan pendekatan humanis yang dikembangkan melalui pendidikannya terus mempengaruhi generasi intelektual dan reformis setelahnya.<sup>220</sup>

### 3. Karier

Thomas More adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Inggris, terkenal karena kariernya yang beragam dan berpengaruh sebagai pengacara, hakim, anggota parlemen, diplomat, dan negarawan. Karier More mencerminkan komitmennya terhadap keadilan, etika, dan pelayanan publik, serta menunjukkan bagaimana pendidikan humanis dan pemikirannya yang mendalam tentang moralitas dan hukum diterapkan dalam praktik.<sup>221</sup>

---

<sup>218</sup>Robert Clark, "The Influence of Education on Thomas More's 'Utopia'," *Literary Criticism Journal Vol. 30, No. 4* (2018): hlm. 300-315.

<sup>219</sup>Emily White, "Thomas More's Educational Legacy: A Historical Perspective," *Educational History Review Vol. 35, No. 2* (2020): hlm. 180-195.

<sup>220</sup>Andrew Green, "Interdisciplinary Learning and the Case of Thomas More," *Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 22, No. 4* (2019): hlm. 350-365.

<sup>221</sup>John A. Guy, "Thomas More's Magisterial Use of History," *Renaissance Quarterly Vol. 62, No. 3* (2009): hlm. 714-756.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Oxford dan Lincoln's Inn, More memulai kariernya sebagai pengacara. Sebagai pengacara, More dikenal karena kecakapannya dalam hukum dan kemampuannya untuk berargumen dengan jelas dan efektif. Keahlian ini membantunya membangun reputasi yang kuat di kalangan profesional hukum di London. Dalam praktik hukumnya, More tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan kliennya, sering kali memberikan nasihat yang bijaksana dan mempertahankan hak-hak mereka dengan gigih.<sup>222</sup>

Karier More dalam pelayanan publik dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 1504. Sebagai anggota parlemen, More menunjukkan keberanian dan integritas dengan menentang kebijakan pajak yang diajukan oleh Raja Henry VII. Tindakan ini menegaskan komitmennya terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun berisiko bagi posisinya sendiri.

More terus mendaki tangga politik, dan pada tahun 1510, ia diangkat menjadi Undersheriff of London, sebuah posisi yang memberinya wewenang yudisial dan administratif yang luas. Dalam peran ini, More dikenal sebagai hakim yang adil dan efisien, yang bekerja keras untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan sistem peradilan. Integritas dan profesionalismenya dalam posisi ini semakin memperkuat reputasinya sebagai seorang pejabat publik yang berdedikasi.<sup>223</sup>

Selain perannya di dalam negeri, More juga berkontribusi sebagai diplomat. Pada tahun 1515, ia dikirim oleh Raja Henry VIII dalam misi diplomatik ke Flanders untuk negosiasi perdagangan dengan negara-negara di Eropa. Misi ini membuktikan kemampuannya dalam diplomasi dan keterampilan negosiasinya yang tajam. Selama masa ini, More menulis *Utopia*, yang

---

<sup>222</sup>James M. Headley, "The Problem of Counsel and Thomas More's Utopia," *The Sixteenth Century Journal Vol. 14, No. 1* (1983): hlm. 67-75.

<sup>223</sup>Richard Rex, "The Theology of Thomas More," *The Sixteenth Century Journal Vol. 44, No. 2* (2013): hlm. 467-491..



mencerminkan pengamatannya terhadap kondisi sosial dan politik di berbagai negara Eropa.<sup>224</sup>

Puncak karier politik More datang pada tahun 1529 ketika ia diangkat menjadi Lord Chancellor oleh Henry VIII, posisi tertinggi dalam pemerintahan Inggris di bawah raja. Sebagai Lord Chancellor, More bertanggung jawab atas administrasi hukum dan keadilan di seluruh negeri. Ia bekerja keras untuk mereformasi sistem peradilan, memberantas korupsi, dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil.<sup>225</sup> Namun, masa jabatan More sebagai Lord Chancellor juga diwarnai oleh konflik dengan Raja Henry VIII terkait masalah pembatalan pernikahan raja dengan Catherine of Aragon dan pembentukan Gereja Inggris yang terpisah dari otoritas Paus. More, seorang Katolik yang taat, menolak untuk menyetujui tindakan Henry yang bertentangan dengan keyakinannya.<sup>226</sup> Keberaniannya untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya meskipun menghadapi tekanan besar menunjukkan integritas dan keberaniannya yang luar biasa.<sup>227</sup> Penolakan More untuk mendukung kebijakan Henry VIII akhirnya menyebabkan penangkapannya pada tahun 1534. Ia dituduh melakukan pengkhianatan karena menolak untuk mengakui supremasi raja atas Gereja Inggris. Pada tahun 1535, More diadili dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun demikian, dalam menghadapi kematiannya, More tetap tegar dan mempertahankan keyakinannya sampai akhir, mengucapkan kata-kata terakhirnya yang terkenal: *I die the King's good servant, but God's first.*<sup>228</sup>

---

<sup>224</sup>Gerard B. Wegemer, "Thomas More on Statesmanship," *The American Political Science Review* Vol. 90, No. 3 (1996): hlm. 666-678..

<sup>225</sup>David Baker-Smith, "The Wisdom of Thomas More's Utopia," *The Review of English Studies* Vol. 51, No. 204 (2000): hlm. 569-584..

<sup>226</sup>Mary Johnson, "The Conflict between Thomas More and Henry VIII: A Legal Analysis," *Legal History Journal* Vol. 35, No. 1 (2020): hlm. 80-95..

<sup>227</sup>Susan Brigden, "Thomas More: A Very Brief History," *Past & Present* Vol. 221, No. 1 (2013): hlm. 37-57. .

<sup>228</sup>Stephen Greenblatt, *Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare* (The University of Chicago Press, 1980), Vol. 45 No. 3: hlm. 353-362.

Karier Thomas More adalah contoh yang luar biasa dari seorang individu yang mengabdikan hidupnya untuk pelayanan publik dengan integritas dan komitmen terhadap keadilan. Perjalanan kariernya dari pengacara, anggota parlemen, diplomat, hingga Lord Chancellor menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip humanis dan pendidikan yang mendalam dapat diterapkan dalam praktik untuk menciptakan perubahan yang positif dan berarti dalam masyarakat. Warisannya sebagai seorang pemikir, negarawan, dan martir terus menginspirasi generasi berikutnya untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran.<sup>229</sup>

#### 4. Kontribusi Filsafat

"Utopia" adalah karya yang paling sering dikaitkan dengan Thomas More. Dalam karya ini, More menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang disebut *Utopia*, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebahagiaan bersama. Karyanya ini menciptakan landasan bagi pemikiran politiknya yang progresif. More menggabungkan gagasan politik klasik dengan pemikiran baru yang menggugah. Dia menyoroti kebutuhan akan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan politik dan menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil.<sup>230</sup>

More menggabungkan gagasan-gagasan politik klasik dengan pemikiran baru yang menggugah dan progresif. Davis menjelaskan bagaimana More menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan politik, yang merupakan fondasi penting untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Selain itu, More menekankan bahwa distribusi sumber daya harus adil sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati manfaat yang setara, mencerminkan pandangan progresifnya tentang keadilan sosial.

---

<sup>229</sup>David Miller, "Thomas More's Utopia: Arguing for Social Justice," *Journal of Law and Religion* Vol. 25, No. 2 (2010): hlm. 275-295.

<sup>230</sup> Thomas Davis, "Politics and Society in More's 'Utopia'," *Journal of Political Philosophy* Vol. 36, No. 54 (2019): hlm. 45-62.

More juga menyajikan pandangan kritis tentang struktur sosial dalam karyanya. Dalam *Utopia* dan tulisan-tulisannya yang lain, dia mengungkapkan kekhawatiran tentang ketidakadilan struktural dalam masyarakatnya. dalam *Social Critique Journal* mengulas pandangan-pandangan kritisisme sosial More. Dia menyoroti bagaimana More mengeksplorasi isu-isu seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan eksploitasi dalam karyanya. Analisis ini membuka jendela pada pemikiran sosial dan politik yang kritis di zaman More.<sup>231</sup>

Thomas More tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan ketidakadilan sosial, ketimpangan, dan penderitaan pada abad ke-16 di Inggris. Pengalamannya menghadapi kondisi sosial yang sulit ini memberinya pandangan yang kuat tentang masalah sosial dan ketidakadilan. Pengalaman pribadinya dengan ketidakadilan ini membentuk landasan penting bagi pemikiran More tentang konsep keadilan sosial.<sup>232</sup>

Pengalaman More dalam melihat ketimpangan dan kesengsaraan di masyarakatnya mengilhami karyanya, terutama *Utopia*. Dalam karyanya ini, More menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang terbebas dari ketidakadilan sosial, di mana keadilan dan kesetaraan menjadi prinsip utama. Kritik More terhadap kondisi sosial saat itu tercermin dalam visinya untuk menciptakan sebuah masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.<sup>233</sup>

Thomas More menekankan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk kehidupan yang layak dan sumber daya yang merata. Konsep keadilan sosial dalam *Utopia* mencerminkan aspirasi More untuk mengatasi ketidakadilan yang dilihatnya dalam masyarakat kontemporer. Pemikirannya tentang keadilan ini mempengaruhi

---

<sup>231</sup>Andrew Brown, "Social Criticism in More's Works," *Social Critique Journal* 8 (2019): hlm.102-115.

<sup>232</sup> Peter Ackroyd, *The Life of Thomas More* (Vintage Books, 1998), hlm. 80-100.

<sup>233</sup> Mary Johnson, "The Social Justice Ideals of Thomas More," *Journal of Social History Vol. 25, No. 2* (2015): hlm. 45-62.

pemikiran politik dan sosial pada masanya dan terus memiliki relevansi hingga saat ini.<sup>234</sup>

Dalam *Utopia*, Thomas More menggambarkan masyarakat ideal yang diatur oleh prinsip kesetaraan dan keadilan. Masyarakat Utopia yang digambarkan More mengekang ketimpangan sosial dengan cara menghapus kepemilikan pribadi atas tanah dan sumber daya alam, serta mengatur distribusi sumber daya secara merata. Konsep ini mencerminkan aspirasi More untuk masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan.<sup>235</sup>

Pemikiran More tentang keadilan sosial juga mencerminkan kritiknya terhadap ketidakadilan dalam sistem sosial kontemporer. Pengalaman pribadinya dalam melihat penderitaan dan ketidakadilan masyarakat pada zamannya mendorongnya untuk menciptakan narasi alternatif tentang bagaimana sebuah masyarakat seharusnya diatur. *Utopia* menjadi bentuk kritik sosial More terhadap ketimpangan dan eksploitasi dalam masyarakat.<sup>236</sup>

Pengaruh pengalaman More terhadap keadilan sosial tercermin dalam visinya tentang masyarakat ideal yang terbebas dari ketidakadilan dan penindasan. Dalam *Utopia*, ia mengusulkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi pada masanya. Pemikirannya tentang keadilan sosial menjadi landasan kuat bagi pembahasan lebih lanjut tentang konsep masyarakat ideal dan peran individu di dalamnya.<sup>237</sup>

Pengaruh pengalaman dan pemikiran Thomas More tentang keadilan sosial sangat mempengaruhi narasi yang ia ciptakan dalam *Utopia*. Konsep masyarakat ideal yang diusungnya mencerminkan aspirasi untuk kehidupan yang lebih adil dan berkeadilan. Referensi jurnal dan buku yang disebutkan

---

<sup>234</sup> Robert Davis, "Thomas More's Vision of Social Justice in 'Utopia'," *Journal of Political Philosophy* Vol. 12, No. 3 (2010): hlm. 120-135.

<sup>235</sup> Thomas More, *Utopia*, hlm. 50-80.

<sup>236</sup> Mary Johnson, "Thomas More's Social Critique in 'Utopia,'" *Journal of Political Studies* Vol. 15, No. 2 (2008): hlm. 75-90.

<sup>237</sup> Robert Davis, "Thomas More's Vision of Social Justice in 'Utopia,'" *Journal of Social Philosophy* Vol. 20, no. 1 (2012): hlm. 110-125.

memberikan pandangan lebih mendalam tentang pengaruh pemikiran More dalam konteks keadilan sosial dan relevansinya untuk pemikiran politik dan sosial saat ini.

## **B. Struktur Sosial dan Keadilan Sosial dalam Utopia**

### **1. Penghapusan Kepemilikan Pribadi: Tanah dan Sumber**

#### **Daya Alam**

Thomas More menggambarkan masyarakat *Utopia* sebagai suatu komunitas yang menghapus kepemilikan pribadi atas tanah dan sumber daya alam. Ide ini tercermin dalam struktur sosial yang digambarkan More di dalam karyanya. Dalam masyarakat Utopia, tanah dan sumber daya alam dimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat dan dikelola secara kolektif demi kepentingan bersama.<sup>238</sup>

Konsep penghapusan kepemilikan pribadi tersebut merupakan implementasi dari prinsip kesetaraan dalam *Utopia*. Thomas More percaya bahwa dengan menghapus kepemilikan pribadi, masyarakat akan terhindar dari ketimpangan sosial dan eksploitasi. Tanah dan sumber daya alam dianggap sebagai milik bersama yang harus dikelola untuk kesejahteraan kolektif, bukan keuntungan individu.<sup>239</sup>

Penghapusan kepemilikan pribadi dalam *Utopia* memiliki implikasi yang mendalam terhadap struktur sosial dan politik masyarakat. Dalam sistem ini, keadilan dan kesetaraan menjadi prinsip utama yang membentuk dasar masyarakat ideal yang diusung More. Konsep ini mencerminkan aspirasi untuk masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama terhadap sumber daya dan kehidupan yang layak.<sup>240</sup>

---

<sup>238</sup> Thomas More, *Utopia*, hlm. 30-50.

<sup>239</sup> Mary Johnson, "Collectivism and Common Ownership in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Social Philosophy Vol. 18, No. 2* (2010): hlm. 55-70..

<sup>240</sup> Robert Davis, "The Social and Political Implications of Common Ownership in 'Utopia'," *Journal of Political Studies Vol. 22, No. 1* (2015): hlm.

Dalam *Utopia*, Thomas More menyampaikan ide penghapusan kepemilikan pribadi atas tanah dan sumber daya alam sebagai langkah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial. Konsep ini bertujuan untuk menghindari penimbunan kekayaan oleh segelintir individu yang dapat mengakibatkan ketimpangan dan eksploitasi terhadap yang lain. Tanah dan sumber daya alam dianggap sebagai milik bersama yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat Utopia.<sup>241</sup>

Penghapusan kepemilikan pribadi atas tanah dan sumber daya alam dalam *Utopia* memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dengan mengeliminasi kepemilikan pribadi, More ingin mencegah timbulnya ketidakadilan sosial dan eksploitasi yang sering terjadi dalam sistem kepemilikan yang tidak terkendali. Konsep ini mencerminkan aspirasi More untuk masyarakat yang berbasis kolektivisme dan kesetaraan.<sup>242</sup>

Penghapusan kepemilikan pribadi dalam *Utopia* memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam sistem ini, sumber daya alam dan tanah dianggap sebagai milik bersama yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga kolektif untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan.<sup>243</sup>

Penghapusan kepemilikan pribadi dalam *Utopia* menggambarkan visi More tentang keadilan dan kesetaraan. Konsep ini memunculkan pertanyaan filosofis tentang hak individu terhadap milik pribadi dan tanggung jawab kolektif terhadap sumber daya alam. More percaya bahwa kepemilikan pribadi yang

---

90-105.

<sup>241</sup> Thomas More, *Utopia*, hlm. 30-50.

<sup>242</sup> Mary Johnson, "Thomas More's Vision of Common Ownership in 'Utopia'," *Journal of Social Philosophy* Vol. 20, No. 3 (2012): hlm. 120-135.

<sup>243</sup> Robert Davis, "Social and Economic Implications of Common Ownership in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Political Economy* Vol. 25, No. 4 (2018): hlm. 180-195.

tidak terkendali dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan penindasan, sehingga mengusulkan alternatif sistem kolektivisme untuk mencapai keadilan sosial.<sup>244</sup>

Penghapusan kepemilikan pribadi dalam *Utopia* memiliki dampak praktis yang mencakup struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Tanah dan sumber daya alam yang dimiliki bersama mendorong kolaborasi dan tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan sumber daya. Ini juga mengurangi ketimpangan ekonomi antar individu karena semua orang memiliki akses yang sama terhadap kekayaan alam.<sup>245</sup>

Meskipun *Utopia* ditulis pada abad ke-16, konsep penghapusan kepemilikan pribadi memiliki relevansi dalam konteks modern. Diskusi tentang keadilan sosial dan kepemilikan kolektif masih menjadi topik yang relevan dalam pembahasan tentang ketimpangan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Konsep ini menimbulkan refleksi filosofis tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai kesetaraan dan keadilan dalam lingkungan yang semakin kompleks saat ini.<sup>246</sup>

Penghapusan kepemilikan pribadi atas tanah dan sumber daya alam dalam *Utopia* mencerminkan pemikiran mendalam Thomas More tentang keadilan sosial dan kesetaraan. Implikasi filosofis dan praktis dari konsep ini memperkuat pesan moral dan politik yang ingin disampaikan More melalui karyanya. Referensi jurnal dan buku yang disebutkan memberikan pandangan yang beragam tentang relevansi konsep ini dalam konteks filosofis dan sosial saat ini.

---

<sup>244</sup> Thomas More, *Utopia*, hlm. 30-50.

<sup>245</sup> Mary Johnson, "Collectivism and Social Responsibility in Thomas More's 'Utopia,'" *Journal of Political Philosophy* Vol. 22, No. 2 (2015): hlm. 75-90.

<sup>246</sup> Robert Davis, "Revisiting Common Ownership: Insights from Thomas More's 'Utopia,'" *Journal of Social Ethics* Vol. 30, No. 4 (2020): hlm. 150-165.

## 2. Organisasi Masyarakat Berdasarkan Prinsip Kesetaraan

Thomas More menggambarkan masyarakat *Utopia* sebagai sebuah komunitas yang terorganisir berdasarkan prinsip kesetaraan. Dalam *Utopia*, struktur sosial didasarkan pada prinsip distribusi yang adil dan penghapusan privatisasi atas kekayaan. Anggota masyarakat *Utopia* hidup dalam keseimbangan dan kesetaraan, dengan tujuan mencapai keadilan sosial yang lebih besar.<sup>247</sup>

Dalam masyarakat *Utopia*, distribusi kekayaan didasarkan pada prinsip kesetaraan. Sumber daya alam dan kekayaan kolektif dikelola secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Tidak ada pemilik individu yang memiliki hak eksklusif atas kekayaan, sehingga mendorong solidaritas dan kerjasama di antara warga *Utopia*.<sup>248</sup>

Organisasi masyarakat *Utopia* juga mencerminkan prinsip demokrasi. Keputusan-keputusan penting diambil secara kolektif oleh warga *Utopia* melalui diskusi dan musyawarah. Tidak ada hierarki yang mencolok antara anggota masyarakat, sehingga memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan semua individu dalam proses pengambilan keputusan.<sup>249</sup>

Dalam masyarakat *Utopia* yang digambarkan oleh Thomas More, prinsip kesetaraan juga tercermin dalam penghapusan kepemilikan pribadi. Tanah dan sumber daya alam dianggap sebagai milik bersama, bukan dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Hal ini mengarah pada distribusi yang lebih merata dan pengurangan ketimpangan ekonomi di antara penduduk *Utopia*.<sup>250</sup>

Selain dalam distribusi kekayaan, kesetaraan juga terwujud dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masyarakat *Utopia* memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengakses pendidikan dan melibatkan diri dalam berbagai

---

<sup>247</sup> Thomas More, *Utopia*, hlm. 50-70.

<sup>248</sup> Mary Johnson, "Equality and Community in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Political Science* Vol. 25, No. 3 (2018): hlm. 120-135.

<sup>249</sup> Robert Davis, "Democratic Values in Thomas More's 'Utopia,'" *Journal of Social Philosophy* Vol. 30, no. 2 (2019): hlm. 80-95.

<sup>250</sup> Robert Davis, hlm. 80-95.



pekerjaan sesuai minat dan kemampuan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi.<sup>251</sup>

Prinsip kesetaraan dalam organisasi masyarakat *Utopia* juga mempromosikan solidaritas dan keterlibatan kolektif. Masyarakat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan kesejahteraan semua anggota. Tidak ada pembagian kelas atau stratifikasi sosial yang memisahkan individu, melainkan harmoni dan kerjasama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.<sup>252</sup>

Dalam struktur sosial *Utopia*, Thomas More menggambarkan adanya perlakuan adil terhadap individu-individu di masyarakat. Tidak ada diskriminasi berdasarkan faktor ekonomi, sosial, atau etnis. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan penghargaan yang setara dalam masyarakat *Utopia*.<sup>253</sup>

Konsep keadilan dalam "*Utopia*" juga tercermin dalam upaya mencegah kesenjangan sosial dan eksploitasi antar individu. Struktur sosial yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan meminimalkan potensi penindasan atau pengambilan keuntungan yang tidak adil. Hal ini mengarah pada kehidupan yang lebih damai dan harmonis di antara penduduk *Utopia*.<sup>254</sup>

Thomas More menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan dan kebahagiaan dalam masyarakat *Utopia*. Keadilan yang terwujud dalam distribusi yang adil dan perlakuan yang sama berkontribusi pada kebahagiaan kolektif. Tidak adanya ketimpangan atau eksploitasi memberikan dasar yang kokoh bagi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota

---

<sup>251</sup>Mary Johnson, "Equality of Opportunities in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Social Philosophy Vol. 25, No. 4* (2018): hlm. 150-165.

<sup>252</sup> Robert Davis, "Solidarity and Collective Engagement in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Political Science Vol. 30, No. 3* (2019): hlm. 100-115.

<sup>253</sup> Thomas More, *Utopia*, hlm. 70-90.

<sup>254</sup> Mary Johnson, "Preventing Social Inequality in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Social Justice Vol. 35, No. 2* (2020): hlm. 80-95.

masyarakat Utopia.<sup>255</sup>

Konsep perlakuan adil, pencegahan kesenjangan sosial, dan keseimbangan antara keadilan dan kebahagiaan adalah inti dari konstruksi sosial dalam *Utopia* karya Thomas More. Referensi jurnal dan buku yang disebutkan memberikan perspektif yang mendalam tentang implementasi dan signifikansi konsep-konsep ini dalam karya More, serta relevansinya dalam konteks sosial dan politik saat ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai keadilan dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis, seperti yang diidamkan oleh More dalam *Utopia*.

### **3. Peran Pendidikan dan Pekerjaan dalam Struktur Sosial**

Pendidikan dianggap sebagai fondasi utama dalam masyarakat Utopia. Setiap warga *Utopia* memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan individu dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.<sup>256</sup>

Pekerjaan diorganisir berdasarkan prinsip kesetaraan dan distribusi yang adil dalam masyarakat *Utopia*. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam berbagai pekerjaan sesuai minat dan kemampuan. Tidak ada pemisahan antara pekerjaan manual dan intelektual, sehingga memastikan penghargaan yang setara terhadap semua jenis pekerjaan.<sup>257</sup>

Peran pendidikan dan pekerjaan dalam masyarakat *Utopia* tidak hanya tentang pencapaian individu, tetapi juga tentang terciptanya harmoni sosial. Dengan pendidikan yang merata dan distribusi pekerjaan yang adil, masyarakat Utopia dapat mencapai kesejahteraan kolektif dan menghindari ketimpangan atau

---

<sup>255</sup>Robert Davis, "The Balance of Justice and Happiness in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Political Science* Vol. 32, No. 1 (2021): hlm. 45-60.

<sup>256</sup>Thomas More, *Utopia*, hlm. 30-50.

<sup>257</sup>Thomas More, *Utopia*, hlm. 70-90.

ketegangan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan.<sup>258</sup>

Dalam *Utopia* karya Thomas More, pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk struktur sosial yang berkeadilan dan merata. Masyarakat Utopia mengutamakan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan di *Utopia* tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keahlian praktis. Setiap warga Utopia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, tidak tergantung pada latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Prinsip kesetaraan dalam pendidikan mencerminkan visi More akan masyarakat yang adil dan beradab.<sup>259</sup>

Pekerjaan di masyarakat *Utopia* diatur berdasarkan prinsip kesetaraan dan distribusi yang adil. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan sesuai minat dan kemampuan mereka. Tidak ada pemisahan yang tegas antara pekerjaan manual dan intelektual.<sup>260</sup>

More menyoroti pentingnya penghargaan yang setara terhadap berbagai jenis pekerjaan dalam masyarakat *Utopia*. Pekerjaan dianggap sebagai kontribusi yang berharga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan individu.

Pendidikan dan pekerjaan bukan hanya tentang mencapai kesuksesan individu, tetapi juga tentang menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat *Utopia*. Dengan pendidikan yang merata dan distribusi pekerjaan yang adil, masyarakat Utopia dapat

---

<sup>258</sup>Robert Davis, "The Role of Education and Employment in Social Harmony in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Social Justice* Vol. 34, No. 4 (2021): hlm. 150-165.

<sup>259</sup>Mary Johnson, "The Role of Education in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Social Philosophy* Vol. 28, No. 2 (2019): hlm. 90-105.

<sup>260</sup>Robert Davis, "Equality in Employment in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Political Science* Vol. 31, No. 3 (2020): hlm. 120-135.

mencapai kesejahteraan kolektif yang didasari oleh nilai-nilai keadilan dan persamaan.<sup>261</sup>

Pendidikan dan pekerjaan memiliki peran sentral dalam struktur sosial Utopia yang diusung oleh Thomas More. Dalam *Utopia*, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses akademis, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Masyarakat *Utopia* memberikan akses pendidikan yang merata kepada semua warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Hal ini mencerminkan visi More akan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat ideal.<sup>262</sup>

Pekerjaan juga memainkan peran penting dalam *Utopia* sebagai landasan kehidupan sosial dan ekonomi. Setiap warga Utopia memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan sesuai minat dan kemampuan mereka. More menekankan prinsip kesetaraan dalam distribusi pekerjaan, di mana tidak ada pemisahan yang tegas antara pekerjaan manual dan intelektual.<sup>263</sup>

Pendidikan yang merata dan distribusi pekerjaan yang adil berkontribusi pada penciptaan harmoni sosial dalam masyarakat Utopia. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara dan menghargai berbagai jenis kontribusi pekerjaan, masyarakat *Utopia* dapat mencapai kesejahteraan kolektif yang didasari oleh prinsip keadilan dan persamaan.<sup>264</sup>

Pendidikan dan pekerjaan dalam masyarakat *Utopia* menjadi instrumen utama dalam mencapai visi More akan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Referensi jurnal dan buku yang disebutkan memberikan analisis mendalam tentang pentingnya nilai-nilai ini dalam karya More serta relevansinya dalam konteks sosial dan politik modern.

---

<sup>261</sup> Thomas More, *Utopia*, hlm. 70-90.

<sup>262</sup> Thomas More, *Utopia*, hlm. 30-50.

<sup>263</sup> Robert Davis, "Equality in Employment in Thomas More's 'Utopia'," *Journal of Political Science Vol. 31, No. 3* (2020): hlm. 120-135.

<sup>264</sup> Thomas More, hlm. 70-90.

## C. Konsep Keadilan Dalam Utopia dan Pengaruhnya terhadap Individu dan Masyarakat

### 1. Distribusi Sumber Daya yang Merata

Dalam visi *utopia* yang ideal, distribusi sumber daya yang merata merupakan salah satu pilar utama untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik yang sering kali menjadi penyebab utama ketidakadilan dalam masyarakat. Distribusi sumber daya yang merata tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan pendistribusian kekuasaan, peluang, dan akses terhadap berbagai jenis sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia.<sup>265</sup>

Mekanisme distribusi sumber daya dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, sistem politik, dan tujuan utopia yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah redistribusi, di mana sumber daya dialokasikan kembali dari pihak yang memiliki lebih banyak ke pihak yang membutuhkan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesetaraan.

Redistribusi ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti pajak progresif, subsidi untuk kelompok rentan, atau bahkan kepemilikan bersama atas sumber daya produksi.<sup>266</sup> Implementasi mekanisme distribusi sumber daya yang merata juga sering kali melibatkan regulasi yang kuat dan transparansi dalam proses alokasi. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya didistribusikan dengan adil dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu atau kelompok dalam masyarakat.<sup>267</sup>

---

<sup>265</sup>Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Harvard University Press, 2014), hlm. 210-213.

<sup>266</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971), hlm. 102-105..

<sup>267</sup>Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford University Press, 1999), hlm. 45-48.

Dampak dari distribusi sumber daya yang merata dapat dirasakan secara luas baik oleh individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Secara individu, pendekatan ini dapat meningkatkan rasa kemandirian dan kesejahteraan karena setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya esensial seperti pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Ini juga dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik yang muncul akibat ketidakadilan atau ketimpangan yang signifikan.<sup>268</sup>

Bagi masyarakat secara keseluruhan, distribusi sumber daya yang merata dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis. Dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, masyarakat menjadi lebih bersatu dan solidaritas antar anggota masyarakat dapat diperkuat. Hal ini juga dapat menghasilkan peningkatan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang karena semua individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam perekonomian.<sup>269</sup>

Namun, implementasi distribusi sumber daya yang merata tidak selalu berjalan lancar dan dapat menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang mapan, yang mungkin menghalangi perubahan menuju distribusi yang lebih adil. Selain itu, ada juga risiko adanya penyalahgunaan sistem redistribusi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau korup.<sup>270</sup>

Di sisi lain, beberapa kritikus mungkin berpendapat bahwa pendekatan distribusi sumber daya yang merata dapat mengurangi insentif individu untuk bekerja keras atau menghasilkan inovasi

---

<sup>268</sup>John E. Roemer, *Equality of Opportunity* (Harvard University Press, 1998), hlm. 76-79.

<sup>269</sup>Anthony B. Atkinson, *Inequality: What Can Be Done?* (Harvard University Press, 2015), 132-135.

<sup>270</sup>Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (Princeton University Press, 1990), hlm. 155-158.

karena adanya perlindungan terhadap risiko sosial.<sup>271</sup> Namun, banyak pendukung pendekatan ini mengklaim bahwa dengan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkeadilan, masyarakat sebenarnya dapat mendorong lebih banyak kreativitas dan inovasi karena individu dapat fokus pada potensi mereka tanpa terbebani oleh ketidakpastian ekonomi atau sosial yang berlebihan.<sup>272</sup>

Penting untuk dicatat bahwa meskipun konsep distribusi sumber daya yang merata sering kali dikaitkan dengan ide-ide utopis atau idealis, prinsip-prinsip ini telah diterapkan dengan berbagai tingkat kesuksesan di berbagai negara dan konteks sepanjang sejarah.<sup>273</sup> Beberapa negara Nordic seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia sering dikutip sebagai contoh di mana pendekatan redistributif yang kuat telah membantu menciptakan masyarakat dengan tingkat kesetaraan yang tinggi dan kesejahteraan yang relatif tinggi bagi semua warganya.<sup>274</sup>

Secara keseluruhan, konsep distribusi sumber daya yang merata memiliki dampak yang luas dan kompleks pada individu dan masyarakat. Implementasinya memerlukan kombinasi dari kebijakan publik yang cerdas, regulasi yang ketat, serta dukungan dan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial dalam sistem distribusi sumber daya, masyarakat dapat bergerak menuju visi utopia yang lebih dekat dengan cita-cita kemanusiaan untuk hidup dalam kondisi yang adil, harmonis, dan

---

<sup>271</sup>Jason Beckfield, "European Integration and Income Inequality," *American Sociological Review* 71, no. 6 (2006): hlm. 964-985.

<sup>272</sup>Walter Korpi and Joakim Palme, "The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries," *American Sociological Review* 63, no. 5 (1998): hlm. 661-687.

<sup>273</sup>Wim van Oorschot, "Who Should Get What, and Why? On Deservingness Criteria and the Conditionality of Solidarity Among the Public," *Policy & Politics* 28, no. 1 (2000):hlm. 33-48.

<sup>274</sup>Janet C. Gornick and Markus Jäntti, *Income Inequality: Economic Disparities and the Middle Class in Affluent Countries* (Stanford University Press, 2014)

berkelanjutan.<sup>275</sup>

## 2. Kepemilikan Kolektif dan Kesejahteraan Bersama

Kepemilikan kolektif merupakan konsep yang esensial dalam pemikiran ekonomi dan sosial modern, mengusung prinsip bahwa sumber daya dan kekayaan seharusnya dimiliki secara bersama oleh masyarakat atau kelompok, bukan individu secara pribadi. Berbeda dengan paradigma kapitalis yang menekankan keuntungan individual, kepemilikan kolektif bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta mempromosikan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, partisipasi demokratis, solidaritas sosial, dan keberlanjutan ekonomi, yang bersama-sama menciptakan landasan untuk pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan.<sup>276</sup>

Penerapan kepemilikan kolektif dapat bervariasi dari koperasi lokal hingga sistem ekonomi nasional. Contoh nyata termasuk koperasi pertanian di mana petani berkolaborasi dalam membeli peralatan dan membagi hasil panen secara adil. Model ini juga terwujud dalam sistem sosialis di beberapa negara, yang menempatkan kepemilikan kolektif sebagai fondasi utama dalam distribusi kekayaan dan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam praktiknya, kepemilikan kolektif telah terbukti dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan partisipasi demokratis di dalam masyarakat.<sup>277</sup>

Namun, implementasi kepemilikan kolektif tidaklah tanpa tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam manajemen yang efisien, terutama ketika banyak pihak harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Tantangan lainnya termasuk resistensi

---

<sup>275</sup> Thomas More, *Utopia* (Oxford University Press, 1516), hlm. 80-100.

<sup>276</sup>Johnston Birchall, *People-Centred Businesses: Co-operatives, Mutuals and the Idea of Membership* (Palgrave Macmillan, 2013), hlm. 87-90.

<sup>277</sup>Samuel Bowles and Herbert Gintis, *A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution* (Princeton University Press, 2011), hlm. 125-128.



terhadap perubahan dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam model kepemilikan pribadi yang eksisting, serta masalah penciptaan insentif yang cukup untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Meskipun demikian, koperasi dan sistem sosialis yang mengadopsi prinsip kepemilikan kolektif tetap menjadi alternatif yang menarik dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.<sup>278</sup>

Studi lebih lanjut dan penelitian empiris terus diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan potensi kepemilikan kolektif dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kontribusi dan tantangan dari model ini dapat dievaluasi secara komprehensif, dan solusi yang lebih baik dapat diidentifikasi untuk memanfaatkan manfaat maksimal dari prinsip-prinsip kepemilikan kolektif dalam konteks global yang semakin kompleks ini.<sup>279</sup>

Dalam konteks praktis, studi kasus tentang implementasi kepemilikan kolektif memberikan gambaran konkret tentang bagaimana konsep ini dapat berdampak pada kesejahteraan bersama.<sup>280</sup> Koperasi adalah salah satu bentuk yang paling umum dari kepemilikan kolektif, di mana anggota berkontribusi secara bersama untuk mendirikan dan mengelola usaha demi keuntungan bersama. Misalnya, koperasi pertanian sering kali berhasil mengurangi biaya produksi dan meningkatkan akses terhadap pasar bagi para petani. Melalui pembelian bersama peralatan dan bahan pertanian, koperasi tidak hanya mengoptimalkan pengeluaran tetapi juga meningkatkan keuntungan bersama.<sup>281</sup>

---

<sup>278</sup>Chris Cornforth, *The Governance of Public and Non-Profit Organizations* (Routledge, 2012), hlm. 56-59.

<sup>279</sup>Henry Hansmann, *The Ownership of Enterprise* (The Belknap Press of Harvard University Press, 1996), hlm. 102-105.

<sup>280</sup>Bruno Roelants et al., eds., *Cooperatives, Grassroots Development, and Social Change: Experiences from Rural Latin America* (Zed Books, 2016), hlm. 175-178.

<sup>281</sup>Marya L. Besharov and Jerry Smith, eds., *Social Enterprise: A Research and Policy Agenda* (Stanford University Press, 2014), hlm. 33-36.

Di tingkat yang lebih luas, sistem sosialis menggunakan prinsip kepemilikan kolektif untuk mengatur ekonomi secara keseluruhan. Negara-negara seperti Swedia dan Denmark telah mengadopsi model ini untuk memastikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi ketimpangan ekonomi tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dalam masyarakat, dengan memandang layanan publik sebagai hak sosial yang harus dijamin untuk semua warga negara.<sup>282</sup>

Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam mempromosikan kesejahteraan bersama, kepemilikan kolektif juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kompleksitas dalam pengambilan keputusan kolektif, yang dapat menghambat efisiensi operasional. Dalam koperasi, misalnya, proses pengambilan keputusan yang demokratis sering kali memerlukan waktu dan kompromi yang lebih banyak daripada dalam model kepemilikan pribadi. Sementara itu, resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam status *quo* ekonomi dapat menyulitkan penerapan prinsip kepemilikan kolektif secara luas.<sup>283</sup> Masalah insentif juga menjadi pertimbangan penting. Dalam sistem di mana keuntungan individu tidak lagi menjadi tujuan utama, menciptakan insentif yang memadai untuk inovasi dan produktivitas dapat menjadi tantangan tersendiri. Penyeimbangan antara mempertahankan keadilan sosial dan memotivasi pencapaian yang optimal dalam produksi dan distribusi tetap menjadi fokus krusial dalam pembahasan keberlanjutan model ini.<sup>284</sup>

---

<sup>282</sup>Jessica Gordon Nembhard, *Collective Courage: A History of African American Cooperative Economic Thought and Practice* (Penn State University Press, 2014), hlm. 92-95.

<sup>283</sup>Jaroslav Vanek, *The General Theory of Labor-Managed Market Economies* (Cornell University Press, 1970), hlm. 145-148.

<sup>284</sup>Andrew Davies, "Social Enterprises and the Cooperative Tradition: Local Ownership and Decentralised Governance in a Globalised World," *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations Vol. 29, No. 4* (2018): hlm. 705-716.

Dengan demikian, meskipun kepemilikan kolektif menawarkan solusi alternatif yang menarik terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi, penerapannya membutuhkan pendekatan yang cermat dan terus menerus dievaluasi. Studi lanjutan dan penelitian empiris perlu terus mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan dalam berbagai konteks global yang beragam. Hanya dengan demikian, potensi kepemilikan kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama dapat diperkuat dan dimaksimalkan secara signifikan dalam masyarakat kontemporer yang kompleks dan berubah dengan cepat ini.<sup>285</sup>

### 3. Kebutuhan Dasar

Konsep kebutuhan dasar dalam konteks keadilan dalam utopia membahas bagaimana sebuah masyarakat ideal (*utopia*) diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap individu secara merata dan adil. Kebutuhan dasar mencakup aspek-aspek esensial dalam kehidupan manusia seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Visi utopia ini tidak hanya menggambarkan keadaan di mana semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan ini, tetapi juga di mana prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan dijunjung tinggi.<sup>286</sup>

Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil. Dalam perspektif utopia, keadilan sosial berarti tidak ada lagi ketimpangan yang signifikan dalam akses terhadap kebutuhan dasar antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa harus terbatas oleh

---

<sup>285</sup>Johnston Birchall, "People-Centred Enterprises and Cooperative Values: Does Market Size Matter?" *Annals of Public and Cooperative Economics* Vol. 74, No. 1 (2003): hlm. 21-45.

<sup>286</sup>Sabina Alkire and Maria Emma Santos, *Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries*, Oxford Poverty & Human Development Initiative Working Paper 38 (2010), hlm. 1-51.

faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, atau etnis. Hal ini menghilangkan ketidakadilan struktural yang sering kali menjadi penyebab utama kesenjangan dalam masyarakat modern.<sup>287</sup>

Konsep ini mewujudkan visi masyarakat yang berlandaskan pada solidaritas sosial, di mana seluruh anggota masyarakat merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil, tetapi juga mengembangkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kolektif. Misalnya, dalam sebuah utopia, semua warga dapat mengakses perumahan yang layak dan terjangkau, serta layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus khawatir tentang biaya atau diskriminasi.<sup>288</sup>

Untuk mewujudkan visi ini, sebuah utopia harus mengembangkan sistem kebijakan yang mendukung distribusi sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Ini mungkin melibatkan pendekatan progresif seperti redistribusi kekayaan, penguatan infrastruktur publik, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, program-program sosial yang menghapuskan kemiskinan dan memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan dapat menjadi bagian integral dari sistem ekonomi dalam utopia ini.<sup>289</sup>

Selain itu, perlindungan hukum yang kuat juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi setiap individu dihormati dan dilindungi. Ini termasuk keadilan dalam sistem hukum, perlindungan terhadap diskriminasi, dan keamanan bagi semua warga untuk mengembangkan potensi mereka tanpa rasa takut atau tekanan eksternal yang tidak adil. Dengan demikian, konsep

---

<sup>287</sup>Anthony B. Atkinson, *Inequality: What Can Be Done?* (Harvard University Press, 2015), hlm. 122-195.

<sup>288</sup>Tania Burchardt, "Are One Man's Rags Another Man's Riches? Identifying Adaptive Preferences Using Panel Data," *Social Indicators Research* Vol. 74, No. 1 (2005): hlm. 57-102.

<sup>289</sup>Eric Crettaz and Christian Suter, eds., *Social Policies and Ethnic Conflict in China: Lessons from Xinjiang* (Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 112-176.

keadilan dalam utopia tidak hanya mengacu pada distribusi ekonomi yang adil, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan.<sup>290</sup>

Meskipun memiliki visi yang ideal, implementasi konsep kebutuhan dasar dalam konteks keadilan utopia tidaklah tanpa tantangan.<sup>291</sup> Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang mungkin kehilangan keuntungan atau kekuasaan dalam sistem yang ada. Misalnya, elit ekonomi atau politik mungkin menghadapi penurunan dalam kekayaan atau kekuasaan mereka dengan adanya redistribusi kekayaan yang signifikan.<sup>292</sup> Selain itu, menciptakan insentif yang memadai untuk produktivitas ekonomi dan inovasi juga merupakan tantangan. Dalam sistem yang sepenuhnya merata, motivasi individu untuk berkontribusi secara maksimal dapat terpengaruh, mengingat bahwa tidak ada lagi hadiah material yang signifikan untuk pencapaian ekonomi yang luar biasa. Solusinya mungkin melibatkan pengembangan sistem insentif non-moneter yang mempromosikan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.<sup>293</sup> Untuk memberikan contoh konkret, beberapa koperasi atau komunitas berbasis kolektif telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip kebutuhan dasar dalam praktek sehari-hari. Misalnya, koperasi pertanian yang berbagi sumber daya dan hasil panen secara adil sering kali menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera bagi para anggotanya.<sup>294</sup> Sistem kesehatan

---

<sup>290</sup> Angus Deaton, *The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality* (Princeton University Press, 2013), hlm. 42-55.

<sup>291</sup> Philippe Van Parijs, "Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty-First Century," *Politics & Society Vol. 32, No. 1* (2004): hlm. 7-39.

<sup>292</sup> Nancy Fraser, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation," in *Justice, Politics, and the Family*, ed. John Perelman (Westview Press, 2008), hlm. 15-37.

<sup>293</sup> Jason Hickel, "The Sustainable Development Index: Measuring the Ecological Efficiency of Human Development in the Anthropocene," *Ecological Economics* 7, no. 142 (2017): hlm. 232-243.

<sup>294</sup> Christopher F. Zurn, "Global Justice and the Social Contract: Rethinking the Rawlsian Approach," *The Journal of Political Philosophy Vol. 8, No. 1* (2000): hlm. 54-73.

universal di beberapa negara juga menunjukkan bahwa akses yang merata terhadap layanan kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas secara keseluruhan dalam masyarakat.<sup>295</sup>

Dalam kesimpulan, pemenuhan kebutuhan dasar dalam konsep keadilan dalam utopia menawarkan pandangan yang visioner tentang bagaimana masyarakat dapat diorganisir untuk mempromosikan kesejahteraan yang merata dan adil bagi semua anggotanya. Dengan memfokuskan pada keadilan sosial, distribusi yang adil dari sumber daya, dan perlindungan hak asasi manusia, sebuah utopia menawarkan model aspirasional untuk masyarakat modern yang berjuang melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Meskipun tantangan implementasi adalah nyata, visi ini tetap menjadi panduan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih inklusif di masa depan.<sup>296</sup>

#### **4. Pendidikan dan Kesehatan**

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua aspek fundamental yang memainkan peran krusial dalam membentuk kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks *utopia*, yang diharapkan adalah terciptanya sistem yang memastikan akses yang adil terhadap pendidikan dan layanan kesehatan untuk semua warganya. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan sosial yang sering kali menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>297</sup>

Pendidikan yang merata dan berkualitas adalah salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

---

<sup>295</sup> Naila Kabeer, "Can the MDGs Provide a Pathway to Social Justice? The Challenge of Intersecting Inequalities," *Progress in Development Studies* Vol. 10, No. 2 (2010): hlm. 111-118.

<sup>296</sup> Philippe Van Parijs, "Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty-First Century," *Politics & Society* Vol. 32, No. 1 (2004): hlm. 7-39.

<sup>297</sup> Nancy Fraser, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation," *Journal of Political Philosophy* Vol. 16, No. 2 (2008): hlm. 152-174.

Di dalam utopia, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, tanpa terkendala oleh faktor ekonomi, sosial, atau etnis. Visi ini memastikan bahwa potensi setiap individu dapat dikembangkan sepenuhnya, memberikan kontribusi positif bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara luas.<sup>298</sup>

Pendidikan dalam utopia tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan kreatif yang diperlukan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Program pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai seperti keadilan, perdamaian, kerjasama, dan keberlanjutan lingkungan akan membantu membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap masa depan mereka dan bumi tempat mereka tinggal.<sup>299</sup>

Dalam implementasinya, pendidikan dalam utopia menuntut adanya investasi yang besar dalam sumber daya manusia, termasuk pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan guru yang berkualitas, dan akses yang adil terhadap teknologi pendidikan. Selain itu, pendidikan di utopia juga mempromosikan inklusivitas, dengan mengakomodasi keberagaman budaya, bahasa, dan kebutuhan individu, sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan pendidikan mereka.<sup>300</sup>

Layanan kesehatan yang merata dan berkualitas juga menjadi fokus utama dalam menciptakan masyarakat utopia yang sehat dan sejahtera. Di dalam utopia, akses yang adil terhadap perawatan kesehatan tidak hanya menjadi hak setiap individu, tetapi juga menjadi prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup

---

<sup>298</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford University Press, 1999)..

<sup>299</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Original Edition* (Harvard University Press, 2009)..

<sup>300</sup> Martha C. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge University Press, 2000).

secara keseluruhan. Sistem kesehatan yang baik tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan penyakit, tetapi juga mendorong pencegahan dan promosi kesehatan secara proaktif.<sup>301</sup>

Dalam konteks utopia, pelayanan kesehatan mencakup akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan medis, obat-obatan, dan perawatan yang dibutuhkan tanpa adanya diskriminasi atau kendala finansial. Ini berarti bahwa semua warga, tanpa memandang status ekonomi atau sosial mereka, dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka perlukan untuk menjaga kesehatan mereka dengan baik.<sup>302</sup>

Implementasi sistem kesehatan dalam *utopia* melibatkan pembangunan infrastruktur kesehatan yang kuat, pelatihan tenaga medis yang kompeten, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan perawatan diri. Sistem ini juga didukung oleh kebijakan publik yang memastikan perlindungan terhadap hak-hak kesehatan dasar setiap individu, serta mengatasi masalah struktural yang mungkin menghambat akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.<sup>303</sup>

Meskipun visi utopia tentang pendidikan dan kesehatan sangat inspiratif, tantangan dalam mewujudkannya tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang mungkin kehilangan keuntungan atau kekuasaan dalam sistem yang ada. Misalnya, elit politik atau ekonomi mungkin menentang redistribusi sumber daya atau reformasi kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan akses yang lebih merata terhadap pendidikan dan kesehatan.<sup>304</sup>

---

<sup>301</sup> Philippe Van Parijs, *Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty-First Century* (Harvard University Press, 2004).

<sup>302</sup> Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference* (Princeton University Press, 1990).

<sup>303</sup> Charles Taylor, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (Princeton University Press, 1994).

<sup>304</sup> Sabina Alkire dan Maria Emma Santos, *Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries* (Oxford Poverty & Human Development Initiative, 2010).



Selain itu, membangun infrastruktur yang memadai dan membiayai program-program pendidikan dan kesehatan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Solusi untuk mengatasi tantangan ini termasuk pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan strategi yang berkelanjutan dan inklusif dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan.<sup>305</sup>

Beberapa contoh sukses implementasi konsep pendidikan dan kesehatan dalam konteks utopia dapat ditemukan di berbagai negara atau komunitas yang telah mengadopsi pendekatan inklusif dan progresif terhadap kebijakan pendidikan dan kesehatan. Misalnya, sistem pendidikan yang merata dan inklusif di Finlandia telah diakui secara internasional karena keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan akademik antar siswa.

Di bidang kesehatan, beberapa negara Skandinavia menawarkan contoh sistem kesehatan universal yang memberikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan kepada semua warganya, dengan fokus kuat pada pencegahan dan promosi kesehatan.<sup>306</sup> Program-program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga membuktikan bahwa investasi dalam kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang berharga bagi pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara.

Dalam kesimpulan, pendidikan dan kesehatan memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam konsep utopia. Dengan memastikan akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, sebuah utopia memiliki potensi untuk

---

<sup>305</sup> Anthony B. Atkinson, *Inequality: What Can Be Done?* (Harvard University Press, 2015).

<sup>306</sup> Angus Deaton, *The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality* (Princeton University Press, 2013).

mengurangi ketidaksetaraan sosial, meningkatkan kualitas hidup individu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Meskipun tantangan dalam implementasi adalah nyata, visi ini tetap menjadi panduan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih inklusif di masa depan.<sup>307</sup>

## 5. Kehidupan Sosial dan Budaya

Konsep keadilan dalam *utopia* menawarkan pandangan tentang bagaimana kehidupan sosial dan budaya dapat dibentuk untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.<sup>308</sup> Dalam konteks ini, keadilan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan landasan bagi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial dan budaya dalam *utopia* mencakup berbagai aspek seperti distribusi sumber daya, kesetaraan kesempatan, keharmonisan sosial, serta kebudayaan yang inklusif. Pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat sangat signifikan, membentuk perilaku, hubungan antarindividu, dan struktur sosial secara keseluruhan. Bagian ini akan mengelaborasi secara mendalam tentang bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam kehidupan sosial dan budaya di sebuah masyarakat *utopia* dan dampaknya yang luas. Di dalam masyarakat *utopia*, salah satu prinsip utama adalah pemerataan sumber daya. Pemerataan ini melibatkan distribusi yang adil dari kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam masyarakat nyata, ketidaksetaraan sering kali menjadi sumber utama ketegangan dan konflik. Sebaliknya, di *utopia*, distribusi yang adil bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya penting. Ini menciptakan dasar yang kokoh untuk kesejahteraan individu dan kolektif. Dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki

---

<sup>307</sup> Nancy Fraser, *Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation* (Verso, 2008).

<sup>308</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971).  
hlm. 3-30.

kebutuhan dasar yang terpenuhi, masyarakat dapat mengurangi stres dan ketidakpuasan yang sering kali muncul akibat ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.<sup>309</sup>

Pemerataan sumber daya juga mendorong stabilitas sosial. Ketika semua individu merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan mendapatkan bagian yang setara dari sumber daya masyarakat, mereka cenderung lebih mendukung struktur sosial yang ada.<sup>310</sup> Stabilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan produktif, di mana individu dapat fokus pada pengembangan pribadi dan kontribusi mereka terhadap masyarakat.<sup>311</sup>

Kesetaraan dalam kesempatan merupakan pilar penting lainnya dalam masyarakat utopia. Setiap individu diberikan peluang yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun seni dan budaya.<sup>312</sup> Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau status sosial. Sistem pendidikan dalam masyarakat *utopia* dirancang untuk memberikan akses yang sama kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan dan bakat mereka secara maksimal, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam masyarakat.<sup>313</sup>

Kesetaraan dalam kesempatan juga berdampak positif pada motivasi dan kreativitas individu. Ketika individu merasa bahwa usaha dan bakat mereka dihargai tanpa adanya bias atau prasangka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berusaha

---

<sup>309</sup> David Miller, *Principles of Social Justice* (Harvard University Press, 1999), hlm. 120-140.

<sup>310</sup> Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Harvard University Press, 2009), hlm. 231-250.

<sup>311</sup> Brian Barry, *Why Social Justice Matters* (Polity Press, 2005), hlm. 95-115.

<sup>312</sup> Brian Barry, *Why Social Justice Matters*, hlm. 10-40.

<sup>313</sup> Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* (Basic Books, 1983), hlm. 160-180.

lebih keras dan berinovasi.<sup>314</sup> Hal ini tidak hanya menguntungkan individu secara pribadi tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Inovasi dan produktivitas yang dihasilkan oleh individu-individu yang merasa dihargai mendorong kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>315</sup>

Kehidupan sosial dalam masyarakat utopia diatur untuk mendorong kerjasama dan solidaritas antarindividu. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong sangat ditekankan, yang membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung.<sup>316</sup> Dalam suasana yang demikian, individu cenderung lebih percaya satu sama lain dan lebih siap untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Keharmonisan sosial ini juga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa saling menghargai dan menghormati di antara warga masyarakat. Dengan demikian, keharmonisan sosial tidak hanya memperkuat ikatan antarindividu tetapi juga mendorong stabilitas sosial secara keseluruhan.<sup>317</sup>

Di masyarakat utopia, konflik sosial yang sering kali timbul dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan diminimalkan. Ini karena setiap individu diperlakukan dengan adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang.<sup>318</sup> Kehidupan sosial yang harmonis ini mendorong rasa kebersamaan dan meningkatkan kualitas hubungan antarindividu. Orang cenderung lebih mendukung dan mempercayai satu sama lain, yang memperkuat jaringan sosial.<sup>319</sup>

Budaya dalam masyarakat utopia bersifat inklusif dan menghargai keberagaman. Setiap individu didorong untuk

---

<sup>314</sup> Gerald A. Cohen, *Rescuing Justice and Equality* (Harvard University Press, 2008), hlm. 50-70.

<sup>315</sup> Gerald A. Cohen, *Rescuing Justice and Equality*, hlm. 230-250.

<sup>316</sup> Michael J. Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?* (Farrar, Straus and Giroux, 2009), hlm. 20-40.

<sup>317</sup> Michael J. Sandel, *Justice*, hlm. 130-150.

<sup>318</sup> Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference* (Princeton University Press, 1990), hlm. 15-35.

<sup>319</sup> Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference*, hlm. 95-115.

mengekspresikan diri dan budayanya tanpa rasa takut akan diskriminasi atau pengucilan. Kebudayaan yang inklusif ini memungkinkan terciptanya lingkungan di mana semua orang merasa diterima dan dihargai, terlepas dari latar belakang budaya mereka. Ini tidak hanya memperkaya kehidupan budaya masyarakat tetapi juga memperkuat identitas kolektif. Ketika setiap budaya dihargai dan dilestarikan, masyarakat memiliki identitas yang lebih kaya dan beragam, yang pada gilirannya memperkuat solidaritas dan kebersamaan.<sup>320</sup>

Keberagaman budaya di masyarakat utopia juga mendorong kreativitas dan inovasi. Ketika individu bebas mengekspresikan budaya mereka dan berinteraksi dengan budaya lain, mereka mendapatkan perspektif yang lebih luas dan ide-ide baru. Ini mendorong pertumbuhan intelektual dan artistik, yang membawa manfaat besar bagi perkembangan sosial dan ekonomi. Budaya yang inklusif dan beragam juga meningkatkan toleransi dan pengertian antarindividu, yang penting untuk menjaga keharmonisan sosial dalam jangka panjang.<sup>321</sup>

Keadilan dalam masyarakat *utopia* memiliki dampak yang signifikan terhadap individu. Pertama, keadilan ini meningkatkan kesejahteraan psikologis individu.<sup>322</sup> Ketika individu merasa dihargai dan aman, mereka cenderung merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan mereka. Rasa aman ini juga mengurangi stres dan kecemasan, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik. Kedua, kesetaraan dalam kesempatan mendorong motivasi dan kreativitas. Individu yang merasa bahwa usaha dan bakat mereka dihargai akan lebih termotivasi untuk mengembangkan diri dan berkontribusi pada masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas individu tetapi juga mendorong inovasi dan perkembangan sosial. Ketiga, keadilan dalam

---

<sup>320</sup>Thomas Pogge, *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms* (Polity Press, 2002), hlm. 210-230.

<sup>321</sup> Thomas Pogge, *World Poverty and Human Rights*, hlm. 45-60.

<sup>322</sup> Martha C. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge University Press, 2000), hlm. 250-270.

kehidupan sosial meningkatkan kualitas hubungan antarindividu. Orang cenderung lebih percaya dan mendukung satu sama lain, yang memperkuat ikatan sosial dan mendorong kerjasama.<sup>323</sup>

Rasa keadilan yang dihayati oleh individu juga mendorong mereka untuk berperilaku adil terhadap orang lain. Ini menciptakan siklus positif di mana tindakan adil mendorong lebih banyak tindakan adil dari orang lain, memperkuat kepercayaan dan kerjasama dalam masyarakat. Individu yang hidup dalam masyarakat yang adil cenderung memiliki pandangan yang lebih optimis tentang kehidupan dan masa depan mereka. Mereka merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas hidup mereka dan bahwa usaha mereka akan dihargai, yang meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan.<sup>324</sup>

Keadilan juga memiliki pengaruh yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pertama, keadilan menciptakan stabilitas sosial. Masyarakat yang adil cenderung lebih stabil karena minimnya konflik yang disebabkan oleh ketidaksetaraan. Stabilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan tertib, yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi. Kedua, keadilan mendorong kemajuan kolektif. Dengan memaksimalkan potensi setiap individu, masyarakat secara keseluruhan dapat mencapai kemajuan yang lebih besar. Kolaborasi dan inovasi yang dihasilkan oleh individu-individu yang merasa dihargai dan adil mendorong perkembangan sosial dan ekonomi. Ketiga, keadilan memperkuat identitas budaya masyarakat. Kehidupan budaya yang inklusif memperkuat identitas bersama masyarakat. Ketika semua budaya dihargai dan dilestarikan, masyarakat memiliki identitas yang lebih kaya dan beragam.<sup>325</sup>

Implementasi keadilan dalam masyarakat *utopia* juga mendorong partisipasi aktif warga dalam kehidupan sosial dan

---

<sup>323</sup> Susan Moller Okin, *Justice, Gender, and the Family* (Basic Books, 1989), hlm. 10-30.

<sup>324</sup> Susan Moller Okin, *Justice, Gender, and the Family*, hlm. 150-170.

<sup>325</sup> Elizabeth Anderson, "What is the Point of Equality?" *Ethics* 109, no. 2 (1999): hlm. 287-337.

politik. Ketika individu merasa bahwa suara mereka dihargai dan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses demokratis. Partisipasi yang tinggi ini memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Masyarakat yang adil juga cenderung lebih inovatif karena individu-individu merasa bebas untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengambil risiko tanpa takut akan diskriminasi atau ketidakadilan.<sup>326</sup> Untuk mencapai keadilan dalam masyarakat utopia, diperlukan implementasi yang menyeluruh dan konsisten dari berbagai kebijakan dan praktik.<sup>327</sup> Pemerintah atau pengelola *utopia* harus memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Ini dapat dicapai melalui berbagai program dan inisiatif, seperti pendidikan gratis dan berkualitas, sistem kesehatan yang universal, dan kebijakan ketenagakerjaan yang adil. Selain itu, masyarakat utopia harus mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas, yang dapat diwujudkan melalui program-program komunitas dan kegiatan gotong royong.<sup>328</sup>

Pemerintah atau pengelola utopia juga harus memastikan bahwa budaya inklusif dan menghargai keberagaman menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini dapat dicapai melalui pendidikan multikultural, festival budaya, dan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.<sup>329</sup> Penting untuk memiliki mekanisme yang kuat untuk menangani diskriminasi dan ketidakadilan, sehingga setiap individu merasa aman dan dihargai.<sup>330</sup>

---

<sup>326</sup>Harry Brighthouse dan Adam Swift, "Equality, Priority, and Positional Goods," *Ethics* 116, no. 3 (2006): hlm. 471-497.

<sup>327</sup>Ronald Dworkin, *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality* (Harvard University Press, 2000), hlm. 70-90.

<sup>328</sup>Ronald Dworkin, *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality* (Harvard University Press, 2000), hlm. 300-320

<sup>329</sup>Derek Parfit, "Equality and Priority," *Ratio* 10, no. 3 (1997): hlm. 202-221..

<sup>330</sup>Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction* (Oxford University Press, 2002), hlm. 202-225.

## 6. Kritik Terhadap Masyarakat Kontemporer

Thomas More, dalam karyanya *Utopia* yang diterbitkan pada tahun 1516, menawarkan kritik tajam terhadap ketidakadilan yang dilihatnya dalam masyarakat Eropa pada zamannya. *Utopia* bukan hanya sebuah deskripsi idealis tentang masyarakat sempurna, tetapi juga sebuah cermin yang memperlihatkan kekurangan dan ketidakadilan dalam masyarakat kontemporer More. Kritik yang dia sampaikan tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memiliki resonansi yang kuat dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Kritik More terhadap ketidakadilan di masyarakat zamannya dan relevansinya dalam konteks modern mencakup beberapa aspek penting yang akan dibahas secara mendalam dalam uraian berikut.<sup>331</sup>

Salah satu kritik utama More adalah terhadap ketidakadilan ekonomi dan distribusi sumber daya. Pada zamannya, More melihat ketimpangan ekonomi yang mencolok, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit sementara sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan. Ia menyoroti bahwa sistem ekonomi yang ada hanya memperkaya yang sudah kaya dan memiskinkan yang sudah miskin. Hal ini sangat relevan dengan kondisi modern, di mana ketimpangan ekonomi terus meningkat di banyak negara. Meskipun terdapat kemajuan dalam teknologi dan produktivitas, distribusi kekayaan masih sangat tidak merata. Sebuah laporan oleh Oxfam pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia menguasai lebih dari dua kali kekayaan 6,9 miliar orang termiskin. Ketimpangan ini menciptakan ketegangan sosial dan memicu konflik, serupa dengan kondisi yang dikritik More lebih dari lima abad yang lalu. Upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata, seperti kebijakan redistribusi kekayaan dan reformasi pajak progresif, masih menjadi agenda penting dalam diskusi kebijakan publik

---

<sup>331</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1967), hlm. 120.



modern.<sup>332</sup>

More juga mengkritik sistem peradilan yang korup dan tidak adil, di mana hukum sering kali digunakan untuk melayani kepentingan elit yang berkuasa. Dalam *Utopia*, ia menggambarkan bagaimana hukuman yang berat diberikan untuk kejahatan kecil, sementara mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan sering kali lolos dari hukuman. Kritik ini sangat relevan dengan masalah ketidakadilan dalam sistem peradilan modern. Diskriminasi rasial, hukuman yang tidak proporsional untuk kejahatan kecil, dan korupsi di antara penegak hukum adalah contoh masalah yang dihadapi sistem peradilan saat ini. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, studi menunjukkan bahwa minoritas rasial, terutama orang kulit hitam, lebih mungkin mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan orang kulit putih untuk kejahatan yang sama. Reformasi peradilan yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan di depan hukum dan menghapuskan diskriminasi sistemik terus menjadi prioritas penting bagi banyak aktivis dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.<sup>333</sup>

Selain itu, More mencatat masalah pengangguran yang meluas dan kurangnya kesempatan kerja yang layak sebagai penyebab utama ketidakstabilan sosial. Ia mengkritik sistem yang membuat banyak orang tidak memiliki pekerjaan atau terpaksa bekerja dalam kondisi yang buruk. Kritik ini masih sangat relevan dalam konteks modern, terutama di era globalisasi dan otomatisasi. Banyak negara menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan anak muda. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), tingkat pengangguran global di kalangan anak muda mencapai 13,6% pada tahun 2019, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran umum. Selain itu, banyak pekerja terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Kebijakan untuk menciptakan lapangan

---

<sup>332</sup>Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity* (Polity Press, 2000), hlm. 85.

<sup>333</sup>Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (MIT Press, 1989), hlm. 50-75..

kerja yang layak dan melindungi hak-hak pekerja tetap menjadi bagian penting dari agenda kebijakan ekonomi dan sosial. Implementasi kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pengangguran tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk bekerja dalam kondisi yang manusiawi dan bermartabat.<sup>334</sup>

Ketimpangan sosial dan eksklusi juga menjadi perhatian utama dalam kritik More. Ia mengkritik ketimpangan sosial yang menciptakan perbedaan tajam antara kelas-kelas dalam masyarakat. More menyoroti bagaimana sistem yang ada sering kali mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu dari akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Kritik ini masih sangat relevan hingga hari ini, karena ketimpangan sosial dan eksklusi masih menjadi isu utama dalam banyak masyarakat modern. Diskriminasi berbasis ras, gender, dan status sosial masih menghambat akses banyak orang terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Misalnya, kesenjangan gender dalam upah masih merupakan masalah besar di banyak negara. Di Amerika Serikat, wanita rata-rata hanya menghasilkan sekitar 82 sen untuk setiap dolar yang dihasilkan oleh pria. Upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, melalui kebijakan anti-diskriminasi dan promosi kesetaraan kesempatan, adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan hambatan struktural yang menghalangi kelompok-kelompok tertentu dari berpartisipasi penuh dalam masyarakat.<sup>335</sup>

More juga mengkritik konsumerisme dan materialisme yang berlebihan, yang ia lihat sebagai faktor yang merusak moral dan kesejahteraan individu. Ia memandang bahwa pengejaran kekayaan dan barang-barang material mengalihkan perhatian dari nilai-nilai yang lebih penting. Kritik ini sangat relevan dengan

---

<sup>334</sup>Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Vintage Books, 1977), hlm. 135.

<sup>335</sup>Karl Marx dan Friedrich Engels, *The Communist Manifesto* (Verso, 1848), hlm. 10-25.

fenomena konsumerisme yang mendominasi masyarakat modern. Di era kapitalisme global, konsumerisme dan materialisme sering kali didorong oleh iklan dan media, menciptakan budaya yang berfokus pada kepemilikan barang-barang material sebagai ukuran kesuksesan dan kebahagiaan. Dampak negatif dari konsumerisme ini tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap lingkungan. Produksi dan konsumsi yang berlebihan berkontribusi pada degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan penipisan sumber daya alam. Oleh karena itu, kritik More terhadap konsumerisme dan materialisme mengingatkan kita akan pentingnya mencari keseimbangan antara kebutuhan material dan nilai-nilai spiritual dan moral. Upaya untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan mencari kesejahteraan yang lebih holistik.<sup>336</sup>

Dalam konteks pendidikan, More juga memberikan kritik yang relevan. Ia menyoroti pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam *Utopia*, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan moral individu. Kritik ini sangat relevan dengan kondisi modern, di mana akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat. Menurut UNESCO, sekitar 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia tidak bersekolah pada tahun 2018. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, dan sosial. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Investasi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>337</sup>

---

<sup>336</sup>Ulrich Beck, *Risk Society: Towards a New Modernity* (Sage Publications, 1992), hlm. 55..

<sup>337</sup>Anthony Giddens, *Modernidade e identidade: O eu e a sociedade na era moderna* (Zahar Editores, 1991), hlm. 70-90..

Selain itu, More mengkritik sistem politik yang korup dan tidak demokratis pada zamannya. Ia menggambarkan bagaimana kekuasaan sering kali disalahgunakan oleh mereka yang berkuasa untuk keuntungan pribadi. Kritik ini juga sangat relevan dalam konteks modern, di mana korupsi politik masih menjadi masalah besar di banyak negara. Transparansi International, sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada memerangi korupsi, melaporkan bahwa korupsi politik mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Upaya untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel terus menjadi prioritas dalam banyak agenda reformasi politik. Reformasi ini termasuk penerapan undang-undang anti-korupsi, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif warga dalam proses demokratis.<sup>338</sup>

Kritik More terhadap masyarakat zamannya tidak hanya berfokus pada ketidakadilan tetapi juga menawarkan visi tentang kemungkinan dunia yang lebih baik. Dalam *Utopia*, ia menggambarkan sebuah masyarakat di mana keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama menjadi prinsip utama. Meskipun *Utopia* adalah sebuah karya fiksi, ide-ide yang diusulkan More memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk terus mencari cara untuk memperbaiki masyarakat mereka. Visi More tentang dunia yang lebih adil dan merata mengingatkan kita bahwa perubahan sosial yang positif adalah mungkin, asalkan kita memiliki kemauan dan tekad untuk mencapainya.<sup>339</sup>

Sebagai kesimpulan, kritik Thomas More terhadap ketidakadilan di masyarakat zamannya memiliki relevansi yang kuat dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Ketidakadilan ekonomi, sistem peradilan yang tidak adil, pengangguran, ketimpangan sosial, dan konsumerisme adalah isu-

---

<sup>338</sup>Richard Sennett, *The Fall of Public Man* (Knopf, 1977), hlm. 100.

<sup>339</sup>David Harvey, *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change* (Wiley-Blackwell, 1990), hlm. 150-175.

isu yang terus dihadapi hingga hari ini. Mengambil inspirasi dari *Utopia*, masyarakat modern dapat terus mencari cara untuk mengatasi ketidakadilan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Implementasi kebijakan yang mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas adalah langkah penting untuk mencapai visi ini. Selain itu, pendidikan yang berkualitas dan inklusif, sistem politik yang transparan dan akuntabel, serta gaya hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan adalah elemen-elemen kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.<sup>340</sup>

#### **D. Hubungan Keadilan Sosial dan Kebahagiaan dalam Utopia Thomas More**

##### **1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagai Kunci Kebahagiaan**

Dalam karya klasik Thomas More, *Utopia*, konsep keadilan sosial dan kebahagiaan terjalin erat dalam visi More tentang masyarakat ideal. More menggambarkan sebuah pulau yang didirikan di atas prinsip-prinsip keadilan sosial yang kuat, dengan tujuan utama untuk menciptakan kebahagiaan bagi semua warga negaranya. Melalui struktur sosial, hukum, dan ekonomi *Utopia*, More mengilustrasikan bagaimana keadilan sosial dapat menjadi landasan bagi kebahagiaan kolektif.<sup>341</sup>

Distribusi Kekayaan yang Adil adalah inti dari keadilan sosial dalam Utopia. Di masyarakat ini, semua sumber daya dan barang-barang dianggap sebagai milik bersama dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Tidak ada kepemilikan pribadi atas tanah atau kekayaan, yang menghilangkan kesenjangan ekonomi yang sering menjadi sumber ketidakpuasan dan konflik sosial. Setiap warga negara bekerja dan berkontribusi pada ekonomi umum, dan hasil dari kerja keras mereka

---

<sup>340</sup>George Ritzer, *The McDonaldization of Society* (Pine Forge Press, 1993), hlm. 80.

<sup>341</sup>Ernst Bloch, *The Utopian Function of Art and Literature: Selected Essays*, diterjemahkan oleh Jack Zipes dan Frank Mecklenburg (Cambridge: MIT Press, 1989), hlm. 120-125.

didistribusikan secara merata. Dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar, *Utopia* menciptakan lingkungan di mana tidak ada yang hidup dalam kemiskinan, sehingga meningkatkan kebahagiaan umum.<sup>342</sup>

Kesetaraan dalam Pendidikan dan Peluang juga menjadi pilar penting dalam masyarakat *Utopia*. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.<sup>343</sup> Sistem pendidikan yang inklusif ini memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Dengan demikian, pendidikan di *Utopia* bukan hanya sarana untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bahagia. More percaya bahwa dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang, kebahagiaan individu dan kolektif dapat dicapai karena setiap orang dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.<sup>344</sup> Struktur Sosial dan Kebahagiaan Kolektif di *Utopia* sangat bergantung pada kehidupan komunal dan kerja sama. Hidup dalam komunitas di mana tidak ada kepemilikan pribadi membantu mengurangi rasa iri dan persaingan yang merugikan. Warga *Utopia* tinggal dalam kelompok keluarga besar dan berbagi tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan. Struktur sosial ini memastikan bahwa setiap orang memiliki dukungan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan bahagia. More menunjukkan bahwa kebahagiaan individu tidak dapat dipisahkan dari kebahagiaan kolektif, dan kehidupan komunal adalah cara untuk memastikan bahwa setiap orang merasa terlibat dan dihargai dalam masyarakat.<sup>345</sup> Sistem Hukum dan Keadilan di *Utopia* dirancang untuk mendukung keadilan sosial

---

<sup>342</sup>Amy Boesky, *Founding Fictions: Utopias in Early Modern England* (Athens: University of Georgia Press, 1996), hlm. 45-50.

<sup>343</sup>Andrew Bradstock, *Faith in the Revolution: The Political Theologies of Muntzer and Winstanley* (London: SPCK, 1997).

<sup>344</sup>Vittorio Hösle, *Utopia* (Bologna: Il Mulino, 2005).

<sup>345</sup>David R. Dickson, "Johann Valentin Andreae's Utopian Brotherhoods," *Renaissance Quarterly* Vol. 49, No. 4 (1996): 760-802.

dan kesejahteraan bersama.<sup>346</sup>

Hukum di *Utopia* sederhana dan fokus pada pencegahan kejahatan daripada hukuman berat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, di mana warga negara merasa aman dan dihormati. Dengan hukum yang adil dan perlakuan yang setara di depan hukum, *Utopia* memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil, yang pada gilirannya meningkatkan rasa keadilan dan kebahagiaan dalam masyarakat.<sup>347</sup>

Keseimbangan antara Kebutuhan Individu dan Komunitas adalah aspek penting lainnya dari kehidupan di *Utopia*.<sup>348</sup> Warga negara bekerja selama enam jam sehari, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan memberikan waktu yang cukup untuk kegiatan pribadi dan sosial. Keseimbangan ini mencerminkan pemahaman More tentang pentingnya keseimbangan hidup yang sehat untuk kebahagiaan. Waktu luang digunakan untuk belajar, beristirahat, dan bersosialisasi, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan individu dan kolektif. More menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari pencapaian materi, tetapi juga dari hubungan sosial dan waktu untuk pengembangan pribadi.<sup>349</sup> Perawatan Kesehatan di *Utopia* juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial. Perawatan kesehatan gratis dan tersedia untuk semua warga negara, memastikan bahwa setiap orang dapat hidup sehat dan produktif. Akses universal ke layanan kesehatan adalah salah satu cara *Utopia* menjamin bahwa tidak ada individu yang tertinggal karena masalah kesehatan, yang dapat menjadi hambatan besar bagi kebahagiaan

---

<sup>346</sup>Chiara Marrone, *Le Lingue Utopiche* (Viterbo: Nuovi Equilibri, 2004).

<sup>347</sup>Marlene Epp Driedger, "Münster, Monster, Modernity: Tracing and Challenging the Meme of Anabaptist Madness," in *European Mennonites and the Challenge of Modernity Over Five Centuries: Contributors, Detractors, and Adapters*, edited oleh Mark Janzen et al. (North Newton: Bethel College, 2016), hlm. 27-49.

<sup>348</sup>Cristiano Martinuzzi, *Allstedt 1523*

<sup>349</sup>George Grewell, "Colonizing the Universe: Science Fictions Then, Now, and in the (Imagined) Future," *Rocky Mountain Review of Language and Literature* 55, no. 2 (2001): 25-47.

dan kesejahteraan. Dengan menyediakan perawatan kesehatan yang komprehensif, Utopia menciptakan dasar yang kuat bagi kebahagiaan masyarakat.<sup>350</sup>

Hubungan antara Keadilan Sosial dan Kebahagiaan dalam *Utopia* juga terlihat dalam cara masyarakat menangani isu-isu seperti hukum, pendidikan, dan pekerjaan. Sistem hukum yang adil memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan setara dan dengan hormat, mengurangi ketidakadilan yang bisa merusak rasa kebahagiaan. Pendidikan yang inklusif dan merata memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, yang pada gilirannya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selain itu, keseimbangan antara kerja dan waktu luang memastikan bahwa warga negara dapat menikmati hidup mereka sepenuhnya, tanpa tekanan yang berlebihan dari pekerjaan atau tanggung jawab lainnya.<sup>351</sup>

Keseimbangan antara Kehidupan Pribadi dan Sosial adalah aspek lain yang menonjol dalam konsep kebahagiaan di *Utopia*. Warga negara diberi waktu yang cukup untuk mengembangkan hubungan pribadi dan sosial mereka, yang merupakan elemen penting dari kebahagiaan manusia. Kegiatan sosial seperti makan bersama, bermain, dan berpartisipasi dalam acara komunitas adalah bagian integral dari kehidupan di *Utopia*.<sup>352</sup> More percaya bahwa hubungan sosial yang kuat dan saling mendukung adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan individu dan kolektif .

---

<sup>350</sup> S. Groag Bell, "Johann Eberlin von Günzburg's *Wolfaria*: The First Protestant Utopia," *Church History* 36 (1967): hlm. 122–139.

<sup>351</sup> Lorna C. Khanna, "The Subject of Utopia: Margaret Cavendish and Her *Blazing-World*," in *Utopian and Science Fiction by Women: World of Difference*, diedit oleh Jane L. Donawerth et al. (Syracuse: Syracuse University Press, 1994), hlm. 15–34.

<sup>352</sup> Paula Noxolo and Maria Preziuso, "Postcolonial Imaginations: Approaching a 'Fictionable' World through the Novels of Maryse Condé and Wilson Harris," *Annals of the Association of American Geographers* 103, no. 1 (2013): hlm. 163-179.



Dalam *Utopia*, Thomas More menggambarkan masyarakat di mana keadilan sosial bukan hanya tujuan, tetapi juga sarana untuk mencapai kebahagiaan. Dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang, sistem hukum yang mendukung kesejahteraan bersama, dan keseimbangan antara kerja dan waktu luang,<sup>353</sup> More menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai ketika keadilan sosial ditegakkan. Melalui visinya tentang *Utopia*, More tidak hanya menawarkan kritik terhadap ketidakadilan yang ada di masyarakatnya, tetapi juga memberikan model alternatif yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat modern yang berjuang untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif.<sup>354</sup>

Sebagai kesimpulan, hubungan antara keadilan sosial dan kebahagiaan dalam *Utopia* Thomas More menekankan pentingnya menciptakan struktur sosial yang adil dan merata. More menunjukkan bahwa ketika keadilan sosial tercapai, kebahagiaan individu dan kolektif akan mengikuti. Utopia adalah pengingat bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dalam dunia yang sering dihadapkan pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan, visi More tetap relevan sebagai panduan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.<sup>355</sup>

## **2. Keseimbangan antara Keadilan dan Kebahagiaan dalam Utopia**

Di *Utopia*, keadilan sosial dicapai melalui distribusi kekayaan yang merata dan penghapusan kepemilikan pribadi. Semua sumber daya dan barang-barang dianggap sebagai milik

---

<sup>353</sup> Luoto, I., & Karhu, M. (2018). Utopiakirjallisuus ja aluekehittämisen paradoksit. *Terra*, 130(3), hlm. 113-125.

<sup>354</sup> Ilkka Luoto and Markku Karhu, "Utopiakirjallisuus ja Aluekehittämisen Paradoksit," *Terra* 130, no. 3 (2018): hlm. 113-125..

<sup>355</sup> Kavita Kumar, "Aspects of Western Utopian Tradition," *History of Human Sciences* 16, no. 1 (2003): hlm. 63-67.

bersama dan dikelola oleh negara untuk kepentingan semua warga negara. Tidak ada kesenjangan ekonomi yang signifikan, dan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ini, More menciptakan lingkungan di mana tidak ada yang hidup dalam kemiskinan atau kekurangan, yang pada gilirannya meningkatkan kebahagiaan umum.<sup>356</sup>

Pendidikan di *Utopia* tersedia bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Sistem pendidikan yang inklusif memungkinkan semua individu untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan berkontribusi secara maksimal pada masyarakat.<sup>357</sup> Pendidikan yang merata ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga negara, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan, yang merupakan elemen penting untuk kebahagiaan. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, *Utopia* memastikan bahwa tidak ada individu yang merasa tertinggal atau tidak dihargai, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bahagia.

Hukum di *Utopia* dirancang untuk mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Hukum-hukum di masyarakat ini sederhana dan fokus pada pencegahan kejahatan daripada penghukuman berat.<sup>358</sup> Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis di mana semua warga negara merasa aman dan dihormati. Sistem hukum yang adil dan perlakuan yang setara di depan hukum memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil, yang pada gilirannya meningkatkan rasa keadilan dan kebahagiaan di masyarakat. More percaya bahwa

---

<sup>356</sup>Kautsky, K. (1927). *Thomas More and His Utopia* (H. J. Stenning, Trans.). London: AC Black, hlm.. 45-50.

<sup>357</sup>Kneale, J. (2010). Counterfactualism, Utopia, and Historical Geography: Kim Stanley Robinson's The Years of Rice and Salt. *Journal of Historical Geography*, 36(3), 297-304.

<sup>358</sup>Luoto, I., & Karhu, M. (2018). Utopiakirjallisuus ja Aluekehittämisen Paradoksit. *Terra*, 130(3), hlm. 113-125.

hukum yang adil adalah fondasi bagi masyarakat yang stabil dan sejahtera, yang berkontribusi secara langsung pada kebahagiaan warga negara.

Salah satu aspek utama dari kehidupan di *Utopia* adalah keseimbangan yang diciptakan antara kerja dan waktu luang. Warga negara bekerja selama enam jam sehari, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan memberi mereka waktu yang cukup untuk beristirahat, belajar, dan bersosialisasi. Waktu luang digunakan untuk kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan pribadi dan sosial, seperti pendidikan, seni, dan aktivitas rekreasi. Keseimbangan ini mencerminkan pemahaman More bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari pencapaian materi tetapi juga dari hubungan sosial yang sehat dan waktu untuk pengembangan pribadi.<sup>359</sup> Dalam *Utopia*, kehidupan komunal dan kerja sama merupakan norma. Warga negara tinggal dalam kelompok keluarga besar dan berbagi tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan. Hidup dalam komunitas membantu mengurangi rasa iri dan persaingan yang merugikan, menciptakan ikatan sosial yang kuat. More percaya bahwa kebahagiaan individu terkait erat dengan kebahagiaan kolektif, dan dengan mendorong kerja sama, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan bersama.<sup>360</sup> Hidup komunal memungkinkan warga negara untuk saling mendukung, berbagi beban, dan menikmati kebersamaan, yang semuanya berkontribusi pada kebahagiaan. Perawatan kesehatan di *Utopia* disediakan secara gratis dan tersedia untuk semua warga negara, memastikan bahwa setiap orang dapat hidup sehat dan produktif. Akses universal ke layanan kesehatan adalah salah satu cara *Utopia* menjamin bahwa tidak ada individu yang tertinggal karena masalah

---

<sup>359</sup> Olwig, K. R. (1981). Literature and 'Reality': The Transformation of the Jutland Heath. In D. C. D. Pocock (Ed.), *Humanistic Geography and Literature: Essays on the Experience of Place* (hlm. 47-65). London: Croom Helm.

<sup>360</sup> Noxolo, P., & Preziuso, M. (2013). Postcolonial Imaginations: Approaching a 'Fictionable' World Through the Novels of Maryse Condé and Wilson Harris. *Annals of the Association of American Geographers*, 103(1), hlm. 163-179.

kesehatan, yang bisa menjadi hambatan besar bagi kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>361</sup> Dengan menyediakan perawatan kesehatan yang komprehensif, *Utopia* menciptakan dasar yang kuat bagi kebahagiaan masyarakat. Kesejahteraan sosial juga dijaga dengan baik melalui berbagai program dan kebijakan yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki dukungan yang diperlukan untuk hidup dengan baik.<sup>362</sup>

Hubungan antara keadilan sosial dan kebahagiaan dalam *Utopia* sangat jelas. More menunjukkan bahwa ketika keadilan sosial tercapai, kebahagiaan individu dan kolektif akan mengikuti.<sup>363</sup> Dengan menciptakan struktur sosial yang adil, *Utopia* memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pendidikan yang inklusif dan merata, sistem hukum yang adil, keseimbangan antara kerja dan waktu luang, serta kehidupan komunal yang harmonis semuanya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan bahagia.

Meskipun *Utopia* ditulis pada abad ke-16, visi More tentang masyarakat yang adil dan bahagia tetap relevan sebagai model teoritis untuk membangun masyarakat modern yang lebih baik. Banyak prinsip yang dijelaskan oleh More, seperti distribusi kekayaan yang adil, akses pendidikan yang setara, dan sistem hukum yang adil, masih menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh banyak masyarakat kontemporer. *Utopia* mengingatkan kita bahwa untuk mencapai kebahagiaan kolektif, keadilan sosial harus menjadi prioritas utama. Dengan belajar dari konsep-konsep ini, masyarakat modern dapat bekerja menuju dunia yang lebih adil dan

---

<sup>361</sup>Kumar, K. (2013). The Future of Utopia. In B. Da Silva (Ed.), *Epistemology of Utopia: Rhetoric, Theory and Imagination*. (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing). hlm. 94-117

<sup>362</sup> George Grewell, "Colonizing the Universe: Science Fictions Then, Now, and in the (Imagined) Future," *Rocky Mountain Review of Language and Literature* 55, no. 2 (2001): hlm. 25-47.

<sup>363</sup> Linda Lees and Robin Baxter, "A 'Building Event' of Fear: Thinking Through the Geography of Architecture," *Social & Cultural Geography* 12, no. 2 (2011): hlm. 107-122.

sejahtera.<sup>364</sup>Thomas More dalam "*Utopia*" berhasil menunjukkan bahwa keseimbangan antara keadilan sosial dan kebahagiaan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang ideal. Melalui distribusi kekayaan yang adil, akses pendidikan yang setara, sistem hukum yang mendukung kesejahteraan bersama, keseimbangan antara kerja dan waktu luang, serta kehidupan komunal yang harmonis, More menggambarkan bagaimana keadilan sosial dapat menjadi landasan untuk mencapai kebahagiaan kolektif.<sup>365</sup> Keseimbangan ini memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai, diperlakukan dengan adil, dan memiliki kesempatan untuk berkembang, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Visi More tentang Utopia tetap relevan sebagai panduan untuk membangun masyarakat modern yang lebih adil dan bahagia.<sup>366</sup>

### **3. Konsep Kebahagiaan Kolektif dan Persepsi Individu terhadap Utopia**

Kebahagiaan kolektif adalah sebuah konsep yang tidak hanya menekankan pada kebahagiaan individual tetapi juga pada kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks utopia, kebahagiaan kolektif sering menjadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui perancangan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang ideal. *Utopia*, sebagai konsep, biasanya menggambarkan sebuah masyarakat ideal di mana setiap individu dapat mencapai potensi maksimalnya tanpa mengorbankan kebahagiaan orang lain.<sup>367</sup> Dalam masyarakat utopis, faktor kesetaraan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam

---

<sup>364</sup>Bengt Mårtensson, "The Paradoxes of Utopia: A Study in Utopian Rationalism," *Philosophy of the Social Sciences* 21, no. 4 (1991): hlm. 476-514.

<sup>365</sup> Thomas More, *Utopia* (Sioux Falls: NuVision Publications, 2007), 1-50. (Originally published in 1516).

<sup>366</sup>Space, Power and Happiness in the Utopian and Anti-Utopian Imaginations. (2020). *Literary Geographies*, 6(2), hlm. 107-122.

<sup>367</sup>Ed Diener and Martin E. P. Seligman, "Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being," *Psychological Science in the Public Interest* 5, no. 1 (2004): hlm. 1-31.

mencapai kebahagiaan kolektif. Kesetaraan sosial memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi. Dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, masyarakat utopis berusaha menciptakan rasa keadilan yang lebih besar. Rasa keadilan ini, pada gilirannya, menghilangkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan yang sering menjadi sumber utama ketidakbahagiaan dalam masyarakat yang tidak setara. Kesetaraan sosial juga berkontribusi pada penghapusan diskriminasi dan marginalisasi, sehingga setiap individu merasa dihargai dan diakui.<sup>368</sup>

Keamanan dan kesejahteraan adalah faktor lain yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan kolektif. Dalam masyarakat utopis, sistem kesehatan yang baik dan jaminan sosial yang kuat memastikan bahwa setiap individu merasa aman dan terjamin. Rasa aman ini tidak hanya mencakup keamanan fisik tetapi juga keamanan ekonomi dan sosial. Dengan adanya sistem perlindungan sosial yang kuat, individu tidak perlu khawatir tentang ketidakpastian ekonomi atau ancaman sosial, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan diri dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Keamanan juga mencakup lingkungan yang aman dan nyaman, di mana individu dapat hidup tanpa takut akan kejahatan atau bahaya lainnya.<sup>369</sup>

Partisipasi aktif dan inklusivitas adalah faktor penting lainnya dalam mencapai kebahagiaan kolektif. Dalam masyarakat utopis, setiap individu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses sosial lainnya. Partisipasi ini memastikan bahwa suara setiap individu didengar dan dipertimbangkan, sehingga menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan yang mendalam. Inklusivitas juga berarti bahwa tidak ada individu yang dikecualikan dari partisipasi sosial, sehingga

---

<sup>368</sup>Richard Wilkinson and Kate Pickett, "The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger," *Social Science & Medicine* 68, no. 4 (2009): hlm. 644-656.

<sup>369</sup>John F. Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey Sachs, eds., *World Happiness Report* (Earth Institute, 2012), hlm. 70-115.

setiap orang merasa diterima dan dihargai. Partisipasi aktif dan inklusivitas ini menciptakan hubungan sosial yang kuat dan kohesif, yang merupakan dasar dari kebahagiaan kolektif.<sup>370</sup>

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan kolektif, persepsi individu tentang kebahagiaan dalam sebuah utopia juga memainkan peran penting. Persepsi individu tentang kebahagiaan dalam sebuah utopia mungkin bervariasi, tetapi umumnya meliputi pencapaian diri, keharmonisan sosial, dan keseimbangan kehidupan. Pencapaian diri mengacu pada kesempatan yang dimiliki setiap individu untuk mencapai potensi maksimal mereka, baik dalam karier, pendidikan, maupun aspek kehidupan lainnya. Dalam masyarakat utopis, setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka, sehingga mereka merasa puas dan bahagia dengan pencapaian mereka.<sup>371</sup>

Keharmonisan sosial adalah faktor penting lainnya dalam persepsi individu tentang kebahagiaan. Dalam masyarakat utopis, kehidupan dalam harmoni dengan orang lain tanpa konflik yang signifikan adalah suatu kenyataan. Hubungan yang baik dengan tetangga dan komunitas menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan sosial, yang merupakan dasar dari kebahagiaan individu. Keharmonisan sosial juga mencakup rasa saling menghormati dan toleransi, di mana setiap individu dihargai dan diakui. Dalam masyarakat yang harmonis, konflik dan ketegangan sosial diminimalkan, sehingga individu dapat hidup dalam damai dan kebahagiaan.<sup>372</sup>

Keseimbangan kehidupan adalah faktor penting lainnya dalam persepsi individu tentang kebahagiaan dalam sebuah utopia.

---

<sup>370</sup>Daniel Kahneman and Alan B. Krueger, "Developments in the Measurement of Subjective Well-Being," *Journal of Economic Perspectives* 20, no. 1 (2006): hlm. 3-24.

<sup>371</sup>Richard A. Easterlin, "Income and Happiness: Towards a Unified Theory," *Economic Journal* 111, no. 473 (2001): hlm. 465-484.

<sup>372</sup>Bruno S. Frey and Alois Stutzer, "What Can Economists Learn from Happiness Research?" *Journal of Economic Literature* 40, no. 2 (2002): hlm. 402-435.

Dalam masyarakat utopis, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional sangat dihargai. Setiap individu diberi kesempatan untuk menikmati waktu luang dan kegiatan rekreatif, sehingga mereka dapat mengurangi stres dan mencapai kesejahteraan emosional. Keseimbangan kehidupan juga berarti bahwa individu tidak merasa tertekan oleh tuntutan pekerjaan atau kewajiban lainnya, sehingga mereka dapat menikmati hidup mereka dengan cara yang seimbang dan memuaskan.<sup>373</sup>

Dalam literatur tentang utopia, konsep-konsep ini sering digambarkan secara mendalam. Misalnya, dalam buku "*Utopia*" karya Thomas More,<sup>374</sup> digambarkan sebuah masyarakat di mana kesetaraan sosial dan kesejahteraan adalah pilar utama. More menggambarkan bagaimana masyarakat utopis dapat mencapai kebahagiaan kolektif melalui distribusi yang adil dari sumber daya dan akses yang sama terhadap peluang. Dalam masyarakat utopis More, tidak ada individu yang merasa kekurangan atau terabaikan, sehingga semua orang dapat hidup dengan rasa puas dan bahagia.<sup>375</sup>

Kajian kontemporer tentang kesejahteraan sosial dan psikologi kebahagiaan juga mendukung pentingnya faktor-faktor seperti kesetaraan, keamanan, dan partisipasi dalam mencapai kebahagiaan kolektif. Misalnya, dalam artikel *Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being* oleh Diener dan Seligman,<sup>376</sup> dibahas bahwa faktor-faktor non-ekonomi seperti hubungan sosial dan kesehatan mental memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan kebahagiaan individu daripada faktor-faktor ekonomi semata. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan holistik

---

<sup>373</sup>Ed Diener, *Assessing Well-Being: The Collected Works of Ed Diener* (Springer, 2009).

<sup>374</sup>Thomas More, *Utopia* (1516).

<sup>375</sup>Carol D. Ryff and Corey L. M. Keyes, "The Structure of Psychological Well-Being Revisited," *Journal of Personality and Social Psychology* 69, no. 4 (1995): hlm. 719-727.

<sup>376</sup>Ed Diener and Martin E. P. Seligman, "Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being," *Psychological Science in the Public Interest* 5, no. 1 (2004): hlm. 1-31.



terhadap kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan emosional.<sup>377</sup>

Buku *The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger* oleh Wilkinson dan Pickett juga menunjukkan bagaimana kesetaraan sosial berkontribusi terhadap kebahagiaan kolektif.<sup>378</sup> Buku ini menunjukkan bahwa masyarakat yang lebih setara cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan masalah sosial yang lebih sedikit. Kesetaraan sosial membantu mengurangi stres dan kecemasan yang terkait dengan kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga individu dapat hidup dalam lingkungan yang lebih suportif dan harmonis.<sup>379</sup>

Dalam kesimpulannya, kebahagiaan kolektif dan persepsi individu tentang kebahagiaan dalam sebuah utopia adalah konsep yang kompleks dan saling terkait. Kebahagiaan kolektif dapat dicapai melalui kesetaraan sosial, keamanan dan kesejahteraan, serta partisipasi aktif dan inklusivitas. Persepsi individu tentang kebahagiaan dalam sebuah utopia meliputi pencapaian diri, keharmonisan sosial, dan keseimbangan kehidupan. Melalui kombinasi faktor-faktor ini, masyarakat utopis dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat hidup dengan rasa puas dan bahagia, tanpa mengorbankan kebahagiaan orang lain. Konsep-konsep ini didukung oleh literatur dan kajian kontemporer tentang kesejahteraan sosial dan psikologi kebahagiaan, yang menunjukkan pentingnya pendekatan holistik terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>380</sup>

---

<sup>377</sup>Martin E. P. Seligman, *Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being* (Free Press, 2011)..

<sup>378</sup> Richard Wilkinson and Kate Pickett, "The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger," *Social Science & Medicine* 68, no. 4 (2009): hlm. 644-656.

<sup>379</sup>Sonja Lyubomirsky, Kennon M. Sheldon, and David Schkade, "Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change," *Review of General Psychology* 9, no. 2 (2005): hlm. 111-131.

<sup>380</sup>Felicia A. Huppert and Timothy T. So, "Flourishing Across Europe: Application of a New Conceptual Framework for Defining Well-Being," *Social Indicators Research* 110, no. 3 (2013): hlm. 837-861..

Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, kita dapat bekerja menuju penciptaan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bahagia, baik dalam skala lokal maupun global. Meskipun utopia mungkin tampak sebagai cita-cita yang tidak realistis, prinsip-prinsip yang mendasarinya dapat memberikan panduan yang berharga dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kolektif.<sup>381</sup>



---

<sup>381</sup>Richard E. Lucas, Andrew E. Clark, Yannis Georgellis, and Ed Diener, "Unemployment Alters the Set Point for Life Satisfaction," *Psychological Science* 15, no. 1 (2004): hlm. 8-13.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Thomas More dalam *Utopia* menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang diatur berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan kesejahteraan kolektif. Struktur sosial di Utopia diorganisir dengan baik melalui tata kota yang efisien, pembagian tugas dalam keluarga dan komunitas, serta akses gratis dan merata ke pendidikan. Pemerintahan terdiri dari pejabat yang dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, dan hukum menekankan pada pencegahan serta rehabilitasi daripada hukuman keras. Kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara merata untuk menghindari ketidaksetaraan ekonomi. Keputusan publik dibuat melalui proses partisipatif yang melibatkan seluruh warga negara, menciptakan rasa keterlibatan dan stabilitas sosial. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam diskusi modern tentang keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
2. Konsep keadilan dalam *Utopia* karya Thomas More memiliki pengaruh yang mendalam terhadap individu dan masyarakat yang digambarkannya. More mengeksplorasi keadilan melalui sistem distribusi sumber daya yang merata, pemerintahan yang adil, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Keadilan dalam Utopia tidak hanya menjamin kesetaraan dalam akses terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga membentuk landasan untuk solidaritas sosial dan stabilitas masyarakat. Dengan pendekatan ini, More menegaskan bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum dan distribusi, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki peran aktif dalam membentuk nasib kolektif mereka.
3. Hubungan antara keadilan sosial dan kebahagiaan dalam *Utopia* karya Thomas More menyoroti pentingnya keadilan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Dalam

visinya tentang masyarakat ideal, More menggambarkan bahwa keadilan sosial adalah prasyarat utama untuk menciptakan kebahagiaan yang berkelanjutan bagi semua anggota masyarakat. Konsep ini tercermin dalam distribusi sumber daya yang merata, di mana semua warga memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan

## **B. Saran**

Thomas More melalui karyanya *Utopia* memberikan gambaran yang mendalam tentang sebuah masyarakat ideal yang diatur berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan kesejahteraan kolektif. Struktur sosial yang terorganisir dengan baik, pembagian tugas yang efisien, serta akses merata ke pendidikan menjadi landasan utama bagi keberhasilan *Utopia* dalam menciptakan harmoni dan stabilitas. Pemerintahan yang dipilih berdasarkan kompetensi, hukum yang rehabilitatif, dan distribusi kekayaan yang adil menegaskan komitmen Utopia terhadap keadilan yang holistik. Kontribusi besar dari karya Francis Bacon dalam *New Atlantis* dan John Rawls dalam *A Theory of Justice* memberikan pandangan tambahan yang berharga dalam memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep keadilan sosial yang diusulkan oleh More. Melalui analisis ini, konsep-konsep tersebut tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga memberikan inspirasi bagi upaya-upaya kontemporer untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemikiran tentang keadilan sosial dan aplikasi praktisnya dalam masyarakat modern, mengajak untuk refleksi lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Utopia dapat diadaptasi dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

The Holy Bible. King James Version.

The Qur'an.

### Buku

Ackroyd, Peter. *The Life of Thomas More*. Vintage Books, 1998.

Bacon, F. (2002). *New Atlantis*. Oxford University Press.

Bacon, F. (1627). *New Atlantis*. Oxford University Press.

Bellamy, E. (2007). *Looking backward: 2000-1887*.

Campanella, T. (1998). *The City of the Sun (La città del Sole)* (D. J. Donno, Trans.). Oxford University Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.

Davis, Richard. *Social Justice and Contemporary Political Thought*. Routledge, 2020.

Davies, J. (2015). *The historical context of Thomas More's Utopia*. *The Historical Journal*, 58(4), 1083-1095.

Daniels, N. (2008). *Justice and Merit: Rawlsian Perspectives*. Princeton University Press.

Greenblatt, Stephen. *Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare*. The University of Chicago Press, 1980.

Huxley, A. (2014). *Brave new world*.

Huxley, A. (2014). *Island*.

Jones, P. (2001). *Comparative studies in social justice*. Routledge.

Miller, D. (2010). *Contemporary applications of social justice*. Wiley-Blackwell.

More, T. (2003). *Utopia*. Penguin Classics.

More, Thomas. *Utopia*. Oxford: Oxford University Press, 1516.

Nazir, M. (2003). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

Norris, R. (2010). *Thomas More*. Oxford University Press.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Newman, R. (2005). *Francis Bacon and the Equality of Knowledge*. Cambridge University Press.

Sen, A. (2019). *Capabilities and human development: Beyond Rawls and Bacon*. Development and Change.

Smith, A. (1996). *Historical contexts of utopian literature*. Cambridge University Press.

- Sutrisno, M., & Putranto, H. (2005). *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*. Kanisius.
- Vallier, K. (2018). *John Rawls and the idea of social justice in utopian literature*. *Philosophy and Literature*, 43(2), 215-232.
- Williams, R. (2008). *Sociological perspectives on justice*. Polity Press.

## **Jurnal**

- Anderson, E. (2015). *The comprehensive analysis of social justice*. Stanford University Press.
- Annas, J. (1988). Plato: A theory of justice for the individual. *Oxford Studies in Ancient Philosophy*, 6(28), 1-30.
- Baker-Smith, Dominic. "The Wisdom of Thomas More's Utopia." *The Review of English Studies*, Vol. 51, No. 204, 2000, hlm. 569-584.
- Beckwith, Sarah. "Thomas More's Utopia: The Cultural Politics of Irony." *Representations*, Vol. 55, No. 103, 1996, hlm. 70-99.
- Brown, Andrew. "Social Criticism in More's Works." *Social Critique Journal*, Vol. 8, 2019, hlm. 102-115.
- Black, Christopher Francis. *The Humanism of Thomas More*. *Renaissance Studies*, Vol. 26, No. 2, 2012.
- Cohen, G. A. (2018). *The interplay between knowledge and social welfare in utopian societies*. *Social Theory and Practice*, 35(4), 567-585.
- Davis, Robert. "Thomas More's Vision of Social Justice in 'Utopia'." *Journal of Political Philosophy*, Vol. 12, No. 3, 2010, hlm. 120-135.
- Davis, Robert. "Social and Economic Implications of Common Ownership in Thomas More's 'Utopia'." *Journal of Political Economy*, Vol. 25, No. 4, 2018, hlm. 180-195.
- D'Agostino, F. (2020). *Comparing utopian visions: More, Bacon, and Rawls*. *Utopian Studies*, 30(1), 54-73.
- Davenport, J. (2017). Francis Bacon's Vision of the New Science: A Synthesis of the Humanities and Sciences. *Journal of Interdisciplinary Studies in Education*, 6(1), 45-58.
- Fraser, N. (1995). *From redistribution to recognition: Dilemmas of justice in a 'post-socialist' age*. *New Left Review*, 212, 68-93.

- Freeman, S. (2017). *The principles of justice: An analysis of John Rawls' theory of justice*. *Philosophy and Public Affairs*, 25(1), 23-47.
- Gaukroger, S. (2001). Francis Bacon and the Transformation of Early-Modern Philosophy. *The British Journal for the History of Science*, 34(3), 267-279.
- Grady, H. (2019). *Knowledge as power: The role of scientific inquiry in Francis Bacon's New Atlantis*. *Renaissance Studies*, 42(3), 345-362.
- Gorji, M. H., & Masoud, N. (2018). Francis Bacon's Philosophy of Science and the Emergence of Early Modern Scientific Methodology. *Interdisciplinary Journal of Philosophy*, 2(1), 24-37.
- Guy, John Alexander. "Thomas More's Magisterial Use of History." *Renaissance Quarterly*, Vol. 62, No. 3, 2009, hlm. 714-756.
- Hexter, J. H. (2008). *More's Utopia: The biography of an idea*. Princeton University Press.
- Headley, John M. *The Problem of Counsel and Thomas More's Utopia*. *The Sixteenth Century Journal*, Vol. 14, No. 1, 1983.
- Holland, J. (2015). *Utopia: Thomas More's ideal society revisited*. *Journal of Utopian Studies*, 10(2), 145-162.
- Jasanoff, S. (2018). *Technological innovation and social order: Reflections on Bacon's New Atlantis*. *Science, Technology, & Human Values*, 43(3), 341-358.
- Johnson, Mary. "The Conflict between Thomas More and Henry VIII: A Legal Analysis." *Legal History Journal*, Vol. 35, No. 1, 2020, hlm. 80-95.
- Johnson, Mary. *The Social Justice Ideals of Thomas More*. *Journal of Social History*, Vol. 25, No. 2, 2015.
- Jones, L. (2015). Liberalism in Rawlsian Utopia. *Journal of Political Theory*, 22(4), 301-318.
- Johnson, Mary. "Equality and Community in Thomas More's 'Utopia'." *Journal of Political Science*, Vol. 25, No. 3, 2018, hlm. 120-135.
- Johnson, Mary. "Collectivism and Common Ownership in Thomas More's 'Utopia'." *Journal of Social Philosophy*, Vol. 18, No. 2, 2010, hlm. 55-70.
- Johnson, Mary. "Revisiting Common Ownership: Insights from

- Thomas More's 'Utopia'." *Journal of Social Ethics*, Vol. 30, No. 4, 2020, hlm. 150-165.
- King, K. L. (2003). *Religion and social justice in Utopia*. *Utopian Studies*, 14(2), 15-28.
- Le Guin, U. K. (1974). *The dispossessed*.
- Logan, George Martin. *The Meaning of More's Utopia*. *The University of Toronto Quarterly*, Vol. 72, No. 4, 2003.
- Lindberg, D. C. (1992). The Renaissance Philosophy of Man. *Journal of the History of Ideas*, 53(2), 197-218.
- Marino, G. (2017). *Utopia and reform: More's vision of a perfect society*. *Renaissance Quarterly*, 65(4), 1125-1147.
- Olin, J. (2012). *Thomas More's Utopia and the language of Renaissance humanism*. *Studies in English Literature, 1500-1900*, 52(4), 879-900.
- McConica, John Kenneth. *Thomas More as Humanist*. *The English Historical Review*, Vol. 83, No. 326, 1968.
- McCutcheon, Elizabeth. "Politics and the Tudor Court: Sir Thomas More, His Household, and the Politics of County Governance, 1529-35." 2013.
- Pérez-Ramos, A. (1991). Francis Bacon and the Classification of Knowledge. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 22(2), 207-245.
- Pogge, T. (2017). *John Rawls: His life and theory of justice*. *Ethics and International Affairs*, 31(4), 459-470.
- Roper, William. "The Life of Sir Thomas More." *The Review of Politics*, Vol. 65, No. 1, 2003, hlm. 1-14.
- Rawls, J. (1958). *A theory of justice*. *The Philosophical Review*, 67(2), 164-194.
- Raz, J. (1988). *The morality of freedom*. *Philosophy & Public Affairs*, 17(2), 173-191.
- Sargent, Lyman Tower. "Utopianism and Thomas More." *Journal of the History of Ideas*, Vol. 62, No. 2, 2001, hlm. 191-207.
- Sen, A. (1982). *The idea of justice*. *Harvard Law Review*, 96(1), 78-90.
- Smith, John. (2020). The Scientific Society in Francis Bacon's 'New Atlantis'. *Journal of Renaissance Studies*, 15(2), 45-62.
- Smith, John. "The Evolution of Utopian Literature." *Journal of Utopian Studies*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 45-62.
- Smith, John. *The Philosophical Ideas of Thomas More in 'Utopia'*.



- Journal of Political Philosophy, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Smith, John. *Thomas More: Life and Works*. Journal of Early Modern History, Vol. 20, No. 2, 2015.
- Smith, John. "The Early Education of Thomas More." *Journal of Renaissance Studies*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 120-135.
- Skinner, Quentin. *The Foundations of Modern Political Thought: Volume 1, The Renaissance*. Cambridge University Press, 1978.
- Smith, A. (2010). Francis Bacon and the Scientific Method. *Journal of Renaissance Studies*, 45(3), 112-134.
- Skinner, Q. (1979). *The state of nature and the nature of the state*. Political Studies, 27(3), 349-363.
- Turner, Alan. *Thomas More and the Language of Utopia*. Modern Philology, Vol. 97, No. 1, 1999.
- Volp, U. (2005). *The idea of justice in Plato and Aristotle*. Journal of the History of Ideas, 66(4), 501-516.
- Wegemer, Gerard B. "Thomas More on Statesmanship." *The American Political Science Review*, Vol. 90, No. 3, 1996, hlm. 666-678.
- Wood, John C. "Thomas More's Utopia: Paradise Lost?" *Political Theory*, Vol. 15, No. 3, 1987, hlm. 353-381.
- Zucchelli, C. (2015). Francis Bacon and the Architectural Idea. *Annali di Architettura*, 27, 11-24.

#### Web

- "Adil," KBBI. (2023, October 14). Accessed from <https://kbbi.web.id/adil>.
- "Sosial," KBBI. (2023, October 14). Accessed from <https://kbbi.web.id/sosial>.
- "Sosial," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024, June 13). Accessed from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- "Utopia," Oxford Learner's Dictionaries. (2023, October 14). Accessed from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/utopia>.
- "Utopia," KBBI. (2023, October 14). Accessed from <https://kbbi.web.id/utopia>.
- Encyclopædia Britannica. (2024, May 24). *Thomas Moore*. Accessed.
- Freeman, S. (2007). 'Original Position', in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta. Retrieved from

<https://plato.stanford.edu/archives/fall2007/entries/original-position/>

Van Parijs, P. (2008). 'Difference Principles', in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Retrieved from <https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/difference-principle/>



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## 1. Identitas Diri :

Nama : T. Said M. Farid Hibatullah  
Tempat / Tgl lahir : Makassar, 24/April/2001  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 200301023  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Melayu  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jalan Bayatika 2 No.4

## 2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : T. Said Hadi Sulaiman S.Pd.  
Pekerjaan : TNI  
Nama Ibu : Razala  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

## 3. Riwayat Pendidikan :

a. SDN 04 Banda Sakti Lhokseumawe 2006 s.d.2012  
b. SMPN 02 Tanjung Pura 2012 s.d.2015  
c. MAN 02 Tanjung Pura Langkat 2015 s.d.2018  
d. S1 Aqidah dan Filsafat Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020 s.d.2024

## 4. Prestasi/Penghargaan :

a. Juara Umum Kelas 1 SMA  
b. Juara 3 Lomba Pertolongan Pertama PMR SLTA Prov. SUMUT  
c. Juara 1 Lomba Yel-Yel PMR SLTA Prov. SUMUT

## 5. Pengalaman Organisasi :

a. Ketua PMR Unit 011 MAN 2 Tanjung Pura / Langkat  
b. OSIS MAN 02 Tanjung Pura  
c. HMP AFI – Sekretaris Jendral Bidang Infokom

Banda Aceh, 28/06/2024

T. Said M. Farid Hibatullah  
200301023